

LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI 2019



Bagian Organisasi 2020



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2019 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat. Laporan ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan, karena dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya. Disamping itu laporan ini diharapkan dapat membantu penyusunan rencana

strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja.

Dokumen ini menjadi penting karena merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas instansi.

Dalam penyusunan laporan ini telah dilakukan berbagai upaya agar dapat menghasilkan suatu laporan yang baik, namun demikian kesemuanya tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, untuk kesempurnaan laporan ini. Mudah-mudahan dengan laporan ini dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus untuk memacu peningkatan kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi di masa mendatang.

Jambi, Maret 2020 WALIKOTA JAMBI

H. SYARIF FASHA, ME

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan pelaksanaan anggaran berbasiskan kinerja, serta Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan Kepala Daerah melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, maka Kepala laporan pertanggungjawaban Daerah berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) harus dibuat oleh setiap daerah, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Jambi melaksanakan 4 (Empat) Prioritas Pembangunan, 11 (Sebelas) tujuan pembangunan dan 22 (Dua Puluh Dua) sasaran pembangunan, 37 (tiga puluh tujuh) Strategi Pembangunan dan 48 (Empat puluh delapan) Arah Kebijakan serta 34 (Tiga Puluh Empat) Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran tersebut dialokasikan dana sebesar Rp. 1.848.826.216.875,00,- terealisasi sebesar Rp. 1.661.380.787.462,00 (82,60%)

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan diperoleh capaian target Indikator Kinerja Utama sebesar 73,52% masuk dalam kategori capaian SANGAT TINGGI, 5,88% kategori TINGGI, 2,95% kategori RENDAH, 2,95% kategori SANGAT RENDAH dan 14,70% tidak bisa dievaluasi. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa Pemerintah Kota Jambi secara keseluruhan berhasil melaksanakan visi dan misi Kota Jambi.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Jambi ke depan. Yaitu, dengan masih sangat rendahnya capaian penurunan tingkat polusi air pada Sungai Tembuku dan Sungai Asam di Kota Jambi hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemda Kota Jambi dengan berbagai unsur baik di wilayah Kota Jambi, daerah yang berbatasan dengan Kota Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah, khususnya pihak pelaku usaha.

Koordinasi dan sinergi yang lebih optimal diharapkan bisa memberi jawaban untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berbagai pihak, dalam beragam cara sesuai dengan kompetensi dan tugas fungsi masingmasing, berorientasi kepada pencapaian tujuan yang sama.

Pemerintah Kota Jambi senantiasa akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented goverment).

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN		SEKUTIF	i iv viii xi
	1.1.	LATAR BELAKANG	I – 1
	1.2.	MAKSUD DAN TUJUAN	I – 2
	1.3.	GAMBARAN UMUM DAERAH	I – 3 I – 3 I – 6 I – 9 I – 15
	1.4.	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1.4.1. Bidang Infrastruktur 1.4.2. Bidang Sosial Budaya 1.4.3. Bidang Ekonomi 1.4.4. Bidang Lingkungan Hidup 1.4.5. Bidang Pemerintahan	I – 19 I – 20 I – 20 I – 23 I – 24 I – 24
	1.5.	DASAR HUKUM PENYUSUNAN	I – 25
	1.6.	SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2019	I – 26
BAB II	PERE	NCANAAN KINERJA	
	2.1.	RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI 2.1.1. Visi dan Misi	II – 1 II – 2 II – 3 II – 4

			Halamar
		2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah,	
	2.2.	PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019	
BAB III	AKUN	NTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI	
	3.1.	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019	III – 2
	3.2.	EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1. Sasaran 1 Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Akuntabilitas Kinerja Berbasis	III – 6
		TIK	III – 6
		3. Sasaran 3 Meningkatkan Pelayanan Pada Kondisi Pra, Tanggap dan Pasca Kebakaran Serta Kebencanaan	III – 29 III – 31
		4. Sasaran 4 Meningkatkan Pemahaman Tentang Arti Pentingnya Ideologi Pancasila Dan Kebhinekaan Dalam Kehidupan Sosial	
		Masyarakat	
		Pembangunan	III – 34
		Perkotaan	III – 36 III – 49
		Hidup	

		Halaman
	Sasaran 9 Meningkatnya Ketahanan Pangan	III – 79
	Sasaran 10 Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRBSasaran 11 Meningkatkan Pendapatan Asli	III – 81
	Daerah (PAD)	III – 83
	Sasaran 12 Meningkatkan Realisasi Investasi	III – 86
	Sasaran 13 Meningkatkan Penyerapan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Sasaran 14 Meningkatkan Daya Saing Usaha	III – 90
15	Skala Mikro Dan Kecil	III – 92
	Sasaran 15 Meningkatkan Derajat Kesehatan Sasaran 16 Meningkatkan Kualitas Dan	III – 102
	Aksesbilitas PendidikanSasaran 17 Mengendalikan Angka Kelahiran	III – 105
	Penduduk	III – 106
	GenderSasaran 19 Meningkatkan Pemenuhan Hak	III – 122
	AnakSasaran 20 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam	III – 131
21.	PembangunanSasaran 21 Meningkatkan Prestasi Dan	III – 133
	Kreativitas KepemudaanSasaran 22 Menurunkan Angka	
	PMKS RBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA HUN 2019 DENGAN TAHUN 2018	III – 137 III – 143
. PEN	NDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN	III – 166

			Halaman
	3.5.	AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2019	III – 169
		3.5.1. Pendapatan Daerah	III – 169
		3.5.2. Belanja Daerah	III – 171
		3.5.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	III – 173
	3.6.	PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SELAMA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 15 MARET 2020	III – 174
BAB IV	PENU	ITUP	IV – 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1.	Jumlah Penduduk Kota Jambi Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016, 2017 dan 2018	I – 7
1.2.	Jumlah Pencari Kerja Baru Dirinci menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2017	I – 8
1.3.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2015-2018	I – 16
1.4.	Inflasi Kota Jambi Tahun 2016 - 2018	I - 18
2.1.	Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2018- 2023 dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab	II – 6
2.2.	Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019	II - 26
2.3.	Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019	II – 36
2.4.	Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2018	II - 36
3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III - 2
3.2.	Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019	III - 3
3.3.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 1 (kesatu) Tahun 2019	III – 7
3.4.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 2 (Kedua) Tahun 2019	III – 29
3.5.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 3 (Ketiga) Tahun 2019	III – 31
3.6.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 4 (Keempat) Tahun 2019	III – 32
3.7.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 5 (Kelima) Tahun 2019	III – 35
3.8.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 6 (Keenam) Tahun 2019	III – 37
3.9.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 7 (Ketujuh) Tahun 2019	
		III - 49
3.10.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 8 (kedelapan) Tahun 2019	III – 74

		Halaman
3.11.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 9 (Kesembilan) Tahun 2019	III – 79
3.12.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 10 (Kesepuluh) Tahun 2019	III – 82
3.13.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 11 (Kesebelas) Tahun 2019	III – 84
3.14.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 12 (Keduabelas) Tahun 2019	III – 86
3.15.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 13 (Ketigabelas) Tahun 2019	
		III – 90
3.16	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	
	Untuk Sasaran 14 (Keempatbelas) Tahun 2019	
		III – 92
3.17.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	400
0.40	Untuk Sasaran 15 (Kelimabelas) Tahun 2019	III – 102
3.18.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	111 405
0.40	Untuk Sasaran 16 (Keenambelas) Tahun 2019	III – 105
3.19.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	111 107
2.20	Untuk Sasaran 17 (ketujuhbelas) Tahun 2019	III – 107
3.20.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	111 122
3.21.	Untuk Sasaran 18 (kedelapanbelas) Tahun 2019	III – 122
3.21.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran 19 (kesembilanbelas) Tahun 2019	III 121
3.22.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	III – 131
3.22.	Untuk Sasaran 20 (keduapuluh) Tahun 2019	III – 134
3.23.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	111 - 154
0.20.	Untuk Sasaran 21 (keduapuluhsatu) Tahun 2019	III – 136
3.24.	Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	111 100
0.21.	Untuk Sasaran 22 (keduapuluhdua) Tahun 2019	III – 137
3.25.	Perbandingan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran	
	dan Indikator Kinerja Utama Periode Tahun 2013 – 2018	
	dengan Periode Tahun 2018 -2023	III – 146
3.26.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 1 (Kesatu)	III – 146
3.27.		
	Sasaran Ke 2 (Kedua)	III – 148
3.28.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 3 (Ketiga)	III – 149
3.29.		
	Sasaran Ke 4 (Keempat)	III – 149

		Halaman
3.30.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 5 (Kelima)	III – 150
3.31.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 6 (Keenam)	III – 151
3.32.	Sasaran Ke 6 (Keenam)	
	Sasaran Ke 7 (Ketujuh)	III – 152
3.33.		
	Sasaran Ke 8 (Kedelapan)	III – 154
3.34.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 9 (Kesembilan)	III – 154
3.35.	Sasaran Ke 9 (Kesembilan)	
	Sasaran Ke 10 (Kesepuluh)	III – 155
3.36.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 11 (Kesebelas)	III – 155
3.37.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 12 (Keduabelas)	III – 156
3.38.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 13 (Ketigabelas)	III – 156
3.39.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 14 (Keempatbelas)	III – 157
3.40.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 15 (Kelimabelas)	III – 159
3.41.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 16 (Keenambelas)	III – 159
3.42.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 17 (Ketujuhbelas)	III – 161
3.43.	•	
	Sasaran Ke 18 (Kedelapanbelas)	III – 162
3.44.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 19 (Kesembilanbelas)	III – 163
3.45.		
	Sasaran Ke 20 (Keduapuluh)	III – 164
3.46.	Target Dan Realisasi IKU Tahun 2018 Dan 2019	
	Sasaran Ke 21 (Keduapuluhsatu)	III – 165
3.47.		
	Sasaran Ke 22 (Keduapuluhdua)	III – 165
3.48.	Alokasi APBD Per Prioritas Pembangunan Tahun 2018	
	sampai dengan 2019	III – 168
3.49.	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Jambi	
	Tahun Anggaran 2019	III – 170
3.50.	Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019	III – 173
3.51.	Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019	III - 174



PEMERINTAH KOTA JAMBI INSPEKTORAT

Jln. Kapten A. Zaidi Saleh – Kota Baru Tel. (0741) 41239

J A M B I - 36128

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Jambi untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa koreksi atas penyajian Laporan Kinerja yang belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti oleh Unit Penyusun Laporan Kinerja. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

INSPEKTORA

Jambi, 14 April 2020

INSPEKTUR KOTA JAMBI

Drs. H. HAFNI ILYAS

Pembina Utama Muda NIP. 19601110 198903 1 001

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
1.1.	Peta Wilayah Kota Jambi	I – 6
1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2016 – 2018	I – 16
1.3.	Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2018 Berdasarkan <i>harga konstan</i> Tahun 2016-2018	I – 18
1.4.	Inflasi Kota Jambi Tahun 2016 – 2018	I – 19
3.1.	Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019	III – 6
3.2.	Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2018 – 2023 dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025	III – 144
3.3.	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Periode Tahun 2013 -	
	2018 dengan Periode Tahun 2018 -2023	III – 145

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab 1 Berisi :

- 1. Latar Belakang
- 2. Maksud dan Tujuan
- 3. Gambaran Umum Daerah
- 4. Permasalahan Pembangunan
- 5. Dasar Hukum
- 6. Sistematika Penyusunan LKj 2019

1.1. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat dari setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama masyarakat, penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah di masa mendatang dan juga merupakan wadah atau laporan kinerja instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja disajikan dengan menguraikan capaian kinerja sasaran dengan melakukan perbandingan antara indikator kinerja pada target sasaran dengan realisasinya. Dengan pembandingan ini dapat dilihat sejauh mana Pemerintah Kota Jambi dapat mewujudkan sasaran strategi

yang telah ditetapkan serta dapat memperlihatkan manfaat yang telah diberikan organisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Selain itu, LKj juga melakukan evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dengan evaluasi internal ini diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan kinerja di masa depan. Kinerja merupakan gambaran mengenai seberapa jauh keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Pemda Kota Jambi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemda Kota Jambi. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses

evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.3.1. Kondisi Geografis Daerah

Kota Jambi merupakan ibukota Provinsi Jambi yang lebih dikenal dengan sebutan "Tanah Pilih Pesako Betuah". Wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi baik dari arah Utara, Selatan, Barat, maupun Timur.

• Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Sekernan Kabupaten

Muaro Jambi

• Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Mestong Kabupaten

Muaro Jambi

• Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota

Kabupaten Muaro Jambi

• Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten

Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, Luas Kota Jambi 17.552,71 Ha. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Jambi dengan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, Luas indikatif Kota Jambi adalah 169.88,67 Km² yang terdiri dari:

a) Kecamatan Kotabaru = $29,937 \text{ Km}^2$ (17,62%)

b) Kecamatan Alam Barajo = $36,909 \text{ Km}^2$ (21,73%)

c) Kecamatan Jambi Selatan = $12,267 \text{ Km}^2$ (7,22%)

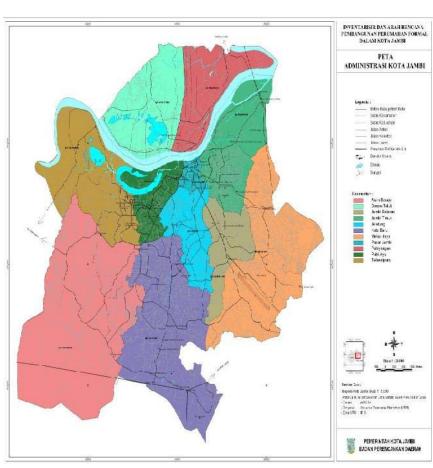
d)	Kecamatan Paal Merah	$= 19,571 \text{ Km}^2$	(11,52%)
e)	Kecamatan Jelutung	$= 7,617 \text{ Km}^2$	(4,48%)
f)	Kecamatan Pasar Jambi	$= 1,670 \text{ Km}^2$	(0,98%)
g)	Kecamatan Telanaipura	$= 16,822 \text{ Km}^2$	(9,90%)
h)	Kecamatan Danau Sipin	$= 7,278 \text{ Km}^2$	(4,28%)
i)	Kecamatan Danau Teluk	$= 13,444 \text{ Km}^2$	(7,91%)
j)	Kecamatan Pelayangan	$= 10,689 \text{ Km}^2$	(6,29%)
k)	Kecamatan Jambi Timur	$= 13,684 \text{ Km}^2$	(8,05%)

Perubahan luasan diatas menjadi salah satu dasar Pemerintah Kota Jambi untuk merevisi Perda Nomor 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi diatas. Secara geografi wilayah Kota Jambi terletak di antara 103°31′27,19″ BT sampai 103°40′51,80″ BT dan 01°32′48″ LS sampai 01°41′46,07″ LS. Berdasarkan data DEM Nasional, wilayah Kota Jambi memiliki ketinggian sengan kisaran 5 – 60 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kecamatan, sebagian besar wilayah Kecamatan Pasar Jambi, Danau Sipin, Pelayangan dn Danau Teluk berada pada ketinggian 0 -10 meter dari permukaan laut, sedangkan wilayah Kecamatan Telanaipura, Jambi Selatan, Jambi Timur, Paal Merah, Alam Barajo dan Kotabaru sebagian besar berada pada ketinggian 10 – 40 meter dari permukaan laut. Secara umum kondisi topografi Kota Jambi disajikan sebagai berikut:

<u>Topografi</u>	Kemiringan	Persentase(%)
Datar	0-8	61,529%
Landai	8-15	28,570%
Agak curam	15-25	8,599%
Curam	25-45	1,302%

Dari sisi iklim, Kota Jambi termasuk beriklim tropis. Musim hujan jatuh pada bulan Oktober sampai April (dipengaruhi oleh Musim Timur Selatan) dan musim kemarau pada bulan April sampai Oktober (dipengaruhi oleh Musim Barat). Keadaan iklim rata-rata Kota Jambi dalam kurun waktu tahun

2019 terlihat cukup berfluktuasi. Suhu rata-rata terendah berkisar 26,5 °C sampai 27,2 °C dengan suhu maksimum 34,4 °C yang terjadi pada bulan Januari dan suhu minimum 21,5 °C terjadi pada bulan Februari dan Juni. Curah hujan tahun 2018 beragam antara berkisar 55 mm/tahun dan tertinggi berkisar 298 mm/tahun dengan jumlah hari hujan antara 15 hari sampai 25 hari perbulannya. Sedangkan kecepatan angin tiap bulannya hampir merata antara 3 knots hingga 8 knots dan kelembaban udara berkisar 82%-88%.



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Jambi

Sumber: BPS Kota Jambi 2019.

1.3.2. Gambaran Umum Demografi

Penduduk Kota Jambi adalah heterogen, jumlah penduduk Kota Jambi berdasarkan hasil Registrasi Penduduk 2018 penduduk Kota Jambi tercatat 599.103 jiwa. Dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 2018 maka kepadatan per Km² menurut Kecamatan adalah:

a) Kecamatan Kotabaru = 2.131 jiwa/Km²
 b) Kecamatan Alam Barajo = 2.386 jiwa/Km²
 c) Kecamatan Jambi Selatan = 4.464 jiwa/Km²
 d) Kecamatan Paal Merah = 3.341 jiwa/Km²
 e) Kecamatan Jelutung = 8.055 jiwa/Km²

f) Kecamatan Pasar Jambi = 3.109 jiwa/Km²
g) Kecamatan Telanaipura = 2.264 jiwa/Km²
h) Kecamatan Danau Sipin = 6.179 jiwa/Km²
i) Kecamatan Danau Teluk = 772 jiwa/Km²
j) Kecamatan Pelayangan = 896 jiwa/Km²
k) Kecamatan Jambi Timur = 4.255 jiwa/Km²

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan *(sex ratio:*

101). Jumlah penduduk Kota Jambi menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel.1.1

Jumlah Penduduk Kota Jambi

Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016, 2017 dan 2018

NO	DEALE LIE	JUMLAH			
	PENDUDUK	2016	2017	2018	
1	Laki-Laki	293.217	297.036	300.775	
2	Perempuan	290.270	294.098	297.537	
Jumlah		583.487	591.134	598.103	
Sex Ratio		101,01	101,00	101,02	

Sumber : Diolah dari Kota Jambi Dalam Angka 2016, 2017 dan 2018

Tingkat kepadatan penduduk Kota Jambi secara rata-rata berdasarkan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah Kota Jambi masih tergolong jarang. Namun tingkat kepadatan penduduk untuk kawasan perkotaan sudah tergolong cukup padat. Pada Tahun 2018 Tingkat kepadatan penduduk rata-rata Kota Jambi adalah 2.912 jiwa/km².

Dari aspek ketenagakerjaan, persentase pekerjaan penduduk Kota Jambi yang berusia diatas 15 tahun adalah:

1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	3,29%
2	Industri Pengolahan	7,09%
3	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan& Hotel	37,07%
4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan Community, Social, and Personal Services	30,37%
5	Lainnya (<i>pertambangan&penggalian, listrik, gas&air, bangunan, angkutan, pergudangan&komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan</i>)	

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2019

Jumlah pencari kerja terdaftar sepanjang tahun 2018 mencapai 5.102 orang, tabel berikut adalah rincian pencari kerja terdaftar menurut jenis kelamin di Kota Jambi.

Tabel 1.2.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar

Dirinci menurut Jenis Kelamin Tahun 2017

NO	Bulan	Pencari Kerja Terdaftar		Penempatan Tenaga Kerja		Persentase
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Januari	223	162	80	74	40,00
2	Februari	211	133	82	56	40,12
3	Maret	348	181	120	96	40,83
4	April	161	79	56	47	42,92
5	Mei	183	126	87	61	47,90
6	Juni	264	211	115	83	41,8
7	Juli	441	424	153	233	44,62
8	Agustus	203	126	90	41	39,82
9	September	516	214	170	122	40,00
10	Oktober	213	185	98	62	40,20
11	Nopember	131	50	50	30	44,20
12	Desember	147	170	70	80	47,32
	JUMLAH	3.041	2.061	1.171	985	42,26

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka 2019

1.3.3. Kelembagaan Pemerintah

1.3.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Jambi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Jambi memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bidang pemerintahan meliputi :

- 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- 5. Penanganan bidang kesehatan;
- Penyelenggaraan pendidikan;
- 7. Penanggulangan masalah sosial;
- 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- 9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- 10. Pengendalian lingkungan hidup;
- 11. Pelayanan pertanahan;
- 12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
- 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- 14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- 16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan;

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Walikota Jambi dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Selain itu, prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat dan pengembangan peran serta fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperluas. Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melalui pertanggungjawaban Walikota Jambi kepada DPRD.

1.3.3.2. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sampai saat ini Pemerintah Kota Jambi telah membentuk Struktur Organisasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi dimaksud di atas, jumlah organisasi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) Sekretariat, 14 (empat belas) Lembaga Teknis Daerah, 15 (lima belas) Dinas, 11 (sebelas) Kecamatan dan 62 (enam puluh dua) Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

a. Sekretariat

- 1. Sekretariat Daerah
- 2. Sekretariat DPRD

b. Inspektorat

c. Dinas Daerah

- 1. Dinas Pendidikan
- 2. Dinas Kesehatan
- 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5. Dinas Sosial
- 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
- 8. Dinas Lingkungan Hidup
- 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10. Dinas Perhubungan
- 11. Dinas Komunikasi dan Informatika
- 12. Dinas tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- 13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 14. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 15. Dinas Pemuda dan Olah Raga
- 16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 18. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- 19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 20. Satuan Polisi Pamong Praja

d. Badan Daerah

- 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
- 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- 4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Kecamatan

- 1. Kecamatan Pasar
- 2. Kecamatan Telanaipura
- 3. Kecamatan Jambi Timur
- 4. Kecamatan Jambi Selatan
- 5. Kecamatan Jelutung
- 6. Kecamatan Kota Baru

- 7. Kecamatan Danau Teluk
- 8. Kecamatan Pelayangan
- 9. Kecamatan Danau Sipin
- 10. Kecamatan Paal Merah
- 11. Kecamatan Alam Barajo

f. Kelurahan

1. <u>Kecamatan Pasar</u>

- a. Kelurahan Pasar
- b. Kelurahan Orang Kayo Hitam
- c. Kelurahan Beringin
- d. Kelurahan Sungai Asam

2. Kecamatan Telanaipura

- a. Kelurahan Telanaipura
- b. Kelurahan Simpang IV Sipin
- c. Kelurahan Teluk Kenali
- d. Kelurahan Buluran Kenali
- e. Kelurahan Penyengat Rendah f.

Kelurahan Pematang Sulur

3. Kecamatan Jambi Timur

- a. Kelurahan Tanjung Sari
- b. Kelurahan Tanjung Pinang
- c. Kelurahan Rajawali
- d. Kelurahan Talang Banjar
- e. Kelurahan Sijenjang
- f. Kelurahan Budiman
- g. Kelurahan Kasang
- h. Kelurahan Sulanjana
- i. Kelurahan Kasang Jaya

4. Kecamatan Jambi Selatan

- a. Kelurahan The Hok
- b. Kelurahan Pasir Putih
- c. Kelurahan Pakuan Baru
- d. Kelurahan Tambak Sari
- e. Kelurahan Wijayapura

5. <u>Kecamatan Jelutung</u>

- a. Kelurahan Jelutung
- b. Kelurahan Payo Lebar
- c. Kelurahan Lebak Bandung
- d. Kelurahan Kebun Handil
- e. Kelurahan Talang Jauh
- f. Kelurahan Cempaka Putih
- g. Kelurahan Handil Jaya

6. Kecamatan Kota Baru

- a. Kelurahan Paal Lima
- b. Kelurahan Suka Karya
- c. Kelurahan Kenali Asam Atas
- d. Kelurahan Kenali Asam Bawah
- e. Kelurahan Simpang III Sipin

7. <u>Kecamatan Danau Teluk</u>

- a. Kelurahan Olak Kemang
- b. Kelurahan Ulu Gedong
- c. Kelurahan Pasir Panjang
- d. Kelurahan Tanjung Raden
- e. Kelurahan Tanjung Pasir

8. <u>Kecamatan Pelayangan</u>

a. Kelurahan Tengah

- b. Kelurahan Jelmu
- c. Kelurahan Arab Melayu
- d. Kelurahan Mudung Laut
- e. Kelurahan Tahtul Yaman
- f. Kelurahan Tanjung Johor
- 9. Kecamatan Paal Merah
 - a. Kelurahan Eka Jaya
 - b. Kelurahan Lingkar Selatan
 - c. Kelurahan Paal Merah
 - d. Kelurahan Talang Bakung
 - e. Kelurahan Payo Silincah
- 10. Kecamatan Alam Barajo
 - a. Kelurahan Bagan Pete
 - b. Kelurahan Beliung
 - c. Kelurahan Kenali Besar
 - d. Kelurahan Mayang Mangurai
 - e. Kelurahan Rawasari
- 11. Kecamatan Danau Sipin
 - a. Kelurahan Legok
 - b. Kelurahan Murni
 - c. Kelurahan Selamat
 - d. Kelurahan Solok Sipin
 - e. Kelurahan Sungai Putri

Kelembagaan pemerintah daerah tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

1.3.4. Kondisi Ekonomi Daerah

1.3.4.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi tahun 2018 mencapai 5,48 persen sedangkan tahun 2017 mencapai 4,68 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 30,75 persen, untuk kategori ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar

30,24 persen (2017). Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada sektor pengadaan listrik dan gas yang mengalami pertumbuhan tetap sebesar 0,21 persen.

Jika ditinjau menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan PDRB Kota Jambi Tahun 2018 didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 8.896.456,54, Transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 3.625.367,87, Industri pengolahan sebesar Rp.2.998.229,47, Bangunan sebesar Rp. 2.554.035,85, Jasa administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp. 2.503.890,96, Jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp. 1.582.389,69, Informasi dan komunikasi sebesar Rp. 1.333.277,71, Jasa pendidikan sebesar 1.288.997,79, Jasa perusahaan sebesar Rp. 860.369,7, Real estate sebesar Rp. 715.290,4, Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar Rp. 682.667,19, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar Rp. 635.721,48, Pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 580.545,16, Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 340.031,48, Jasa lainnya sebesar Rp. 199.918,84, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar Rp. 71.414,78, Pengadaan listrik dan gas sebesar Rp. 61.123,55.

7 6 5 4 3 2 1 15 16 17 18 LPE 5,56 6,81 4,68 5,28

Gambar 1.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi Tahun 2016-2018

Sumber: BPS Kota Jambi Tahun 2019

Tabel berikut mengambarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi menurut lapangan Usaha Tahun 2015-2017 berdasarkan harga konstan.

Tabel 1.3.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi
(Atas Dasar Harga Konstan) Tahun 2015-2018

NO	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
1.	Pertanian, Kehutanan	183.855,40	187.682,2	194.162,7
	& Perikanan			
2.	Pertambangan dan	509.005,0	418.285,0	432.125,5
	Penggalian			
3.	Industri	2.045.888,96	2.124.292,0	2.205.317,96
	Pengolahan			
4.	Pengadaan	31.179,23	31.726,2	33.645,42
	Listrik dan Gas			
5.	Pengadaan Air,	42.990,45	43.958,3	46.128,08
	Pengelolaan Sampah,			
	Limbah dan			
	Daur Ulang			
6.	Bangunan	1.578.659,80	1.703.565,8	1.809.482,75
7.	Perdagangan	4.544.458,55	4.784.479,7	5.120.193,44
	Besar dan			
	Eceran,			
	Reparasi Mobil dan			
	Sepeda Motor			

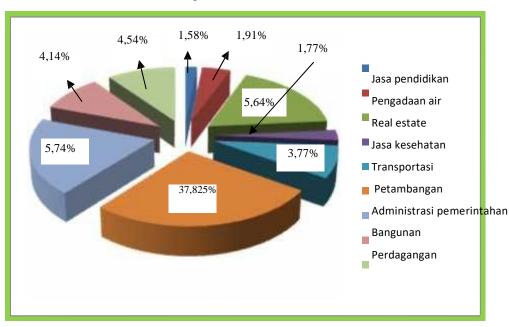
8.	Transportasi dan Pergudangan	2.242.842,84	2.398.293,7	2.516.596,96
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	379.073,77	415.165,6	447.018,75
10.	Informasi dan Komunikasi	843.486,09	900.356,3	974.847,84
11.	Jasa Perusahaan	476.179, 42	504.519,6	531.246,64
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.251.814, 37	1.282.749,4	1.341.765,85
13.	Jasa Pendidikan	771.534, 47	805.599,0	858.388,97
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	430.571, 09	457.497,0	486.044,97
15.	Jasa Lainnya	133.095, 94	139.239,0	148.782,67
	PDRB	16.936.442,1	17.728.338,8	18.699.511,01

Sumber: BPS Kota Jambi 2018.

1.3.4.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Kota Jambi pada kurun waktu 2016-2018 didominasi sektor Sekunder dan Tersier. Besarnya peranan masing-masing kategori ini terhadap pembentukan PDRB seri 2010 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018, kontribusi tertinggi diperoleh dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.896.456,54, Sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 3.625.367,87, Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.998.229,47, dan Sektor Bangunan sebesar Rp. 2.554.035,85.

Sedangkan 4 sektor yang memberikan kontribusi terendah berturutturut adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp. 61.123,55, Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 71.414,78, Sektor Jasa Lainnya sebesar Rp. 199.918,84 dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar Rp. 40.031,48.



Gambar 1.3 Struktur Perekonomian Kota Jambi Tahun 2018 Berdasarkan harga konstan Tahun 2016-2018

Sumber: BPS Kota Jambi 2018

1.3.4.3. Pendapatan Per kapita

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Jambi dapat dilihat melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Berdasarkan atas harga berlaku, PDRB perkapita Kota Jambi pada tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 41.900.000,- angka ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada 2017 sebesar tahun Rp.26.294.310,- dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 28.929.728,48,-

PDRB per Kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah Penduduk.

Untuk penghitungan PDRB perkapita atas dasar harga konstan pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp.17.005.778,- meningkat menjadi Rp.17.728.338,8,- pada tahun 2017 dan menjadi Rp.18.699.511,01 pada tahun 2018

1.3.4.4. Tingkat inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontiniu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling pengaruhsecara mempengaruhi.

Gambar 1.4 Inflasi Kota Jambi Tahun 2016 – 2018

URAIAN	2016	2017	2018
INFLASI	4,54	1,52	3,02

Sumber: BPS Kota Jambi 2018

Pada tahun 2016 Inflasi Kota Jambi berada diatas Inflasi Nasional, namun pada tahun 2017 dan tahun 2018 Inflasi Kota Jambi berada di bawah Inflasi Nasional yaitu untuk kota 3,02 persen dan Nasional 3,13 persen.

1.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi mendesak dilakukan penataan diri, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Barometer keberhasilan pembangunan di Provinsi Jambi dapat diukur sejauhmana perkembangan ibu kotanya. Untuk menjadikan Kota Jambi agar sejaja

dengan kota-kota lainnya di Indonesia perlu penanganan berbagai permasalahan diantaranya :

1.4.1. Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan dukungan penting untuk meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) dan daya saing suatu perekonomian. Permasalahan mendasar di bidang infrastruktur kota adalah :

- 1) Rendahnya kualitas lingkungan permukiman.
- 2) Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.
- 3) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air limbah.
- 4) Rendahnya aksesbilitas dan kapabilitas infrastruktur jalan.
- 5) Banyaknya titik genangan/banjir di Kota Jambi.
- 6) Belum terwujudnya harmonisasi ruang kota

1.4.2. Bidang Sosial Budaya

a. Pendidikan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang pendidikan di Kota Jambi yaitu belum optimalnya daya saing pendidikan, dimana Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Permasalahan pendidikan Kota Jambi adalah optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih rendahnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya prasarana dan sarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum meratanya penyebaran guru, masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru dan masih rendanhnya kualitas siswa.

b. Kesehatan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang kesehatan di Kota Jambi yaitu tingginya penduduk yang terpapar penyakit menular dan tidak menular, dimana secara umum derajat kesehatan masyarakat Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namum demikian masih beberapa permasalahan yang ditemukan perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain: masih tingginya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular, masih adanya angka kematian ibu dan anak, keterbatasan mutu tenaga kesehatan, serta penyebarannya yang kurang merata, pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, masih ditemukannnya balita gizi kurang serta baduta stanting. Penyelenggaraan kesehatan di Kota Jambi dikembangkan dengan mendorong promosi kesehatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan dan perorangan, optimalisasi sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Jambi khususnya keluarga kurang mampu, penerapan ISO pada fasilitas kesehatan, penyempurnaan sistem rujukan, optimalisasi kegawat daruratan, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana kesehatan.

d. Ketenagakerjaan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Ketenagakerjaan di KotaJambi yaitu rendahnya daya saing tenaga kerja, dimana meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung dalam lapangan kerja menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal ini secara umum disebabkan oleh beberapa hal seperti terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja dan rendahnya skill tenaga kerja, kondisi ini dapat menjadi beban bagi pemerintah Kota Jambi.

g. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Kependudukan dan KB di Kota Jambi antara lain :

- 1) Belum optimalnya peran serta perempuan di dalam pembangunan
- 2) Tingginya kasus kejahatan anak

h. Transportasi

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas, dimana dengan perkembangan yang terjadi khususnya di Kota Jambi salah satunya adalah perkembangan lalu lintas dan masalah yang harus benarbenar diperhatikan adalah pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh banyak hal seperti: pengemudi kendaraan yang buruk, bus besar atau kecil yang sembarangan parkir, ketidakteratur antara transportasi yang besar dan yang kecil atau tidak sesuai dengan luas jalan, pejalan kaki yang kurang hati-hati, jalanan yang tidak layak seperti jalan yang berlubang, kerusakan kendaraan, kendaraan yang sudah tidak layak lagi pakai, pengendara yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan masih banyak lagi yang menimbulkan masalah pelanggaran lalu lintas yang telah ditentukan pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dan Kepolisian.

i. Kesejahteraan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang transportasi di Kota Jambi yaitu tingginya angka penyandang PMKS, dimana sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Ditinjau dari aspek penyelenggaraan pemerintah

bahwasanya program dan kegiatan terutama pada PMKS belum optimal sehingga ini menjadi tugas dari pemerintah Kota Jambi untuk dapat menyusun langkah-langkah dan strategi dalam upaya menurunkan anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

1.4.3. Bidang Ekonomi

a. Keuangan Daerah

Permasalahan pokok yang dihadapi bidang keuangan daerah di Kota Jambi yaitu rendahnya kemandirian daerah terhadap dana perimbangan, dimana komponen pendapatan daerah terdiri dari 3 (tiga) komponen besar, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. APBD Kota Jambi beberapa tahun terkahir selalu berada di atas angka 1,6 Triliun. Dari total APBD Kota Jambi, sebagian besar masih didominasi oleh Dana Perimbangan, baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khsus (DAK). Jika dilihat dari proporsi secara persentase, Dana Perimbangan menempati perentase tertinggi diikuti oleh PAD dan Lainlain Pendapatan Daerah yang Sah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari seberapa besar daerah tersebut bisa membiayai APBD dari PAD. Beberapa tahun terakhir, rata-rata PAD Kota Jambi berkisar diantara angka 18%-26% dari total APBD Kota Jambi. Namun demikian, Pemerintah Kota Jambi selalu berkomitmen untuk meningkatkan PAD dari tahun ke tahun dengan mengupayakan intensifikasi maupun ekstensifikasi,bekerjasama dengan berbagai pihak dan memanfaatkan teknologi serta melakukan upaya lainnya melaluipendirian BUMD untuk menambah sumber pendapatan lainnya.

b. Industri dan Perdagangan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Industri dan Perdagangan di Kota Jambi antara lain :

- 1) Lemahnya tata niaga perdagangan
- 2) Belum optimalnya pengendalian ketersediaan dan distribusi pangan

1.4.4. Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kota Jambi antara lain :

- 1) Rendahnya rasio RTH publik
- 2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan sampah
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup

1.4.5. Bidang Pemerintahan

Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Pemerintahan atau Birokrasi di Kota Jambi yaitu belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah, dimana profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik.

Posisi IP ASN Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 68, yang berarti berada pada kategori 'Rendah'. Rendahnya profesionalitas ASN ini secara umum disebabkan oleh belum optimalnya dimensi kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki ASN. Upaya Pemerintah Kota Jambi untuk meningkatkan indeks tersebut adalah meningkatkan kualifikasi ASN (pendidikan formal/tugas belajar bagi ASN) dan kompetensi (kompetensi tekhnis, manajerial maupun sosial cultural.

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis masalah, sinergitas antar masalah, serta dalam rangka lebih terfokusnya intervensi program pembangunan maka dirumuskanlah isu-isu strategis menjadi 7 (tujuh) kelompok, sebai berikut:

- 1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
- 2. Penanggulangan kemiskinan
- 3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
- 4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
- 5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
- 6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
- 7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Dengan 4 (empat) Prioritas Pembangunan Kota Jambi, sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
- 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 3. Penanggulangan Kemiskinan
- 4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Kota Jambi berlandaskan kepada :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan (NR) nomor 4421)
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 209).

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinnerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2019

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kota Jambi selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2019 tersebut, diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

Ikhtisar eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LATAR BELAKANG MAKSUD DAN
- 1.2. TUJUAN GAMBARAN UMUM
- 1.3. DAERAH PERMASALAHAN
- 1.4. PEMBANGUNAN DASAR HUKUM
- 1.5. PENYUSUNAN
- 1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJ 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI
- 2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

- 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019
- 3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA
- 3.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 DAN 2019
- 3.5. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019
- 3.6. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SAMPAI DENGAN 15 MARET 2020

BAB IV PENUTUP

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Bab 2 Berisi:

- 1. Rencana Strategis Pemerintah Kota Jambi
- 2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019

2.1. RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KOTA JAMBI

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kota Jambi Tahun 2019 didasarkan kepada RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023 sebagai dokumen

perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolak ukur pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023. RPJMD adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan daerah berdasarkan tolok ukur kinerja. Sesuai amanat masyarakat di era reformasi, maka RPJMD yang disusun oleh Pemerintah Daerah ini harus dapat menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat kota. Hal yang lebih penting lagi, RPJMD ini harus dapat diimplementasikan dan akhirnya diakuntabilitaskan. Untuk melihat implementasinya, unit kerja Pemda harus menjabarkannya dalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan Renstra unit kerja tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dari unit kerja masing-masing sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1.1. Visi dan Misi

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah terpilih peroide 2018-2023, RPJMD menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian tersebut akan menguraikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2018-2023 yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018-2023.

Visi dan misi Pemerintah Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

VISI:

MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA

Pusat Perdagangan dan : Berarti pemusatan/konsentrasi distribusi

Jasa

barang dan jasa skala pelayanan lokal dan regional yang didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian

moda

Berbasis Masyarakat : Community Based merupakan suatu upaya

pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk

menerima perubahan.

Berakhlak : Berarti seluruh perilaku masyarakat Kota

Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun

yang menerima pelayanan

Berbudaya : Memiliki etika moral, nilai kebaikan,

kebenaran, keadilan dan tanggung jawab

agar bermakna bagi pembangunan

Pelayanan Prima : Upaya memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara tepat, cepat dan

mudah

MISI:

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pemerintah Kota Jambi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis
 Teknologi Informasi;
- 2) Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
- 3) Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
- 4) Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
- 5) Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

2.1.2. Prioritas Pembangunan

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2018–2023, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan Daerah Kota Jambi yaitu:

- (1) Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan
- (2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- (3) Penanggulangan kemiskinan
- (4) Pengembangan pariwisata dan promosi daerah

2.1.3. Sasaran

Pemerintah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019 dalam mencapai 4 (empat) Prioritas Pembangunan memformulasikan 22 sasaran utama yang akan dicapai dengan uraian sebagai berikut :

Prioritas 1

PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN

- 1. Meningkatkan layanan infrastruktur dan Utilitas perkotaan
- 2. Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prioritas 2

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- 3. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK
- 4. Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL
- 5. meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan
- 6. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat
- 7. Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan
- 8. Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan
- 9. Meningkatkan Kesetaraan Gender
- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
- 11. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan

Prioritas 3

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- 13. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan
- 14. Meningkatnya Ketahanan Pangan
- 15. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja
- 16. Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil
- 17. Meningkatkan Derajat Kesehatan
- 18. Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk
- 19. Menurunkan angka PMKS

Prioritas 4

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH

- 20. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
- 21. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 22. Meningkatkan Realisasi Investasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan adanya indikator kinerja daerah dalam sebuah proses pengukuran kinerja dimana pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu penggunaan sumber daya seperti anggaran sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan dimasa yang akan datang. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi selama periode 2018 – 2023 serta SKPD pelaksana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 – 2023
dan Perangkat Daerah Penanggung Jawab

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah
2.	Indeks Profesinalitas ASN	 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
3.	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
4.	Indeks survey persepsi Korupsi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	Satpol PP
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

10.	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	 Dinas Perhubungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11.	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15.	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
16.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
18.	Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
21.	Persentase Daya Saing Produk IKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22.	Persentase koperasi berkualitas	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Dinas Pendidikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	Dinas Pendidikan
26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Dinas Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
27.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
28.	Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
29.	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
30.	Indeks Pemberdayaan Gender	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
31.	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
33.	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas Pemuda dan Olah Raga
34.	Persentase PMKS yang tertangani	Dinas Sosial

2.1.4. Strategi, Arah Kebijakan Daerah, Program dan Indikator Kinerja Dalam RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pula indikator sebagai tolak ukur kinerja.

2.1.4.1. Strategi

Permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran serta

program pembangunan yang juga harus bersifat lintas koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perencanaan yang dapat memecahkan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Strategi adalah langkahlangkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup (a) mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan), (b) Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan permasalahan pembangunan terpenting dan serta isu-isu strategis pembangunan daerah, (c) Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya, dan (d) Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi selama periode 2018 - 2023 dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK
- 2. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur
- 3. Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah
- 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dari KKN
- 5. Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK
- 6. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah
- 7. Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran

- 8. Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa
- 9. Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol
- 10. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan perkotaan
- 11. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang berkelanjutan
- 12. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan
- 13. Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap
- 14. Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi
- 15. Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan
- 16. Peningkatan harmonisasi ruang kota
- 17. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan
- 18. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan
- 19. Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan
- 20. Meningkatkan Ketahanan Pangan
- 21. Penguatan daya saing kepariwisataan
- 22. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 23. Peningkatan Iklim Investasi
- 24. Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha
- 25. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
- 26. Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan
- 27. Mendorong Terciptanya Produktivitas IKM

- 28. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare)
- 29. Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
- 30. Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar
- 31. Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran
- 32. Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang Berkualitas
- 33. Peningkatan Pengarusutamaan Gender
- 34. Peningkatan pemenuhan hak anak
- 35. Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
- 36. Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan
- 37. Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS
- 2.1.4.2. Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan strategi kebijakan sebagaimana tertera di atas, maka dirumuskanlah kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Jambi periode 2018–2023 yang memuat 5 misi, 6 tujuan, dan 22 sasaran. Arah Kebijakan Pembangunan ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/ bidang/ sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Arah kebijakan dari sasaran dan strategi pada tujuan misi, sebagai berikut:

Misi 1: Penguatan birokrasi dan Meningkatkan pelayanan

masyarakat berbasis teknologi informasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkat nya Kinerja Penyelengga raan Pemerintah an dan Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	 Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur Peningkatan transparansi kinerja instansi pemerintah Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintah yang bersih dari KKN Menyelenggara kan Pelayanan Publik Berbasis TIK 	 Meningkat kan ketatalaksa naan pemerintah an yang berbasis TIK Meningkat kan kompetensi dan integritas ASN Meningkat kan Akuntabilitas kinerja keuangan daerah Meningkat kan kualitas perencanaan dan kinerja pembangun an Meningkat kan kualitas perencanaan dan kinerja pembangun an kinerja pembangun an secara komprehensif , transparan dan akuntabel

 Meningkat kan Koordinasi, Fasilitasi dan kerjasama Penyelengga raan Pemerintah an
Meningkat kan cakupan pelayanan publik berbasis TIK
 Meningkat kan perlindungan , penyelamat an arsip dan sistem informasi kearsipan daerah

Misi 2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
2. Meningkat nya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	 Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL 	 Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah 	 Meningkat kan pengawasan dan pengendalian masyarakat terhadap kepatuhan perda

	3. Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	 Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran 	 Meningkat kan sistem manajemen logistik kebencanaan
3. Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	4. Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	 Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa 	 Meningkat kan karakter, ideologi dan wawasan kebangsaan serta peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
	5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	 Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol 	Meningkat kan pembinaan pemberdayaa n fasilitas orkemas dan parpol

Misi 3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
4. Terwujudnya	6. Meningkatkan	 Peningkatan 	 Meningkatkan
Aksesibilitas	cakupan layanan	sarana dan	akses
dan	infrastruktur dan	prasarana serta	masyarakat
Kapabilitas	ulitilitas kota	pengelolaan air	terhadap
Utilitas	yang terpadu dan	bersih, air	layanan air
Perkotaan	berkelanjutan	limbah dan	bersih, air
yang		bangunan	limbah dan

Berkelanjutan		 Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan Peningkatan harmonisasi ruang kota 	 Bangunan Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik Menurunkan jumlah titik genangan perkotaan Meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur Meningkatkan harmonisasi & konsistensi tata ruang
	7. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan lingkungan Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan lingkungan	 Mendorong partisipasi masyarakat untuk pengurangan tingkat pencemaran lingkungan Pengendalian dan pengawasan lingkungan Peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan binaan

Misi 4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
5. Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	8. Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagang an	 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan Meningkatkan manajemen pengelolaan perpasaran
	9. Meningkatnya Ketahanan Pangan	• Meningkatkan Ketahanan Pangan	 Pengendalian ketersediaan dan distribusi bahan pangan Meningkatkan keamanan konsumsi pangan masyarakat perkotaan
	10. Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan	 Meningkatkan kreatifitas seni budaya dan pengelolaan peninggalan budaya Meningkatkan fasilitasi penyelenggara an MICE (Meeting, Incentive,

14. Meningkatkan	 Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan Mendorong Terciptanya 	kompetensi dan produktivitas tenaga kerja • Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis • Meningkatkan
13. Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha Sincroitas	 Mendorong kewirausahaan untuk angkatan kerja produktif Meningkatkan kompetensi
12. Meningkatkan Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi	 Meningkatkan Kemudahan Perizinan dan Promosi Investasi
		 Mengoptimal kan pengelolaan penerimaan retribusi daerah
11. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	 Mengoptimal kan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah
		Convention, Exibition)

 Meningkatkan proteksi, pengembang an dan pemasaran produk lokal
 Meningkatkan koperasi berkualitas

.Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
6. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	15.Meningkatkan Derajat Kesehatan	 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang 	• Kartu Jambi Bugar
		Miskin yang Tepat Sasaran	
	16.Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	 Peningkatan akses mutu dan tata kelola pendidikan dasar 	 Meningkatkan sarana prasarana pendidikan Menekan angka putus sekolah

	 Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran 	 Kartu Jambi Cerdas Meningkatkan minat baca masyarakat perkotaan
17. Mengendalika angka Kelahir Penduduk		 Meningkatkan Akses Pelayanan Keluarga Berencana, Pembinaan Ketahanan dan Pembangunan Keluarga
18. Meningkatkan Kesetaraan Gender	Peningkatan Pengarus utamaan Gender	 Meningkatkan partisipasi dan perlindungan terhadap perempuan Meningkatkan akses perempuan terhadap sumberdaya pembangunan
19. Meningkatkar Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan pemenuhan hak anak	Meningkatkan pemenuhan hak anak
20. Meningkatkar partisipasi masyarakat dalam pembangunar	pembinaan, monev pemberdayaan	 Meningkatkan pembinaan dan monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

21. Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	 Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 	 Meningkatkan pembinaan olahraga dan pengembangan kepemudaan
22. Menurunkan angka PMKS	 Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS 	 Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan kepada PMKS Meningkatkan perlindungan sosial terhadap PMKS

2.1.5. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah di tetapakan dalam RPJMD, maka upaya pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut.

Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

	MISI	SASARAN	PROGRAM
1.	PENGUATAN BIROKRASI DAN MENINGKATKA N PELAYANAN MASYARAKAT BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	 Optimalisasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi Optimalisasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi

3. Pembinaan dan
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
4. Pemberdayaan
kecamatan dan
kelurahan
5. Peningkatan kerjasama
daerah
6. Penataan peraturan per
UU dan penyelesaian
perkara pemerintah
daerah
7. Peningkatan pelayanan
kedinasan kepala
daerah/wakil kepala
daerah, sekda, aparatur
dan keprotokolan
8. Peningkatan kualitas
dan pengelolaan
pelayanan publik
9. Peningkatan kualitas
dan pengelolaan
pelayanan publik
10.Pembinaan dan fasilitasi
bagi organisasi dan
kegiatan keagamaan
11.Peningkatan pelayanan
administrasi umum,
keuangan setda dan
kerumahtanggaan
12.Peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan
rakyat daerah
13.Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD
14.Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan
15.Pengelolaan,
penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
16.Pemberdayaan
Masyarakat
iviasyarakat II 21

			17 Damamas:
2.	PENGUATAN PENEGAKKAN HUKUM. TRANTIBMAS DAN KENYAMANAN MASYARAKAT	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	17.Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 18.Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah 19.Peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 20.Peningkatan tata kelola administrasi kependudukan 21.Tata kelola organisasi dan administrasi pembangunan 1. Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat 2. Pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum, serta penegakkan regulasi daerah 3. Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan 4. Pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol 5. Peningkatan keamanan dan kenyamanan
3	PENGUATAN PENGELOLAAN INFRASTRUK	Meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan	1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

TUR DAN UTILITAS PERKOTAAN SERTA	ulitilitas kota terpadu berkelanjutan	yang dan	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan,
SERTA PENATAAN LINGKUNGAN	Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan	dan	 3. Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan 4. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan 5. Perencanaan tata ruang 6. Pengendalian pemanfaatan ruang 7. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan 8. Pembangunan, pemeliharaan dan
			perluasan utilitas perkotaan 9. Peningkatan pengelolaan lingkungan, RTH, ruang publik dan
			keanekaragaman hayati 10. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan 11. Penurunan beban
			pencemaran 12. Pembangunan dan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
			13. Peningkatan pengelolaan dan keselamatan perhubungan
			14. Peningkatan mutu dan perluasan kapasitas pelayanan perparkiran

4	PENGUATAN KAPASITAS EKONOMI PERKOTAAN	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan		Pembinaan , pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdagangan Peningkatan pelayanan
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	3.	pengelolaan perpasaran Pengembangan sistem pendukung usaha bagi
		Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB		usaha mikro kecil menengah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan kualitas,
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.	perlindungan dan produktivitas tenaga kerja Peningkatan produksi,
		Meningkatkan Realisasi Investasi		mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan
		Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja		dan perikanan Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani Pembinaan,
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil		peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
5	PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN	Meningkatkan Derajat Kesehatan	1.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
	MASYARAKAT PERKOTAAN	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas	2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Pendidikan	3. Peningkatan akses,
Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	mutu dan tata kelola pendidikan 4. Penanggulangan kemiskinan dan
Meningkatkan Kesetaraan Gender	pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 5. Pemberdayaan masyarakat
Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	 6. Peningkatan kesejahteraan gender dan perempuan dan perlindungan anak 7. Keluarga berencana dan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	keluarga sejahtera 8. Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan
Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	kepemudaan
Menurunkan angka PMKS	

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibawasi pada kinerja yang

dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Uraian dan rincian mengenai sasaran berdasarkan prioritas pembangunan, indikator kinerja utama dan target yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Jambi tahun 2019 yang telah ditetapkan sebagai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Jambi tahun 2019 dapat dijelaskan pada tabel 2.2. dibawah ini.

Tabel 2.2.
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019

NO	SASARAN	STRATEGI	INL		KINERJA	SATUAN	TARGET
			UTAMA				2019
1	2	3		4		5	6
	MISI 1:	PENGUATAN BI	ENINGK				
		PELAYANAN MAS INFORMASI	SYAF	RAKAT	BERBAS	IS IEKN	IOLOGI
1.	 Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK Pengembangan infrastruktur dan aplikasi TIK Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur 	infrastruktur dan aplikasi TIK	1.	Indeks Pemerii Berbasi Elektroi (SPBE)	ntahan is nik	Indeks	2,44
		2.	ASN	onalitas	Indeks	68,00	
		aparata.	3.	Nilai SA	AKIP	Nilai	В
		 Peningkatan transparansi 	4.	Indeks perseps	survey si korupsi	Indeks	3,65
		kinerja instansi pemerintah	5.	Indeks Masyar	Kepuasan akat	%	85,50
		 Meningkatkan Penyelenggara an Pemerintah yang bersih dari KKN 					
		 Menyelenggarakan Pelayanan Publik Berbasis TIK 					

	MISI 2 :	PENGUATAN PENE KENYAMANAN MASYAI		•	RANTIBMAS	S DAN
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan regulasi daerah	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	%	82,00
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Peningkatan manajemen logistik dan pelayanan kebakaran	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	%	100,00
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Membangun dan memfasilitasi masyarakat dalam kerangka Konesus dasar bangsa	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	%	20,00
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	 Membina, memberdayakan memfasilitas orkemas dan parpol 	9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	%	20,00
	MISI 3:	PENGUATAN PENGEL PERKOTAAN SERTA PE			R DAN	UTILITAS
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	 Peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan air bersih, air limbah dan bangunan Peningkatan infrastruktur jalan yang mantap 	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	%	53,07

		 Peningkatan sistem jaringan drainase dan perlindungan retensi Peningkatan sinergisitas penanganan titik genangan Peningkatan harmonisasi ruang kota 				
7.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan	Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan	11	Indeks kualitas air	Indeks	43,23
	utilitas perkotaan Meningkatkan	lingkungan	12	Indeks kualitas udara	Indeks	91,30
	perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		13	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	61,00
	MISI 4:	PENGUATAN KAPASITA		ONOMI PERKOTAAN		
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	 Penguatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagang an 	14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	%	36,00
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan	15.	Skor pola pangan harapan	%	90,50
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Penguatan daya saing kepariwisataan	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,37
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	 Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	8,00
12	Meningkatkan realisasi investasi	Peningkatan Iklim Investasi	18.	Realisasi investasi	Rupiah	430,5 M
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	 Peningkatan peluang kerja pada usia produktif serta perluasan lapangan usaha 	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,00

14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	 Sinergitas hubungan antar stakeholder ketenagakerjaan Mendorong Terciptanya Produktivit as IKM 	20. 21. 22.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas Persentase daya saing produk IKM Persentase koperasi berkualitas	% % %	8,08 4,30 16,06
	MISI 5 :	PENINGKATAN KUALIT	AS KI		KAT PERK	OTAAN
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat (universal healthcare) Peningkatan Akses Kesehatan Terhadap Miskin yang Tepat Sasaran 	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	72,35
16.	Meningkatkan kualitas dan	Peningkatan akses mutu dan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14,60
	aksesbilitas pendidikan	 tata kelola pendidikan dasar Peningkatan Akses Pendidikan Terhadap Miskin yang Tepat 	25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	%	21,32
		Sasaran	26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	10,68
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	Peningkatan Akses dan Pelayanan	27.	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05
		Keluarga Berencana yang Berkualitas	28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	96,23
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	 Peningkatan Akses dan Pelayanan Keluarga Berencana yang 	29.	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,90
		Berkualitas	30.	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,10

19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	 Peningkatan pemenuhan hak anak 	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	70,00
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Peningkatan pembinaan, monev pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	60,23
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	 Peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan 	33.	Indeks pembangunan pemuda	%	50,00
22.	Menurunkan angka PMKS	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan terhadap PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	%	65,00

No.	PROGRAM	APBD 2019				
INO.		SKPD	RUTIN	JUMLAH		
1	2	3	4	5		
1.	Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	119.412.846.698	9.048.575.800	128.461.422.498		
2.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	84.826.823.531	6.435.620.150	91.262.443.681		
3.	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	60.954.564.444	44.974.964.114	105.929.528.558		
4.	Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	142.325.736.400		142.325.736.400		
5.	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong- gorong	25.840.300.000		25.840.300.000		
6.	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	100.973.303.650		100.973.303.650		

İ	Daminalist	I	П	
7.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	4.250.501.000		4.250.501.000
8.	Perencanaan tata ruang	534.000.000		534.000.000
9.	Pengendalian pemanfaatan ruang	370.097.000	5.035.106.000	5.405.203.000
10.	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman berbasis kawasan	1.137.720.600	2.458.484.000	3.596.204.600
11.	Pembangunan, pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	28.258.245.000		28.258.245.000
12.	Pembinaan dan pemeliharaan perlindungan masyarakat	773.718.800	1.862.344.000	2.636.062.800
13.	Pemeliharaan dan penyelenggaraan tramtibum, serta penegakkan regulasi daerah	5.149.586.000		5.149.586.000
14.	Peningkatan kesiagaan dini dan manajemen logistik kebencanaan	6.010.645.000	2.696.365.000	8.707.010.000
15.	Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3.568.102.000	1.688.798.000	5.256.900.000
16.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	859.445.250	2.040.629.000	2.900.074.250
17.	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	609.120.250		609.120.250

r				
	Peningkatan			
	kualitas,			
18.	perlindungan dan			
	produktivitas	796.731.500		796.731.500
	tenaga kerja			
	Peningkatan			
	pengelolaan			
19.	lingkungan, RTH,	11.418.783.200	2.972.617.984	14.391.401.184
. , ,	ruang publik dan	11.110.700.200	2.772.017.701	11.671.161.161
	keanekaragaman			
	hayati			
	Pengendalian			
	kerusakan			
20.	lingkungan hidup	33.187.591.300		33.187.591.300
	dan pengelolaan			
	persampahan			
21.	Penurunan beban			
۷1.	pencemaran	2.027.579.666		2.027.579.666
	Peningkatan tata			
22.	kelola administrasi	2.550.648.000	3.861.596.000	6.412.244.000
	kependudukan			
00	Pemberdayaan	4.750.040.550	0.700 (00.000	7 472 (50 550
23.	masyarakat	4.750.049.550	2.723.609.000	7.473.658.550
	Peningkatan			
	kesejahteraan			
24.	gender dan			
۷٦.	perempuan dan	3.771.390.000		3.771.390.000
	perlindungan anak			
-	Keluarga			
25.	berencana dan	4.413.643.000	3.338.945.000	7.752.588.000
25.		4.413.043.000	3.330.943.000	7.752.588.000
	keluarga sejahtera			
	Pembangunan dan			
	dan pemeliharaan			
26.	sarana dan	4.462.030.000	4.658.831.000	9.120.861.000
	prasarana			
	perhubungan			
	Peningkatan			
27.	pengelolaan dan	5.343.890.000		5.343.890.000
21.	keselamatan	0.040.070.000		5.545.670.000
	perhubungan			
	Peningkatan mutu			
	dan perluasan	2.390.714.000		2.390.714.000
28.	kapasitas			
	pelayanan			
	perparkiran			
	Optimalisasi			
	penyebarluasan			
	informasi			
29.	penyelenggaraan	4.100.165.000	1.676.360.000	5.776.525.000
	pembangunan dan			
	pemanfaatan			
	teknologi informasi			

1			1	
30.	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	269.955.500	2.937.719.500	3.207.675.000
31.	Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik	785.760.000		785.760.000
32.	Pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan kepemudaan	5.477.557.500	2.275.252.500	7.752.810.000
33.	Pembinaan, peningkatan dan perluasan pengelolaan budaya dan pariwisata	2.385.687.000	1.785.388.000	4.171.075.000
34.	Peningkatan mutu dan pelayanan perpustakaan	1.269.916.500	2.055.225.100	3.325.141.600
35.	Pengelolaan, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	692.138.400		692.138.400
36.	Peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	6.610.142.000	3.353.004.000	9.963.146.000
37	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan petani	1.123.319.000		1.123.319.000
38	Pembinaan , pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdagangan	1.123.319.000		1.123.319.000
39.	Peningkatan pelayanan pengelolaan perpasaran	4.911.533.500		4.911.533.500

1	1			
40.	Peningkatan sistem pengawasan, pembinaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.582.480.000	2.810.820.000	5.393.300.000
41.	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	3.664.663.245	4.780.918.000	8.445.581.245
42.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah	2.922.041.150	8.512.515.142	11.434.556.292
43.	Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah	4.195.268.000	4.273.071.000	8.468.339.000
44.	Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4.963.584.000	2.905.232.500	7.868.816.500
45.	Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan	10.578.300.000	21.563.538.900	32.141.838.900
46.	Peningkatan kerjasama daerah	725.000.000		725.000.000
47.	Penataan peraturan per UU dan penyelesaian perkara pemerintah daerah	1.296.600.000		1.296.600.000
48.	Optimalisasi penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi	8.604.234.000		8.604.234.000

57.	dan fasilitasi bagi	255.885.000	1.445.406.000	1.701.291.000
56.	masyarakat Pembinaan, pemberdayaan,	61.492.071.045	17.334.570.555	78.826.641.600
55.	Peningkatan pelayanan kedinasan DPRD Pemberdayaan	1.725.980.500		1.725.980.500
54.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	34.175.647.000	14.120.720.500	48.296.367.500
53.	Peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan setda dan kerumahtanggaan	1.597.950.000		1.597.950.000
52.	Pembinaan dan fasilitasi bagi organisasi dan kegiatan keagamaan	9.041.613.750		9.041.613.750
51.	Tata kelola organisasi pemerintahan dan administrasi pembangunan	2.650.070.000		2.650.070.000
50.	Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik	1.324.230.000		1.324.230.000
49.	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekda, aparatur dan keprotokolan	5.433.200.000		5.433.200.000

2.2.2. Anggaran Tahun 2019

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan (pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.846.258.216.875,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3.
Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	806.303.727.641	43,67
2.	BELANJA LANGSUNG	1.039.954.489.234	56,33
	JUMLAH BELANJA	1.846.258.216.875	100

Sumber: APBD Kota Jambi 2019

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana tergambar dalam tabel 2.4.

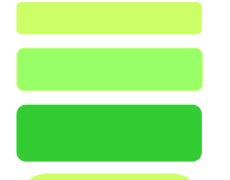
Tabel 2.4. Alokasi Per Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN	%
1	2		3	4	5
1.	1. Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja	1.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	14.380.759.000	0,78
pemerintah berbasis TIK	2.	Indeks profesionalitas ASN	113.468.877.150	6,15	
		3.	Nilai SAKIP	11.095.651.245	0,60

	T	ı	1		
		4.	Indeks survey persepsi korupsi	16.827.856.292	0,91
		5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.024.645.600	4,66
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERDA dan	6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	7.785.648.800	0,42
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	8.707.010.000	0,47
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideology pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan ideolo masyarakat	8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideology Pancasila	588.019.000	0,03
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	1.701.291.000	0,09
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	328.038.958.650	17,77
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11	Indeks kualitas air	2.027.579.666	0,11
	iiigkuiigaii Illuup	12	Indeks kualitas udara	14.391.401.184	0,78

		13	Indeks kualitas tutupan lahan	33.187.591.300	1,80
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	1.123.319.000	0,06
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Skor pola pangan harapan	11.086.465.000	0,60
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	4.171.075.000	0,23
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8.468.339.000	0,46
12	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	3.207.675.000	0,17
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	796.731.500	0,04
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	2.900.074.250	0,16
		21.	Persentase daya saing produk IKM	4.911.533.500	0,27
		22.	Persentase koperasi berkualitas	609.120.250	0,03
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	197.191.972.239	10,68
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	24.25.26.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	128.461.422.498	6,96

17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuhan penduduk Persentase jumlah keluarga sejahtera	7.752.588.000	0,42
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	29. 30.	Indeks pembangunan gender Indeks pemberdayaan gender	3.771.390.000	0,20
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi		
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	7.473.658.550	0,40
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	33.	Indeks pembangunan pemuda	7.752.810.000	0,42
22.	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	5.256.900.000	0,28
	JUM	1LAH		1.039.954.489.234	56,33



BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI

Bab 3 Berisi:

- 1. Capaian Indikator Kinerja Utama 2019
- 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- 3. Perbandingan Target Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2018
- 4. Pendanaan Per Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan Tahun 2019
- 5. Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Tahun 2019
- 6. Penghargaan yang Diraih Pemerintah Kota Jambi selama Tahun 2019

Dokumen perencanaan taktis strategis yang menjadi dasar tolok ukur pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah bagi Walikota dan Wakil Walikota terpilih peroide 2018-2023, disamping itu pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, bahwa pembangunan yang utama adalah pencapaian diorientasikan pada menuju lebih baik. Hal ini perubahan yang mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan sekedar melaksanakan hanya program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini dengan terus mendorong upaya pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KODE
1.	≥ 91	Sangat Tinggi	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Diolah.

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2019 disusun dalam bentuk laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk tahun 2019.

Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Pencapaian IKU Pemerintah Kota Jambi Tahun 2019

	INDUATOR	ANGKA	%		2019			
NO	NO INDIKATOR KINERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023	
1.	Indeks sistem pemrintahan berbasis elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,85	116,80	2,44	
2.	Indeks profesionalitas ASN	55	55	56	56,2	100,35	88,00	
3.	Nilai SAKIP	В	В	В	В	100,00	А	
4.	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	3,65	3,35	91,78	3,8	
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,28%	85,28%	85,5%	82,15%	96,08	88,5%	
6.	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	82,00%	82,00	82,00%	82,00	100,00	60,00%	
7.	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00	100,00%	
8.	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00	20,00%	

9.	Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00	20,00%
10.	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,59%	50,59%	53,07%	59,16%	111,47	85,79%
11.	Indeks kualitas air	32,11	32,11	37,75	38,27	101,37	43,38
12.	Indeks kualitas udara	80,68	80,60	80,7	76,84	95,21	91,45
13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	39,33	41,30	44,81	108,49	61,37
14.	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00%	20,00%	36,00%	63.34%	175,94	100,00%
15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	87,90%	90,59%	90,70%	100,12	92,5%
16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35%	2,35%	2,37%	2,38%	100,42	2,41%
17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	4,00%	8,00%	16,09%	201,13	9,00%
18.	Realisasi investasi	410 M	410 M	430,5 M	1.055 T	245,12	523,37 M
19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	64,96%	65,00%	65,79%	101,21	66,00%
20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	7,61%	8,08%	8,08%	100,00	10,00%
21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	4,30%	4,30%	19,30%	448,8	8,30%
22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	13,00%	16,06%	16,50%	102,73	36,70%
23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,34%	72,35%	73,20%	101,17	72,37%
24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	14,25%	14,60%	14,62%	100,13	14,64%
25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	21,32%	21,32%	21,30%	99,90	4,32%

26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68	10,68	10,68%	10,68%	100,00	10,72%
27.	Laju pertumbuhan penduduk	N/A	N/A	1,05%	1,05%	100,00	1,01%
28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	N/A	96,23%	96,04%	99,80	97,15%
29.	Indeks pembangunan gender	94,89	94,89	94,90	94,46	99,53	94,95
30.	Indeks pemberdayaan gender	68,07	68,07	68,10	69,83	102,54	68,50
31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	50,00%	70,00%	70,00%	100,00	100,00%
32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23%	60,23%	60,23%	70,96%	117,81	66,00%
33.	Indeks pembangunan pemuda	50,00	50,00%	50,00	-	-	52,00
34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	60,00%	65,00%	62,00%	95,38	85,00%

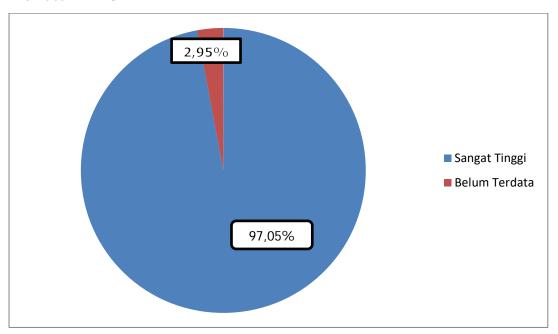
Catatan : - IKU nomor 4 belum dapat diisi karena penilaian merupakan output dari KemenPan RB.

- IKU nomor 33 belum dapat diisi karena angka merupakan output dari Bappenas.

Dari 34 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2018, **25** indikator menunjukkan capaian ≥ 91% atau lebih masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut.

Untuk sejumlah target IKU Pemerintah Kota Jambi yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 % pada tahun 2019, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan

sejumlah analisa yang mempengaruhi. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 33 indikator menunjukkan capaian **SANGAT TINGGI** dan **1** Indikator **BELUM TERDATA**.



Gambar 3.1 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2019

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Bagian sub-bab ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per prioritas pembangunan.

Dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Jambi dalam kurun waktu 2018-2023 telah merencanakan / menetapkan 4 Prioritas dengan 22 sasaran pembangunan dan 34 Indikator Kinerja Utama.

SASARAN 1 MENINGKATKAN PROFESIONALISME ASN DAN AKUNTABILITAS KINERJA BERBASIS TIK

Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Upaya mengukur profesionalitas ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

IP ASN ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi dalam rangka pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indikator pengukuran profesionalitas ASN meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: a) Kualifikasi 25%, b) Kompetensi 40%, c) Kinerja 30% dan d) Disiplin 5%.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 1 (pertama) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.3. berikut.

Tabel 3.3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 1 (kesatu) Tahun 2019

	SASARAN		NDIKATOR	ANGKA	%		TARGET AKHIR		
NO	STRATEGIS	<u>'</u>	KINERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	2,33	2,44	2,85	116,80	2,44
	pemerintah berbasis TIK	2	Indeks profesionalitas ASN	55	55	56	56,2	100,35	88,00
		3	Nilai SAKIP	В	В	В	В	100,00	Α
		4	Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	3,65	3,35	91,78	3,8
		5	Indeks Kepuasan Masyara kat	85,28%	85,28%	85,50%	82,15%	96,08	88,5%
	RATA-RATA % CAPAIAN				48,52%			101%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK ditetapkan 5 (lima) IKU dengan target yang berbeda. Dalam pelaksanaannya kelima IKU ini dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

IKU kesatu merupakan *leading sector* Dinas Komunikasi dan Informasi dan Sekretariat Daerah yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan target 2,44 terealisasi dengan indeks 2,85 (Baik) atau dengan capaian sebesar 116,80% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 dinilai berdasarkan evaluasi mandiri yang dilakukan oleh evaluator internal instansi pusat/pemerintah daerah dan evaluasi dokumen yang dilakukan oleh evaluator eksternal Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Adapun penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja penilaian yang dilakukan terdapat 3 domain, yaitu:

1. Domain kebijakan SPBE : 2,41

- Kebijakan tata kelola SPBE : 3,00

- Kebijakan layanan SPBE : 2,00

2. Domain Tata Kelola : 3,00

- Kelembagaan : 2,5

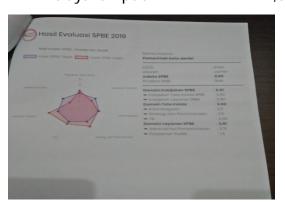
- Strategi dan Perencanaan : 3,5

- TIK : 3,00

3. Domain layanan SPBE : 2,91

- Administrasi pemerintahan : 3,71

- Pelayanan publik : 1,5





Saat dilakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) domain dengan aspek pendukungnya yang ada didalamnya Kota Jambi sudah memiliki beberapa regulasi yang sudah sangat mendukung layanan SPBE, baik dari infrastruktur juga dari sisi SDM. Selain itu dalam berbagai layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik lainnya yaitu Kota Jambi sudah memiliki website pada setiap OPD yang sebagian besar didukung oleh berbagai aplikasi layanan tehnis tertentu. Hasil indeks kematangan SPBE Kota Jambi Tahun 2018 yang dilakukan pada tahun 2018 Kota Jambi sudah mencapai nilai rata-rata 2.22 yang mencakup dari semua domain dan aspek pendukungnya. Sehingga untuk RPJMD tahun 2019 Kota Jambi menargetkan capaian ondeks kematangan 2,22. Sedangkan pada tahun 2019 Kota Jambi kembali ikut serta dalam pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), mengukur kembali domain dan aspek yang sama pada tahun 2018 dan melihat progres ataupun peningkatan pelayanan SPBE, dan hasilnya Kota Jambi mampu mencapai dengan nilai rata-rata 2,85.

Adapun yang menajadi faktor-faktor pendukungnya antara lain Kota Jambi telah menyusun masterplan SPBE tahun 2020-2025, sudah memiliki 40 website, dengan didukung oleh server dengan kapasitas bandwid 1000 Mbps. Serta telah tersambung kabel serat optik (fiber optic) SEPANJANG 90 Km.

Dalam mendukung operasional infrastruktur SPBE tersebut, rata-rata setiap OPD memiliki 1 – 3 orang SDM yang menguasai teknologi informatika, sedangkan khusus SDM berbasis IT dan programmer pada Dinas Kominfo saat ini telah mencapai 9 orang.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan daya, yaitu:

- 1. Seringkali terjadi pemadaman listrik oleh PLN
- 2. Kurang memadainya kualitas dan kapasitas mesin genset lingkungan komplek perkantoran Walikota Jambi termasuk juga Diskominfo
- 3. Belum tuntasnya conection fiber optic seluruh penjuru Kota Jambi
- 4. Masih kurangnya kapasitas bandwith dan server Kominfo

5. Masih kurangnya jumlah tenaga ahli teknologi informatika di Pemerintah Kota Jambi terutama di Kominfo.

IKU kedua merupakan *leading sector* Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Kearsipan dan perpustakaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yaitu indeks profesionalitas ASN dengan target sebesar 56 terealisasi sebesar 56,2 atau dengan capaian 100,35% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dikarenakan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Adapun rumus pengukuran indeks profsionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masingmasing jawaban dimensi/indikator. Dimensi terdiri dari 1. Dimensi kualifikasi, 2. Dimensi kompetensi 3. Dimensi kinerja dan 4. Dimensi Disiplin, yaitu:

1. Dimensi Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
- d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Di bawah SLTA.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu) /D-IV (Diploma Empat);
- d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
- e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
- f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

2. Dimensi Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:

- a. Diklat Kepemimpinan;
- b. Diklat Fungsional;
- c. Diklat Teknis; dan
- d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:
- a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

- b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:
- a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
- b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis

paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- Instrumen Pengukuran pada seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Keikutsertaan dalam seminar / workshop / kursus / magang / sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3. Dimensi Kinerja

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.

Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteriasedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria.

4. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.

Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

- a. Hukuman disiplin ringan;
- b. Hukuman disiplin sedang; dan

c. Hukuman disiplin berat.

Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
- c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
- d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kategori tingkat profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut:

No.	Nilai	Tingkat Profesionalitas
1.	91 – 100	Sangat Tinggi
2.	81 – 90	Tinggi
3.	71 – 80	Sedang
4.	61 – 70	Rendah
5.	60 ke bawah	Sangat Rendah

Permasalahan

- 1. Masih rendahnya kualifikasi (pendidikan) ASN untuk dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan pengukuran itupun kalau pendidikan seluruh ASN berpendidikan Strata 3. Dari jumlah pegawai Kota Jambi sebanyak 6.213 yang berpendidikan S3 hanya 5 oarang, S2 sebanyak 327 orang, S1 sebanyak 3.689 orang, DI sebanyak 135 orang, SLTA sebanyak 1.087, SLTP sebanyak 70 orang dan SD sebanyak 70 orang merupakan data pada tahun 2019.
- Masih ada pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan untuk dimensi kompetensi diperhitungkan sebesar 40%. Dari total

jabatan struktural yang ada, yang sudah mengikuti diklat PIM sebesar 60,25% atau sebanyak 664 pegawai. Bobot 15% bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki dan bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan pelatihan dan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

3. Masib banyak jabatan fungsional (staff) yang tidak mengikuti diklat teknis 20 JP dalam setahun.

<u>Solusi</u>

- Untuk meningkatkan kualifikasi diberi kesempatan pada ASN untuk melanjutkan pendidikan dengan penerbitan surat izin belajar bagi yang melanjutkan dengan biaya sendiri atau penerbitan surat tugas belajar bagi yang mendapatkan bea siswa dari Kementerian, lembaga atau swasta.
- 2. Diperlukan anggaran yang sangat besar untuk pemberian bea siswa Pemerintah Kota Jambi
- 3. Untuk diklat kepemimpinan dibutuhkan anggaran yang sangat besar karena masih 39,75% pejabat struktural belum mengikuti diklat tersebut
- 4. Untuk diklat teknis setiap tahun wajib 20 JP bagi setiap ASN dan untuk memenuhi diklat tersebut dibutuhkan anggaran yang besar
- 5. Agar OPD aktif mendaftarkan ASN untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan Kementerian, BPSD Kemendagri dan BPSDM Provinsi baik itu kontibusi atau tanpa kontribusi diklat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dimana anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga

sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak terlepas dari dukungan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki untuk menangani kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi tahun 2019 mendapatkan anggaran belanja langsung pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sebesar Rp. 7.868.816.500,00 (Tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 6.093.897.824,00,- (Enam milyar Sembilan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah (77,44%). Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya aparatur di Kota Jambi dengan jumlah PNS pada akhir Desember 2019 sebanyak 6.213 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi sejumlah 50 PNS artinya 1 orang harus menangani 124 PNS ini sangat efisien dari dukungan sumberdaya. Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun yang harus terus menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi yang harus mampu melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran belanja langsung 1.774.918.676,- (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) atau (22,55 %).

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2019 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya. Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau Kurang dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan pencapaian yang sama atau kurang dari 100%.

Tingkat efisiensi tertinggi dapat terlihat pada indikator Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara yang mencapai 77.02%, sedangkan tingkat efisiensi yang terendah ditunjukkan pada indikator Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu yang hanya memiliki tingkat efisiensi 20.63%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan

No	Sasaran	Indikator	-	Γahun 201	9	Capaian	Program	Kegiatan
NO	Sasaran	Haikatoi	Satuan	Target	Realisasi	%	Tiogram	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kualitas penataan Aparatur Sipil Negara	Persentase pegawai yang ditempatkan dalam jabatan	Persen	94	98.64	104.94	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Seleksi Penerimaan CPNS
2	Terciptanya pelayanan kepegawaian yang akurat dan tepat waktu	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Persen	87	98.56	113.29	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelayanan dan Pembinaan CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak
	dan Kompetensi Aparatur	Persentase Pendidikan Formal terakhir yang telah dicapai	Persen	20	12.36	61.80	Pembinaan dan Peningkatan	1 Pendidikan dan pelatihan pengkaderan formal
3	Sipil Negara	Persentase Pengembangan Kompetensi	D	44.5	45.00	101.20	Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi daerah
			Persen	sen 44.5	45.08	101.30		2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
4	Meningkatnya Kinerja dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	Persentase Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mendapatkan Nilai Baik	Persen	84	98.46	117.21	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS dan Pemberian penghargaan satyalencana karya satya dan masa kerja pegawai serta Pemantauan Evaluasi SKP
	Dipit regata	Persentase Penurunan Hukuman Disiplin	Persen	1.27	0.56	226.79		Pembinaan Korpri dan Kesejahteraan Pegawai

Dari Tabel. diatas terlihat bahwa semua kegiatan yang dilaksanaan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Jambi menunjang terhadap keberhasilan dalam pencapaian sasaran hal ini disebabkan adanya kesinambungan antara tiap-tiap kegiatan dalam kontribusinya mencapai target sasaran yang telah di tentukan.

Selanjutnya IKU ketiga yaitu nilai SAKIP yang didukung oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi, Sekretariat Daerah Kota Jambi dan Inspektorat Kota Jambi dengan target tahun 2019 nilai B terealisasi dengan nilai B (65,02) atau dengan capaian 100% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Adapun penilaian dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan dan komponen yang dinilai, sebagai berikut:

No	Komponen Yang Di Nilai	Bobot	Nilai 2019
1.	Perencanaan kinerja	30	21,85
2.	Pengukuran kinerja	25	15,75
3.	Pelaporan kinerja	15	9,64
4.	Evaluasi internal	10	5,60
5.	Capaian kinerja	20	12,18
	Nilai hasil evaluasi	100	65,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		В

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69. JAKARTA 12190. TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS http://www.menpan.go.id

B/ 647 /AA.05/2019 Nomor Hal

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah

30 Desember 2019

Yth. Walikota Jambi

Jambi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Jambi Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi memperoleh nilai 65,02 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Jambi telah menunjukkan hasil yang baik. Namun, masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

		Nilai		
Komponen Yang Dinilai	Bobot	2018	2019	
Perencanaan Kineria	30	21,67	21,85	
	25	15,75	15,75	
	15	9,30	9,64	
	10	5,30	5,60	
	20	10,97	12,18	
	100	62,99	65,02	
	BOLLEGE STATE	В	В	
	Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan Kinerja 30 Pengukuran Kinerja 25 Pelaporan Kinerja 15 Evaluasi Internal 10 Capaian Kinerja 20 Nilai Hasil Evaluasi 100	Komponen Yang Dinilai Bobot 2018 Perencanaan Kinerja 30 21,67 Pengukuran Kinerja 25 15,75 Pelaporan Kinerja 15 9,30 Evaluasi Internal 10 5,30 Capaian Kinerja 20 10,97 Nilai Hasil Evaluasi 100 62,99	

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN RB di atas dapat di lihat bahwa penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja tahun 2019 dengan nilai 65,02 dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 62,99 dimana keseluruhan komponen mengalami peningkatan dalam penilaian kecuali komponen pengukuran kinerja yang tidak mengalami peningkatan. Adapun faktorfaktor pendorong keberhasilan, diantaranya:

- Komitmen dari kepala daerah
- 2. Komitmen dari kepala perangkat daerah
- 3. Terselenggaranya coaching clinic bagi kepala perangkat daerah di KemenPAN RB

- 4. Terselenggaranya bimbingan teknis SAKIP untuk level eselon 3 sampai eselon 4
- 5. Terselenggaranya pelatihan dan pendidikan SAKIP untuk Kasubbag Perencanaan pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Indikator keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi yang diampu oleh Inspektorat Kota Jambi dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Jambi, dengan target 3,65 terealisasi 3,25 atau dengan capaian 91,78 persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI** berdasarkan penilaian hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorkrasi bahwa hasil survey persepsi korupsi merupakan gambaran integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,35 dalam skala 4, yang berarti masyarakat memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

Lebih lanjut indikator kelima yaitu indeks kepuasan masyarakat yang didukung oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan dalam Kota Jambi, dengan target 85,50% dan terealisasi 82,15% atau capaian sebesar 96,08% masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Dimana dapat dijelaskan bahwa semua program atau kegiatan pada tahun 2019 menunjang pada keberhasilan pencapaian pernyataan/perjanjian kinerja, namun belum optimal dalam pelaksanaannya. Dalam artian semua kegiatan dapat terlaksana, sasaran strategis dinas yang merupakan indikator kinerja utama tercapai, namun indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 mengalami penurunan dengan angka 83,66% yang disebabkan adanya perubahan penurunan nilai interval dan dengan sistem OSS (Online Single Submission) oleh Pemerintah Pusat dalam pelayanan perizinan yang diterapkan. Untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan, pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat. Olehnya itu Peraturan Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan publik. Pedoman dimaksud adalah sebagai acuan utnuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam menilai secara objektif dan kontiniu terhadap perkembangan kerja unit pelayanan publik.

Dalam penyusunan survey kepuasan masyarakat digunakan kuisoner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data yang di isi oleh masyarakat yang berurusan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan terdiri dari (1) kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan dengan nilai IKM konversi 9,000, (2) kemudahan prosedur pelayanan dengan nilai konversi 8,800, (3) Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan dengan nilai konversi 8,675, (4) Kemungkinan adanya pungutan biaya lainnya selain tarif dengan nilai konversi 10,975, (5) Kesesuaian produk pelayanan antar tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan dengan nilai konversi 8,775, (6) Kompetensi/kemampuan petugas memberikan pelayanan dengan nilai konversi 9,025, (7) Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan dengan nilai konversi 9,275, (8) kualitas sarana dan prasarana dengan nilai konversi 8,800, (9) Penanganan pengaduan layanan pengaduan dengan nilai konversi 10,425.

Berdasarkan analisa di atas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,348 setelah dikonversi menjadi 83,66 dengan mutu pelayanan pada kategori baik "B".

No	Indikator	Kesimpulan
1.	IKM setelah dikonversi	83,66
2.	Mutu pelayanan	В
3.	Kinerja unit pelayanan	Baik

Memperhatikan pentingnya Pelayanan Publik perlu adanya upaya melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan Publik. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

berpedoman pada peraturan Menteri Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pengolahan data tersebut di lakukan untuk pengukuran dalam penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi mengenai karakteristik responden dan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat.

Analisis terhadap identifikasi kepuasan masyarakat berdasarkan populasi sebanyak 8.000 dengan sampel 330 responden kepada pengguna layanan Publik

Analisa data dari hasil survei melalui quisioner kepada 330 pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap 9 unsur pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur yang akhirnya akan menghasilkan pelayanan prima good governance dan cleen governance. Hasil Pengolahan data yang merupakan hasil dari Survei kepuasan masyarakat, bahwa nilai konversi berdasarkan unsur pelayanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Unsur Pelayanan	Bobot Rata - Rata Unsur	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Indeks	Nilai IKM Konversi
1	2	3	4	5=4x0,111	6=5x25
U1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan	1166	3,239	0,360	9,000
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1142	3,172	0,352	8,800
U3	Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan	1126	3,128	0,347	8,675
U4	Kemungkinan adanya pungutan Biaya lainnya selain tarif	1416	3,933	0,437	10,925
U5	Kesesuaian produk Pelayanan antar tercantum dalam Standar Pelayanan dengan hasil yang diberikan	1136	3,164	0,351	8,775
U6	Kompetensi/kemampuan Petugas memberikan Pelayanan	1172	3,256	0,361	9,025
U7	Perilaku petugas dalam Pelayanan terkait Kesopanan dan Keramahan	1204	3,344	0,371	9,275
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	1140	3,167	0,352	8,800
U9	Penanganan Pengaduan Layanan Pengaduan	1353	3,758	0,417	10,425

Sumber: data primer diolah

Berikut akan disajikan hasil temuan dalam kajian Kepuasan Masyarakat akan kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berdasarkan 9 Indikator Kepuasan Masyarakat pada tabel dibawah ini :

1. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan dengan Jenis Pelayanan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Sesuai	0	0%
Kurang Sesuai	4	1,11%
Sesuai	267	74,17%
Sangat Sesuai	89	24,72%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator persyaratan pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,239 dengan nilai baik "B"

2. Kemudahan Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Mudah	5	1,39%
Kurang Mudah	24	6,67%
Mudah	241	66,94%
Sangat Mudah	90	25,28%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator Prosedur ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,3172 dengan nilai baik "B"

3. Kecepatan Waktu dalam memberikan Pelayanan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Cepat	3	0,83%
Kurang Cepat	32	8,89%
Cepat	241	69,94%
Sangat Cepat	84	23,33%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator memperoleh bobot rata rata sebesar 3,128 dengan nilai baik "B"

4. Kemungkinan adanya pungutan biaya lain selain dalam pelayanan selain tarif yang telah ditentukan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Selalu	0	0,%
Sering	1	0,27%
Kadang – Kadang	19	5,28%
Tidak pernah	338	93,89%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator kewajaran biaya pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,933 dengan nilai sangat baik "A".

5. Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Sesuai	1	0,28%
Kurang Sesuai	9	2,50%
Sesuai	279	77,50%
Sangat Sesuai	71	19,72%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator kejelasan petugas pelayanan in menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,164 dengan nilai baik "B"

6. Kompotensi/Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Kompoten	1	0,28%
Kurang Kompoten	6	1,67%
Kompoten	250	69,44%
Sangat Kompoten	103	28,61%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator tanggung jawab petugas pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,256 dengan nilai sangat baik "A"

 Sikap perilaku petugas dalam layanan terkait Kesopanan dan keramahan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Tidak Kompoten	1	0,28%
Kurang Kompoten	6	1,67%
Kompoten	250	69,44%
Sangat Kompoten	103	28,61%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator keramahan dan kesopanan pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,344 dengan nilai sangat baik "A"

8. Kualitas sarana dan Prasarana

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
Buruk	1	0,28%
Cukup	37	10,28%
Baik	226	62,78%
Sangat Baik	96	26,67%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator tanggung jawab petugas pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,167 dengan nilai sangat baik "A"

9. Penanganan pengaduan Layanan Pengaduan

Prosedur Pelayanan	Frekwensi	Persentase (100%)
1	2	3
Tidak Ada	2	2,22%
Ada Tetapi Tidak Berfungsi	8	2,50%
Berfungsi kurang Maksimal	9	12,22%
Dikelola dengan Baik	299	83,06%
Jumlah	360	100%

Sumber : data primer diolah

Hasil tabulasi data indikator kedisiplinan petugas pelayanan ini menghasilkan bobot nilai unsur pelayanan 3,758 dengan nilai sangat baik "A"

Dari ke 9 Unsur pelayanan yang di nilai, nilai kinerja IKM terendah adalah unsur pelayanan dengan nilai unsur kecepatan waktu pelayanan 3,128 dengan nilai kualitatif baik "B" sedangkan kinerja IKM yang tertinggi adalah kemungkinan adanya pungutan lain selain tarif yang telah ditentukan sebesar 3,933 dengan nilai kualitatif kepuasan sangat Baik "A". Interval antara kedua nilai tersebut dapat diartikan bahwa dari 9 unsur pelayanan yang dinilai belum seluruhnya menunjukkan sangat baik, namun tidak terdapat unsur pelayanan yang terlalu yang sangat kurang atau kurang baik.

Berdasarkan analisa pengolahan data maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,348 dengan demikian dapat di simpulkan nilai IKM setelah dikonversi adalah sebesar 83,698 dengan mutu pelayanan pada kategori Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi baik "B".

Kesimpulan dan Analisis IKM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2019

No	Indikator	Kesimpulan
1	IKM setelah dikonversi	83,70
2	Mutu Pelayanan	В
3	Kinerja Unit Pelayanan	BAIK

Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan perhitungan diatas, secara keseluruhan Indeks Kepuasan masyarakat akan diurutkan berdasarkan rangking sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	2	3
1	Kemungkinan adanya pungutan lain	3,933
	dalam pelayanan selain tarif yang	
	ditentukan	
2	Penanganan pengaduan layanan	3,758
	pengaduan	
3	Perilaku petugas dalam pelayanan	3,344
4	Kompetensi/kemampuan petugas dalam	3,256
	memberikan pelayanan	
5	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,239
	dengan jenis pelayanan	
6	Kemudahan prosedur pelayanan	3,172
7	Kualitas sarana dan prasrana	3,167
8	Kesesuaian produk pelayanan antara	3,164
	tercantum dalam standar pelayanan	
	dengan hasil yang diberikan	
9	Kecepatan waktu dalam memberikan	3,128
	pelayanan	

SASARAN 2

MENURUNKAN TINGKAT PELANGGARAN TERHADAP PERDA DAN PERWAL

Sasaran kedua adalah menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL yang di dukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 2 (kedua) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.4. berikut.

Tabel 3.4. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 2 (kedua) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		ANGKA	%		2019		TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS		KINERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	6	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaraan PERDA dan PERWAL	82,00%	82,00%	82,00%	82,00%	100,00%	60,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				82,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Pada IKU keenam yaitu penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL dengan target 82,00% terealisasi 82,00% atau dengan capaian 100,00% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI dengan formulasi pengukuran jumlah pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan sebanyak 50 kasus dibagi jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan sebanyak 50 kasus maka didapat capaian sebesar 100,00%.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, kendala atau hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaannya dan langkah antisipatif serta strategi apa saja yang diambil atau dilakukan untuk

mengatasi segala kendala/hambatan tersebut. Berikut adalah hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran berikut keberhasilan dan kegagalannya melalui kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi selama tahun 2019.

- Target: 55 kasus, Realisasi: 53 Kasus, capaian kinerja 96,3 % (BAIK). Keberhasilan pencapaian kinerja dikarenakan adanya komitmen pimpinan dalam merespon serta menindaklanjuti setiap laporan tentang adanya indikasi pelanggaran perda, serta hasil dari patroli yang dilaksanakan oleh anggota Satpol PP dilapangan sehingga, sehingga indicator kinerja sasaran tersebut memperoleh predikat Baik . namun dari keberhasilan capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi tersebut masih terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pencapaian sarsan yaitu :
 - 1. Luasnya cakupan penegakan perda yang meliputi luas wilayah, jumlah perda dan masyarakat atau Badan Usaha;
- Kurangnya jumlah PPNS untuk penegakan perda.

 untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan unaya sebagai h

untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan upaya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum (APH) seperti : Polisi, TNI, Kehakiman dalam melaksanakan penegakan Perda;
- 2. Mengirimkan anggota Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS setiap tahun

Keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator sasaran tersebut dikarenakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dengan dilaksanakannya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, badan hukum serta aparatur. Selain itu diberlakukannya penindakan terhadap pelanggar perda menjadi pendorong akan keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tersebut sehingga memperoleh predikat Baik.

SASARAN 3

MENINGKATKAN PELAYANAN PADA KONDISI PRA, TANGGAP DAN PASCA KEBAKARAN SERTA KEBENCANAAN

Sasaran ketiga mengenai meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan yang didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 3 (ketiga) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.5. berikut.

Tabel 3.5.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 3 (ketiga) Tahun 2019

	CACADAN	INDIKATOR		INDIKATOR		INDIKATOR	INDIKATOR	ANGKA	%		TARGET AKHIR RPJMD 2023
NO	STRATEGIS	= =		AWAL RPJMD		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN			
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	7.	Cakupan pelayan an pemadam kebakar an	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	RATA-RATA % CAPAIAN				100,00%			100,00%			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dengan target 100,00% terealisasi 100,00% atau dengan capaian 100,00% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana data bersumber dari tingkat waktu tanggap (*Respon Time Rate*) dengan target kinerja pada tahun 2019 adalah selama 19 menit terealisasi 19 menit atau dengan capaian 100,00%, jumlah warga Kota Jambi yang memperoleh layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebanyak 85 KK terealisasi sebanyak 85 KK atau dengan capaian 100,00%, Jumlah operasi pemadam kebakaran sebanyak 80 kali terealisasi sebanyak 80 kali atau dengan capaian 100,00%, jumlah operasi penyelamatan dan evakuasi kebakaran dengan target 85 Kali terealisasi 85 kali atau dengan capaian 100,00% dan jumlah operasi penyelamatan dan

evakuasi (operasi darurat non kebakaran: bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, orang tenggelam, orang masuk sumur, bunuh diri dan sebagainya dengan target sebanyak 25 kali terealisasi 25 kali atau dengan capaian 100,00%

SASARAN 4

MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG ARTI PENTINGNYA IDEOLOGI PANCASILA DAN KBHINEKAAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Sasaran Keempat yaitu meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 4 (keempat) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.6. berikut:

Tabel 3.6. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 4 (keempat) Tahun 2019

	SASARAN	SASARAN INDIKATOR		ANGKA	%		2019		TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS		NERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	8.	Persenta se pembina an terhadap masyarak at terkait ideologi pancasila	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				20,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Dapat dijelaskan bahwa iku ke delapan yaitu persentase pembinaan terhadap maasyarakat terkait ideologi pancasila dengan target 20,00% terealisasi 20,00% atau dengan capaian 100,00% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana jumlah forum kemasyarakatan yang akan menjadi

sasaran dilakukan pembinaan sebanyak 5 Forum dibagi dengan jumlah Forum Kemasyarakatan yang terdaftar sebanyak 25 Forum terdiri dari Orkesmas, Parpol, FKUB, FKDM dan FPK sehingga tercapai 20,00% sesuai target. Pembinaan dan pemahaman tentang arti pentingnya Ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan dalam kehidupan sosial masyarakat ini juga dapat terlihat dengan adanya beberapa kasus yang mengarah pada potensi konflik sosial di masyarakat yang dapat diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Jambi dengan melibatkan forum-forum kemasyarakatan yang ada. Berikut data yang dapat kami sajikan terkait beberapa kasus yang berpotensi menjadi konflik sosial dalam masyarakat:

1. Pembangunan Tempat Ibadah

Terdapat 3 (tiga) bangunan gereja yang mendapat penolakan oleh masyarakat karena mendirikan gereja tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Hal ini menyebabkan masyarakat menolak keberadaan Gereja tersebut dan diputuskan oleh Pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi untuk menyegel bangunan Gereja tersebut sampai segala persyaratan yang diharuskan terpenuhi.

2. Penyebaran Aliran Yang Dianggap Sesat

a. Kelompok Ahmadiyah

Adanya penyebaran aliran dari kelompok Ahmadiyah yang meresahkan masyarakat disekitar perbatasan wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Kelompok ini berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi tetapi

menyebarkan ajarannya kepada penduduk di Kota Jambi. Hal ini telah diantisipasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersamasama dengan Pemkot Jambi dan Pemkab Muaro Jambi menyetop

ajaran mereka karena secara jelas dan nyata tidak sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh agama Islam.

b. Kelompok Saksi-Saksi Yehuwa

Kelompok Yehuwa dianggap sesat oleh Agama Kristen baik Khatolik maupun Protestan karena menyimpang dari apa yang selama ini diajarkan oleh kedua agama tersebut. Kelompok ini menyebarkan dan mempengaruhi penduduk yang telah beragama, bahkan mereka juga menyebarkan ajaran kelompok mereka sampai ke Pondok Pesantren sehingga banyak menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal ini juga telah diantisipasi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan juga melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama-sama dengan Pemkot Jambi melakukan pertemuan dengan Kelompok Saksi-Saksi Yehuwa untuk tidak lagi melakukan penyebaran ajaran yang selama ini telah mereka lakukan dibanyak tempat.

SASARAN 5 MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PARPOL DALAM PEMBANGUNAN

Sasaran Kelima yaitu meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan yang didukung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 5 (kelima) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.7. berikut.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 5 (kelima) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		INDIKATOR		ANGKA	%		2019		TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS	•	KINERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023		
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	9	Persenta se orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyara kat	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	100,00%		
	RATA-RATA % CAPAIAN				20,00%			100,00%			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Selanjutnya IKU kesembilan yaitu persentase orkesmas dan parpol yang berperan aktif dimasyarakat dengan target 20,00% terealisasi 20,00% atau dengan capaian 100,00% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana jumlah orkesmas dan parpol yang aktif sebanyak 67 dibagi dengan jumlah jumlah orkesmas dan parpol yang terdaftar di database Badan Kesbangpol Kota Jambi sebanyak 96 Orkesmas sehingga tercapai 20,00% sesuai target. Pencapaian tersebut didukung oleh program meningkatkan pembinaan pemberdayaan fasilitas orkesmas dan parpol.

Peran aktif dari organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik (PARPOL) dimaksudkan disini adalah bahwa baik Ormas dan Parpol tersebut melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah mereka lakukan secara berkala, paling tidak satu tahun sekali. Hal ini dibuktikan dengan laporan yang mereka sampaikan ke Badan Kesbangpol Kota Jambi, dan kegiatan ini terus dimonitor dan dievaluasi serta disinergikan dengan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol sendiri.

Sebagai contoh dari peran aktif yang telah dilakukan oleh Ormas dan Parpol selama ini adalah:

 Ormas OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) telah melaksanakan penelitian terhadap masyarakat yang pernah terlibat dengan kegiatan prostitusi dan terindikasi HIV/AIDS dengan harapan pemberian pelayanan terhadap orang-orang tersebut bisa diperlakukan sama dengan masyarakat pada umumnya (tidak ada diskriminasi).

- 2. Ormas Ki-Sumo (Komunitas Suka Menolong) telah melaksanakan kegiatan sunatan massal, donor darah dan operasi mata katarak.
- 3. Parpol melaksanakan kegiatan dalam bentuk pemberian donasi kepada masyarakat yang terkena dampak akibat bencana alam.

SASARAN 6

MENINGKATKAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS PERKOTAAN

Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dalam periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Jambi tahun 2018 – 2023 merupakan prioritas pembangunan yang pertama.

Infrastruktur merupakan katalis bagi pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan efisiensi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam semua aktifitas masyarakat dan pemerintah, keberadaan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sudah menjadi kebutuhan dasar.

Infrastruktur sebagai sistem yang dikaitkan dengan unsur yang berada di dalam suatu sistem ruang dan kegiatan, memiliki peran penting terhadap perubahan kemakmuran wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Peran infrastruktur terhadap perkembangan wilayah dan kota memiliki kontribusi yang sangat signifikan, baik pada aspek perekonomian, sosial-kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Akan tetapi arah kebijakan pembangunan sistem infrastruktur yang berlangsung saat ini belum menunjukan hasil yang memadai untuk memerankan fungsinya sebagai pengarah dan pendorong pembangunan.

Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama untuk sasaran 6 (keenam) tahun 2019 dapat dilihat pada tabel. 3.8. berikut.

Tabel 3.8. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 6 (keenam) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		INDIKATOR ANGKA			2019		TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS		NERJA	AWAL RPJMD	-	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan	10.	Cakupan layanan infrastruk tur dan utilitas	50,59%	50,59%	53,07%	59,16%	111,47%	85,79%
RATA-RATA % CAPAIAN				50,59%			93,27%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Untuk mencapai sasaran meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas perkotaan ditetapkan 1 (satu) IKU yaitu cakupan pelayanan infrastruktur dan utilitas. Dalam pelaksanaannya IKU ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kota Jambi, untuk mengatasi permasalahan infrastruktur yang ada di Kota Jambi, selama periode tahun 2018 – 2023 melaksanakan beberapa program yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air bersih, air limbah dan bangunan, meningkatkan jaringan jalan dan jembatan yang berkondisi baik, menurunkan jumlah titik genangan perkotaan, meningkatkan sinergitas pembangunan infrastruktur dan meningkatkan harmonisasi dan konsistensi tata ruang.

Kota Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dimana didalamnya terdapat 62 Kelurahan, dengan Visi Pembangunan yaitu "Menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat berakhlak dan berbudaya dengan mengedepankan pelayanan prima", dimana dalam melaksanakan pembangunan selalu menghadapi tantangan dan hambatan, terutama dalam menyambut era perdagangan bebas di kawasan Asean. Untuk itu, sudah sewajarnya segenap komponen bangsa di Kota Jambi, baik aparatur pemerintah, swasta maupun masyarakat secara bahu membahu harus mampu membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.







Tugu Keris Siginjai merupakan ikon baru masyarakat Kota Jambi yang menggantikan tugu sebelumnya yang berbentuk Monas yang merupakan salah satu terobosan-terobosan program dan kegiatan yang inovatif namun tetap berlandaskan aturan dan peraturan yang berlaku untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dengan segala keterbatasan merupakan sesuatu kebutuhan yang tidak terelakkan. Hal ini tentu saja dapat berjalan secara optimal jika pemerintah dapat mengoptimalkan konsep pemberdayaaan masyarakat yang mencakup pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community-based development).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah implikasinya kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kewenangan dan peranan daerah kabupaten/kota. Sebagian besar kewenangan yang bersifat operasional dan berhubungan langsung dengan kegiatan masyarakat telah menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sesuai dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menuntut adanya aparatur pemerintahan yang bersih dan menempatkan diri sebagai orang yang harus melayani kepentingan masyarakat.



Salah satu kondisi lingkungan KAMPUNG BANTAR di Kota Jambi

Kampung BANTAR (Kampung yang Bersih, Aman dan Pintar) dan Kegiatan Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu Berasaskan Swadaya (Bangkit Berdaya) di Kota Jambi Guna Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pembangunan Nasional.

Kota Jambi secara keseluruhan terdiri atas daratan dengan luas 20.538 ha atau 205,38 Km² dengan penduduk yang heterogen, berdasarkan hasil registrasi penduduk 2018 tercatat 599.103 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk sebesar **2.912 jiwa/km2**. Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi dan pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dan jasa mempunyai mobilitas penduduk yang tinggi, terutama dari daerah tetangga (mobilitas sirkuler). Disamping sarana dan prasarana transportasi yang sudah relatif lebih baik, maka faktor jarak juga sangat menentukan.

Tingkat kepadatan dan heterogenitas penduduk yang cukup tinggi di Kota Jambi selain merupakan faktor kekuatan namun juga sekaligus menjadi faktor kelemahan. Faktor kekuatan dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa sampai saat ini Kota Jambi masuk ke dalam kategori kota yang aman di Indonesia, hal ini berarti tingkat kehidupan sosial budaya dan kehidupan rukun antar umat beragama dan ras di Kota Jambi dinilai sangat baik. Disisi lain kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan masalah dalam penanganan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Jambi yang selama ini berlangsung, mulai dari tahap perencanaan pembangunan telah mencatat rata-rata lebih dari 3.000 usulan kegiatan yang berasal dari tingkat Rukun Tetangga (RT). Namun dalam perjalanan proses perencanaan selanjutnya usulan kegiatan masuk ke dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan, selanjutnya tingkat kecamatan, Forum SKPD hingga pada tahap Musrenbang tingkat Kota usulan tersebut hanya terakomodir tidak lebih dari 45 persen.

TUJUAN AKHIR KONSEP "KAMPUNG BANTAR"

MENJADIKAN SUATU LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN TERKECIL LINGKUP RT DI MASYARAKAT :

- ✓ berwawasan lingkungan bersih dan sehat,
- ✓ tercukupinya fasilitas sanitasi dan sarana prasarana lingkungan memadai,
- ✓ permukiman layak huni dan tertata rapi (nyaman),
- ✓ aman dan tertib,
- ✓ tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang cukup baik (Produktif),
- ✓ senantiasa menjaga semangat jiwa gotongroyong, nilai-nilai Agama, kesetiakawanan Nasional, Adat istiadat dan norma-norma Hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara yang lebih berakhlak, beradat dan berbudaya.



Dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri masih terdapat inefisiensi dalam anggaran dan waktu pelaksanaan. Untuk suatu kegiatan yang menggunakan anggaran APBD harus mengeluarkan komponen pembiayaan untuk peralatan dan tenaga kerja hingga mencapai 25 persen, PPN 10 persen dan fee pihak penyedia juga hampir 10 persen. Sehingga dapat di jumlahkan total inefisiensi mencapai 45 persen dari total anggaran.

Oleh karena itu BANGKIT BERDAYA dengan berlandaskan semangat gotong royong yang dimiliki oleh masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat dari pemerintah dapat mengoptimalkan pembangunan dan hasil pembangunan dengan lebih baik.

Program BANGKIT BERDAYA merupakan program inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi dengan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan berupa bantuan material / bahan bangunan kepada kelompok Rukun Tetangga (RT) dimana usulan yang diajukan telah melalui proses sesuai tahapan perencanaan pembangunan daerah. Pada tahap pelaksanaan kegiatan semuanya dilakukan oleh swadaya masyarakat dengan berpegang pada asas gotong royong.

Dibalik setiap tetes keringat yang dilakukan oleh masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana utilitas lingkungan yang mereka butuhkan akan tumbuh rasa memiliki yang kuat sehingga mereka secara langsung akan senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas yang sudah mereka bangun. Selain itu kontribusi suka rela yang diberikan oleh keluarga masyarakat dalam turut serta membangun fasilitas yang ada tersebut, seperti konsumsi, fasilitas listrik dan fasilitas keamanan juga akan menumbuhkan rasa memiliki dan kekeluargaan yang lebih tinggi.

PENATAAN KAMPUNG BANTAR (BERSIH, AMAN DAN PINTAR)

KEGIATAN DIFOKUSKAN PADA TINGKAT RT YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN SEMANGAT GOTONG ROYONG DI TENGAH - TENGAH MASYARAKAT MENGAKSELERASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN .

BERSIH

LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN HIJAU, HARUS ADA BANK SAMPAH BEBAS NARKOBA , RENDAHNYA ANGKA KRIMINALITAS,

AM AN

KDRT, DAN KASUS PERCERAIAN

PIN TAR

BEBAS BUTA AKSARA, RENDAHNYA ANGKA PUTUS SEKOLAH, GIZI ANAK (PAUD), POSYANDU TERINTEGRASI, KB, IBU HAMIL & BALITA, RENDAHNYA TINGKAT PENGANGGURAN,

2017	2018	2019
78 RT	40 RT	55 RT









TUJUAN BANGKIT BERDAYA



- 1. PERCEPATAN
 PEMBANGUNAN SARANA
 PRASARANA DAN UTILITAS
 LINGKUNGAN RT
- 2. UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN SANITASI MASYARAKAT PERKOTAAN
- 3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN







Namun yang paling utama tujuan dari pelaksanaan kegiatan inovatis BANGKIT **BERDAYA** ini adalah Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Lingkungan RT, Upaya Percepatan Pembangunan dan Sanitasi Masyarakat Perkotaan dan **Partisipasi** Masyarakat dalam

Pembangunan Lingkungan.

Secara garis besar selama periode tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dengan sasaran meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan berkelanjutan dengan indikator sasaran berupa:

1. Titik genangan air

Pada tahun 2019 dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi akan menangani 1 titik luas genangan air dibandingkan dengan total luas genangan di Kota Jambi sebanyak 19 titik genangan sehinggan terealisasi dengan capaian 5,26%



2. Rasio jalan kota dalam kondisi baik

Selanjutnya untuk pembangunan jalan pada tahun 2019 rasio jalan status Kota Jambi dalam kondisi baik terealisasi dengan panjang 444,38 km atau

87,06% dari target 510,452 km atau 89,06%. Untuk mewujudkannya didukung oleh program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan berupa jumlah ruas jalan status Kota Jambi ditangani sebanyak 17 belas ruas jalan, jumlah ruas jalan lingkar yang ditangani sebanyak 271 ruans jalan lingkar, dan pemeliharaan rutin jalan dengan panjang 4.000

meter dan operasional dan pemelihara unit pengelola campuran aspal (UPCA) berupa operasional peralatan dan perbekalan selama 12 bulan.





Secara keseluruhan pekerjaan jalan di Kota Jambi pada Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Uraian	Capaian
	Jalan Lingkungan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	17,369
2.	Kecamatan Jambi Timur	2,119
3.	Kecamatan Jelutung	1,451
4.	Kecamatan Kota Baru	25,200
5.	Kecamatan Pasar Jambi	0,093
6.	Kecamatan Telanaipura	6,150
7.	Kecamatan Danau Teluk	0,750
8.	Kecamatan Pelayangan	0,450
	Total Jaling (Km)	53,582
	Jalan Status Kota (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	0,736
2.	Kecamatan Jambi Timur	0,771
3.	Kecamatan Jelutung	1,636
4.	Kecamatan Kota Baru	2,605
5.	Kecamatan Pasar Jambi	-
6.	Kecamatan Telanaipura	3,434
7.	Kecamatan Danau Teluk	-
8.	Kecamatan Pelayangan	0,450
	Total Status Kota (Km)	9,632

	Parit Jalan (Km)	
1.	Kecamatan Jambi Selatan	0,450
2.	Kecamatan Jambi Timur	0,853
4.	Kecamatan Kota Baru	1,850
5.	Kecamatan Pasar Jambi	-
6.	Kecamatan Telanaipura	1,907
	Total Parit Jalan (Km)	5,060

3. Rasio pelayanan air minum

Rasio cakupan pelayanan air minum terealisasi sebanyak 82 sambungan rumah atau 69,38% dari target 79 sambungan rumah atau 67,39%. Sasaran indikator rasio cakupan pelayanan air minum di dukung oleh program pembangunan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan dengan kegiatan pengembangan sistem distribusi jaringan air bersih/air minum yang keluarannya adalah pemasangan sambungan rumah air bersih sebanyak 82 sambungan rumah, pembangunan jaringan pipa sebanyak 13 lokasi.

Peningkatan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum dan sarana sanitasi dapat dilihat berikut.

No	Uraian	Capaian
1.	Pembangunan IPAL Komunal (SR)	9
	Pembangunan tangki septik komunal (SR)	450
	Pembangunan IPAL komunal kombinasi MCK (SR)	-
	Pembangunan tangki septik individual (SR)	452
	Pembangunan MCK++IPAL per unit	-
2.	Pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	
	Penambahan jaringan (meter)	9.969
	Peremajaan jaringan (meter)	-
	Jumlah sambungan rumah (SR)	325

Kondisi layanan air bersih dan sanitasi tahun 2019

No	Uraian	Capaian
1.	Jumlah rumah tangga yang mendapat layanan air	82.024
	bersih	
2.	Jumlah rumah yang bersanitasi	1.521

4. Rasio cakupan pelayanan air limbah

Rasio cakupan pelayanan air limbah dengan target 0,97% atau 1.136 sambungan rumah terealisasi sebesar 1,15% atau 1.343 sambungan rumah dengan capaian 118,22%.

Pembangunan Tangki Septik Individual (DAK), Kelurahan Jelmu,
 Kec. Pelayangan







Pembangunan MCK++, Pondok Pesantren Nurul Iman























– Pengadaan Truck Tinja



















program pembangunan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan kegiatan pembangunan infrastruktur dan penataan permukiman penduduk berupa pedestrian jalan sebanyak 1 lokasi dan pembangunan sambungan rumah sanitasi sebanyak 184 sambungan rumah.

5. Rasio bangunan dalam kondisi baik

Rasio cakupan pelayanan air limbah dengan target 0,97% atau 1.136 sambungan rumah terealisasi sebesar 1,15% atau 1.343 sambungan rumah dengan capaian 118,22%.

program pembangunan pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan dengan kegiatan pembangunan gedung utilitas pemerintah berupa rehab gedung sebanyak 19 unit, kegiatan peningkatan kinerja pengelolaan angkutan berupa operasional pengelolaan angkutan selama 3 bulan.

6. Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan

Rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan pada tahun 2019 dengan target 41 dokumen atau 80% terealisasi sebanyak 41 dokumen atau 80% dengan capaian 100,00 didukung dengan kegiatan perencanaan koordinasi dan pengawasan bidang ke PU an berupa jumlah produk perencanaan ke PU an sebanyak 41 dokumen dan kegiatan rencana kerja SKPD berupa tersusunnyarenja dinas pekerjaan umumdan penataan ruang berupa penyusunan dokumen RKA/DPA sebanyak 1 dokumen.

7. Rasio ketaatan RTRW

Pengamatan terhadap pemanfaatan kesesuaian ruang adalah membandingkan kondisi aktual perkembangan fisik kota terhadap rencana distribusi fungsi ruang yang tertuang di dalam peta rencana pola ruang Kota Jambi. Berdasarkan perbandingan tersebut, secara keseluruhan inkonsistensi pola ruang yang digambarkan secara umum terhadap zona-zona peruntukkan lindung adalah sekitar 124,68 ha atau sebear 5,54%. Angka ini menunjukkan bahwa, jika indikator kesesuaian berdasarkan zona lindung dan zona budidaya, maka kesesuaian pemanfaatan saat ini adalah sekitar 94,46%. Inkonsistensi permasingmasing fungsi dalam peruntukkan zona lindung, dapat dilihat sebagai berikut.

Rekapitulasi inkonsistensi fungsi pemanfaatan ruang

Peruntukkan	Luas Peruntukkan	Inkonsistensi				
	(ha)	Luas (ha)	%			
Sempadan sungai	247,00	47,76	19,34			
Sempadan danau	292,53	56,18	19,20			
RTH Taman	85,91	13,66	15,90			
Lapangan	38,17	0	0			
Pemakaman	72,11	0	0			
RTH Pertanian	890,77	6,01	0,67			
Hutan kota, greenbelt, dan	622,40	1,07	0,43			
fungsi tertentu lainnya						
JUMLAH	2.248,85	124,68	5,54			

Target IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas tahun 2019 adalah sebesar 53,07 persen, sampai dengan akhir tahun telah dapat dicapai realisasi sebesar 59,16 persen dengan persentase capaian sebesar 111,47 persen, kategori **SANGAT TINGGI**.

SASARAN 7 MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran ketujuh yang ditetapkan dalam mencapai Percepatan Peningkatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.9. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 7 (Ketujuh) Tahun 2019

	NO SASARAN		INDIKATOR		%		2019		TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS	KINERJA		AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	11. Indeks kualitas air Indeks tualitas udara		32,11	32,11	37,75	38,27	101,37%	43,38
	ili igkurigan muup			80,68	80,68	80,7	76,84	95,21%	91,45
		13.	Indeks kualitas tutupan lahan	39,33	39,33	41,30	44,81	108,49%	61,37
	RATA-RATA % CAPAIAN				50,70%		53,30%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Dalam pelaksanaannya pencapaian sasaran ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dengan menetapkan 3 (tiga) IKU yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan, yang mana cara pengukuran ketiga iku tersebut didasarkan pada Peraturan

Menteri LHK Nomor 78/MENLHK/Setjen/SET.19/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama.

IKU indeks kualitas air dari target 37,75 terealisasi sebesar 38,27 sehingga tercapai sebesar 101,37% dengan kategori **SANGAT TINGGI**. Tidak mencapai target disebabkan berdasarkan data inventarisasi diketahui bahwa limbah domestik mendominasi sebagai sumber beban pencemar. Limbah domestik berasal dari kegiatan dan aktifitas manusia dalam kawasan pemukiman, limbah tersebut tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu namun langsung dialirkan kebadan air/penerima. Limbah domestik yang terakumulasi dari beberapa tahun sebelumnya menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai dan danau di Kota Jambi. Oleh karena dalam pembangunan sarana prasarana fisik dilaksanakan oleh Dinas PUPR maka dalam mengurangi beban pencemar untuk pembangunan fasilitas pengolahan limbah perlu dukungan dari instansi terkait tersebut.

Selain itu keterlibatan dan peran aktif dari berbagai *stakeholders* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemar air sangat diperlukan, adapun yang dapat dilakukan antara lain:

- Pembuatan IPAL komunal skala lingkungan atau kawasan
 Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi Amdal/UKL-UPL atas kegiatan pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik Nomor 223 tanggal 16 Desember 2019 dengan kapasitas 7.600 M3/hari dengan teknologi *Fixed-Bed Biofilm Actived Sludge* (FBAS) yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi
- 2. Pembuatan septic tank komunal Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septic tank komunal di perumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
- 3. Kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah serta BABS (Buang Air Besar Sembarangan)
- 4. Melarang pembuangan hasil kegiatan yang ada di Kota secara langsung ke sungai sebelum melalui proses pengolahan

- 5. Ada kerja sama yang baik dari semua pihak dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan
- Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah
- Penegakan hukum kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan
- 8. Penerapan program Prokasih (Program Kali Bersih)

Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari pengujian kualitas air anak sungai di Kota Jambi dengan dilakukan beberapa tahap sebagai berikut :

- Tahap 1 : Masing-masing titik pemantauan diasumsikan memiliki 1 (satu) data dan memiliki status mutu air.
- Tahap 2 : Kemudian konsentrasi parameter dibandingkan dengan baku mutu apabila (Ci/Lij) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (Ci/Lij) baru yaitu dengan rumus sebagai berikut : (Ci/Lij) baru = 1,0 + P.log (Ci/Lij).
- Tahap 3: Merangkum langka No. 1 dan No. 2 kemudian membuat tabel indeks pencemar air, masukkan data analisis uji laboratorium setiap sungai dalam rumus Pij = (((Ci/Lij)M² + (Ci/Lij)R²)/2)*0,5 untuk mendapatkan nilai indeks kualitas air, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P. 78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil analisis dan kualitas air di Kota Jambi disajikan pada tabel berikut :

Parameter Uji Kualitas Air Sungai

Parameter	Satuan	Baku Mutu
PH	mg/L	6,0 - 9,0
TDS	mg/L	1000
DHL	mg/L	-
Suhu	mg/L	Deviasi 3
Warna	mg/L	4-PLCO
Kekeruhan	mg/L	3-FAU
TSS	mg/L	2550
Cyanide	mg/L	0.20,2

Parameter	Satuan	Baku Mutu
Nitrit	mg/L	0,06
Copper	mg/L	0,02
Chrom	mg/L	0,05
Flour	mg/L	1,5
Besi	mg/L	-
Mangan	mg/L	-
Zinc	mg/L	0,05
DO	mg/L	>4
COD	mg/L	25
BOD5	mg/L	3
Sulphat	mg/L	-
Phosphate	mg/L	0,2
Nitrat	mg/L	10
Amoniak	mg/L	-
Minyak & Lemak	mg/L	1
Fecal coliform	mg/L	1000
Total coliform	mg/L	5000

Rekap Indeks Pencemar Air Anak Sungai di Kota Jambi Tahun 2019

			Jar	nuari	Fe	bruari	ı	Maret		April		Mei		Juni		Juli	Ao	ıustus	Sept	tember	О	ktober	Rata-	
No	Titik Pantau	Kelas	PI	Status	PI	Status	ΡI	Status	PI	Status	ΡI	Status	ΡI	Status	ΡI	Status	PI	Status	PI	Status	ΡI	Status	Rata	Status
1	Anak Sungai Kenali Besar (Hulu)	П	-	-	2,5	Ringan	-	-	6,0	Sedang	-	-	-	-	5,2	sedang	-	-	6,2	sedang	-	-	5,0	ringan
2	Anak Sungai Kenali Besar (Hilir)	П	-	-	3,0	Ringan	-	-	6,4	Sedang	-	-	-	-	5,6	sedang	-	-	6,2	sedang	-	-	5,3	sedang
3	Anak Sungai Kenali Kecil (Hulu)	П	-	-	3,1	Ringan	-	-	5,9	Sedang	-	-	-	-	5,5	sedang	-	-	6,2	sedang	-	-	5,2	sedang
4	Anak Sungai Kenali Kecil (Hilir)	II	i	-	2,9	Ringan	-	-	6,4	Sedang	-	-		-	kond	disi Jai kering	-	-	5,9	sedang	-	-	5,1	sedang
5	Anak Sungai Asam (Hulu)	=	i	-	3,3	Ringan		-	6,6	Sedang	-	-	1	1	3,5	ringan	1	-	6,9	sedang	-	-	5,1	sedang
6	Anak Sungai Asam (Hilir)	=	-	-	6,5	Sedang		-	6,1	sedang	-	-	-	-	5,2	sedang	-	-	6,1	sedang	-	-	6,0	sedang
7	Anak Sungai Tambuku (Hulu)	П	-	-	6,1	Sedang	-	-	6,2	sedang	-	-		-	5,9	sedang	-	-	5,6	sedang	-	-	6,0	Sedang
8	Anak Sungai Tambuku (Hilir)	П	-	-	5,8	Sedang	-	-	4,8	ringan	-	-	-	-	4,7	ringan	-	-	5,5	sedang	-	-	5,2	Sedang
9	Anak Sungai Selincah (Hulu)	П	-	-	5,5	Sedang	-	-	3,7	ringan	-	-	-	-	3,6	ringan	-	-	6,9	sedang	-	-	4,9	Ringan
10	Anak Sungai Selincah (Hilir)	П	-	-	3,9	Ringan	-	-	3,0	ringan	-	-	-	-	3,0	ringan	-	-	6,6	sedang	-	-	4,1	ringan
11	Anak Sungai Kambang (Hulu Bag.1)	П	3,7	ringan	-	-	7,1	sedang	-	-	-	-	4,1	ringan	-	-	5,5	sedang	-	-	-	-	5,6	sedang
12	Anak Sungai Kambang (Hulu Bag.II)	П	7,2	sedang	-	-	3,7	ringan	-	-	-	-	3,5	ringan	-	-	4,1	ringan	-	-	-	-	3,7	ringan
13	Anak Sungai Kambang (Hilir)	П	5,6	sedang	-	-	6,5	sedang	-	-	-	-	3,5	ringan	-	-	6,1	sedang	-	-	-	-	5,4	sedang
14	Anak Sungai Putri (Hulu Bag.1)	П	5,1	sedang	-	-	4,4	ringan	-	-	-	-	4,0	ringan	-	-	6,1	sedang	-	-	-	-	4,8	ringan
15	Anak Sungai Putri (Hulu Bag.II)	II	5,9	sedang	-	-	5,8	sedang	-	-	-	-	2,5	ringan	-	-	2,8	ringan	-	-	-	-	3,7	ringan
16	Anak Sungai Putri (Hulu Bag.III)	П	5,4	sedang	-	-	5,9	sedang	-	-	-	-	2,4	ringan	-	-	5,7	sedang	-	-	-	-	4,7	ringan
17	Anak Sungai Putri (Hilir)	П	2,8	ringan	-	-	5,8	sedang	-	-	-	-	3,6	ringan	-	-	2,7	ringan	-	-	-	-	4,0	ringan
18	Anak Sungai Solok Sipin (Hulu)	П	-	-	5,1	Sedang	-	-	2,7	ringan					3,9	ringan			9,0	sedang			5,2	sedang
19	Anak Sungai Solok Sipin (Hilir)	П	-	-	5,2	Sedang	-	-	6,1	sedang	-	-	-	-	5,0	ringan	-	-	2,7	Ringan	-	-	4,7	ringan

Evaluasi terhadap Nilai PI adalah :

0 ≤ PIj ≤1,0 : Memenuhi baku mutu (kondisi baik)

 $1,0 < PIj \le 5,0$: Cemar ringan

 $5.0 < PIj \le 10$: Cemar sedang

PIj > 10 : Cemar berat

Kriteria Indeks Kualitas Air Anak Sungai di Kota Jambi Tahun 2019

No	Nama Sungai	Titik	Frekuensi	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
1	Anak Sungai Kenali Besar (Hulu)	1	4	0	1	3	0
2	Anak Sungai Kenali Besar (Hilir)	1	4	0	1	3	0
3	Anak Sungai Kenali Kecil (Hulu)	1	4	0	1	3	0
4	Anak Sungai Kenali Kecil (Hilir)	1	3	0	1	2	0
5	Anak Sungai Asam (Hulu)	1	4	0	2	2	0
6	Anak Sungai Asam (Hilir)	1	4	0	0	4	0
7	Anak Sungai Tambuku (Hulu)	1	4	0	0	4	0
8	Anak Sungai Tambuku (Hilir)	1	4	0	2	2	0
9	Anak Sungai Selincah (Hulu)	1	4	0	2	2	0
10	Anak Sungai Selincah (Hilir)	1	4	0	3	1	0
11	Anak Sungai Kambang (Hulu I)	1	4	0	2	2	0
12	Anak Sungai Kambang (Hulu II)	1	4	0	3	1	0
13	Anak Sungai Kambang (Hilir)	1	4	0	1	3	0
14	Anak Sungai Putri (Hulu I)	1	4	0	2	2	0
15	Anak Sungai Putri (Hulu II)	1	4	0	2	2	0
16	Anak Sungai Putri (Hulu III)	1	4	0	1	3	0
17	Anak Sungai Putri (Hilir)	1	4	0	3	1	0
18	Anak Sungai Solok Sipin (Hulu)	1	4	0	2	2	0
19	Anak Sungai Solok Sipin (Hilir)	1	4	0	2	2	0
	Jumlah		75	0	31	44	0

Indeks Kualitas Air Kota Jambi Tahun 2019

No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	2	3	4=(status/jml status)	5	6=(4 x 5)
1	Memenuhi	0	0,00	70	0,00
2	Ringan	31	0,41	50	20,67
3	Sedang	44	0,59	30	17,60
4	Berat	0	0,00	10	0,00
	Jumlah	75	_		38,27

Tahun 2019 adalah tahun ke 1 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kualitas Air" tahun ini adalah sebesar 101,3%, bila dibandingkan

realisasi pada tahun 2018 dengan nilai 32,11 menjadi 38,27 di tahun 2019 maka terjadi peningkatan indeks kualitas air sebesar 6,16 atau 5,21% dan apabila capaian kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Lingkungan Hidup maka capaian kinerjanya mencapai 98,76%.

Indeks kualitas Air (IKA) yang ditargetkan untuk tahun 2019 sebesar 37,75 dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 32,11 dapat direalisasikan dengan nilai 38,27 pada tahun 2019, peningkatan nilai ini didapatkan dari pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar yang diketahui banyak berasal dari limbah domestik.

Limbah domestik yang terakumulasi dari beberapa tahun sebelumnya dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air sungai dan danau di Kota Jambi. Oleh karena itu dilakukan upaya untuk mengurangi beban pencemaran air dengan melakukan pembangunan sarana prasarana fisik melalui kegiatan pembuatan *septictank* komunal ataupun instalasi pengolahan air limbah (ipal) komunal dari kegiatan sanimas oleh Dinas PUPR Kota Jambi. Kegiatan sanimas pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Daftar Lokasi Sanimas Kota Jambi Tahun 2019.

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Nama BKM	Nama KSM	Nama KPP		erima nfaat
							KK	Jiwa
1	Jambi Timur	Rajawali	RT. 01	BKM Rajawali Sejahtera	Melati	Melati	50	198
2	Alam Barajo	Rawasari	RT 19	BKM MANDIRI RAWASARI	KSM SEKAR	KSM SEKAR	54	271
3	Alam Barajo	Rawasari	RT 26	BKM MANDIRI RAWASARI	JAYA BERSAMA	SIDO ARUM JAYA	50	183
4	Danau teluk	Olak Kemang	RT 04	BKM TELUK PERMAI	KSM SKIN DALAM	KPP GOTONG ROYONG	52	244
5	Jambi Timur	Talang Banjar	RT. 32	LKM Sinar Galih	Kamboja	Kamboja	54	218
6	Alam Barajo	Kenali Besar	RT 31	BKM ALAM BARAJO	AL IKHLAS	AL IKHLAS	50	201
7	Pelayangan	Mudung Laut	RT 04	SELARAS PINANG MASAK	SEJAHTERA MD	ANUGRAH	54	205
8	Jelutung	Handil Jaya	RT 01	BKM BERSAMA JAYA	Bantar Jaya	Bantar Jaya	51	204
9	Danau Sipin	Solok Sipin	RT 14	BKM BINA SEJAHTERA	EMPU GANDRING 2 BANGKIT	EMPU GANDRING 2 BANGKIT	53	209
10	Danau Sipin	Legok	RT 16	BKM Mandiri Legok	CANDI BERJAYA	CANDI BERJAYA	53	202
11	Danau Sipin	Legok	RT 29	BKM Mandiri Legok	PANDAN SERUMPUN	PANDAN SERUMPUN	52	204
12	Danau Sipin	Legok	RT 39	BKM Mandiri Legok	KSM PEDAS	SIPIN 39	55	239

Selain itu keterlibatan dan peran aktif dari berbagai *stakeholders* baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam upaya penurunan beban pencemar air sangat diperlukan, adapun yang telah dilakukan antara lain :

- 1. Dinas Lingkungan Hidup telah mengeluarkan rekomendasi Amdal/UKL-UPL atas kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Nomor 223 tanggal 16 Desember 2019 dengan kapasitas 7.600 m³/hari dengan teknologi *Fixed-Bed Biofilm Activated Sludge* (FBAS) yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.
- 2. Pembuatan *septictank* komunal.
 - Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup telah mewajibkan kepada developer perumahan melalui dokumen lingkungan agar membuat septic tank komunal diperumahan masing-masing untuk mengurangi beban pencemaran air.
- Kampanye atau promosi perilaku menjaga sungai dan stop membuang sampah ke sungai melalui iklan layanan masyarakat dimedia cetak dan elektronik
- 4. Melarang pembuangan hasil kegiatan yang ada di Kota Jambi secara langsung ke sungai sebelum melalui proses pengolahan.
- 5. Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah, pada tahun 2019 telah dilakukan pembinaan sebanyak 40 dunia usaha dan pengawasan terhadap 96 perusahaan.
- 6. Penegakan hukum kepada perorangan atau badan usaha yang membuang limbahnya sembarangan, Dinas Lingkungan Hidup bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi telah menindak 10 orang yang melangggar Perda Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Pembersihan Sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR sebanyak 7 sungai yaitu, sungai asam. sungai tembuku, sungai kenali besar,

sungai kenali kecil, sungai kambang, sungai solok sipin dan sungai putri.

Adapun Prgram yang mendukung indikator ini adalah:

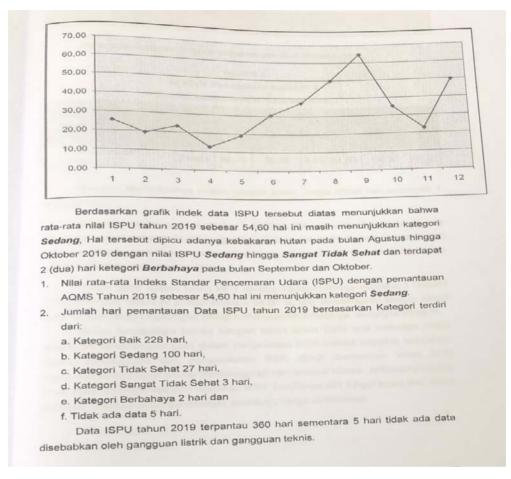
- Program Penurunan Beban Pencemaran, dengan kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan, dan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, dengan kegiatan :
 - Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemaran di Kota Jambi Lokus Sungai Kenali Besar dan Sungai Kenali Kecil Tahun 2019 diantaranya:

No	Parameter	Satuan	Rata- Rata Hasil Uji	Baku Mutu PP 82/2001	Keterangan
Sun	gai Kenali Be	esar			
1	BOD	Mg/L	12	3	Melebihi Baku Mutu
2	COD	Mg/L	15	25	Memenuhi Baku Mutu
3	TSS	Mg/L	15	50	Memenuhi Baku Mutu
Sun	gai Kenali Ke	ecil			
1	BOD	Mg/L	24	3	Melebihi Baku Mutu
2	COD	Mg/L	27	25	Melebihi Baku Mutu
3	TSS	Mg/L	20	50	Memenuhi Baku Mutu

- Sosialisasi pengelolaan air limbah sebanyak 50 orang berasal dari dunia usaha yang bergerak di bidang perhotelan, USK tahu dan tempe, rumah makan/restaurant, pengusaha makanan, dan industri/USK batik.
- Melakukan koordinasi pengendalian pencemaran.
- Melakukan pengujian sampel sebanyak 250 sampel di 91 titik,
 IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara dengan target 80,7
 terealisasi pada angka 76,84 atau dengan capaian sebesar 95,21%

dengan kategori **SANGAT TINGGI** dikarenakan pada tahun 2019 terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang berdampak terjadinya kabut asap di Kota Jambi sehingga menyebabkan terjadinya penurunan nilai indeks kualitas udara di Kota Jambi.

5 2 5 5 2 5	23 31	Mar									
5	31		Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	D
5		31	34	26	24	31	69	50	69	44	1
:5		19	38	51	26	35	49	43	170	56	1
	19	46	45	41	26	49	49	59	78	61	1
2	23	50	34	41	55	34	51	51	67	71	1 2
	27	47	34	35	25	22	65	44	76	48	1
	20	45	29	34	26	35	71	99	61	50	2
6	26	47	50	63	17	18	80	61	59	62	2
2	30	44	41	105	26	28	63	64	90	60	2
3	22	46	33	105	25	30	74	99	134	72	3
6	39	38	38	96	27	35	69	146	123	60	2
0	46	47	34	100	41	52	75	96	137	52	2
0	30	-	50	103	23	53	85	113	99	85	1
	35	50	42	95	25	53	59	177	153	92	1
9	48	15	40	102	30	53	72	123	128	56	1
0	30	54	35	100	32	41	77	131	136	41	1
4	40	44	39	88	24	53	77	129	332	44	1
	24	50	34	23	22	47	82	118	167	50	1
		40	29	25	30	53	82	142	60	58	2
		49	39	27	23	50	75	148	69	61	1
			36	28	27	53	66	156	94	67	1
			-	29	29	50	63	231	97	71	3
			19	32	30	51	88	299	83	72	2
			36	25	25	47	108	463	79	54	7
	I Halom M	Cota Jamb	i Tahun 2	2019							
	51	37	32	29	30	80	1 111	250	157	46	22
31	42	The state of the s		29	38	70	101	89	189	49	13
31	34	34	36	2000		-	93	80	88	35	17
21	39	35	41	30	28	56	51	89	86	36	17
			31	25	49	64	42	85	88	39	12
29	0	100000		1.00000		68	27	85	88	39	31
31,55	35,18	41,47	37,24	51,19							20,10
	31 21 29 26	33 51 32 51 33 51 34 21 39 0 29 0 0 29 0	39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 30 46 47 30 30 - 35 50 30 54 30 30 54 30 35 35 40 37 31 49 38 47 42 36 37 43 35 35 31 32 36 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34	39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38	39 38 38 96 0 46 47 34 100 0 30 - 50 103 - 35 50 42 95 9 48 15 40 102 0 30 54 35 100 4 40 44 39 88 9 24 50 34 23 9 35 40 29 25 7 31 49 39 27 8 47 42 36 28 9 49 47 - 29 17 43 35 19 32 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 18 47 42 36 28 19 35 40 29 25 10 43 35 19 32 10 26 50 43 30 29 11 39 35 41 36 26 11 39 35 41 36 12 26 0 60 51 24 12 29 0 35 0 26	13	33	33	33	13	33



Data ISPU tahun 2019 terpantau 360 hari sementara 5 hari tidak ada data disebabkan oleh gangguan listrik dan gangguan teknis.



Indeks Kualitas Udara Kota Jambi Tahun 2019

NO	Provinsi	Kota	Peruntukan	Kadar NO ₂	Kadar NO ₂	Tambah an NO2	Tambah an NO2	AQMS KLHK NO2	Kadar SO ₂	Kadar SO ₂	Tamb ahan SO2	Tamb ahan SO2	AQMS KLHK SO2	rerata NO2 kawas an	rerata SO2 kawas an	rerata NO2	rerata SO2	rerata NO2	rerata SO2	Indek s NO2	Indek s SO2	leu	IKU
				μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³	μg/m³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (jumla h 15)	18= (jumla h 16)	19	20	21=(1 9/40)	22=(2 0/20)	23=(2 1+22)	24
			Transportasi	22,60	20,70	41,84	41,60		3,45	7,22	2,62	0,25		31,68	3,38	29,66	5,84	29,66	5,84	0,74	0,29	0,52	76,84
			Industri	11,90	11,50	50,19	52,95		8,39	10,45	1,65	0,10		31,63	5,15								
1	JAMBI (1500)	JAMBI (1571)	Pemukiman	13,40	10,40	43,35	39,89		4,40	6,67	1,98	0,06		26,76	3,28								
			Perkantoran	17,10	18,80	36,96	35,11	34,83	7,04	11,99	0,18	0,16	38,48	28,56	11,57								
			BLANK	<0,41	<0,41				<2,57	<2,57													

Keterangan:

Kolom

24: IKU = (100-50/09 x leu-0,1)

Pengujian untuk peruntukan transportasi dilakukan di didepan Kantor Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.





Foto Pemasanagan Alat Pengujian IKU di Kantor Lurah Jelutung



Pengujian untuk peruntukan industri dilakukan di depan Puskesmas Pembantu Sijenjang Kecamatan Jambi Timur di depan Pabrik Karet BHT.





Foto Pemasangan Alat Pengujian IKU di depan Puskesmas Pembantu Sijenjang.

Pengujian untuk peruntukan pemukiman dilakukan di Perumahan Villa Kenali depan Kantor Lurah Mayang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.



Pengujian untuk peruntukan perkantoran dilakukan di depan Kantor Walikota Jambi.





Adapun program dan kegiatan yang mendukung indikator Indeks Kualitas Udara adalah :

 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Air Quality Monitoring System (AQMS).

Dari hasil pemantauan ISPU selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Rekap ISPU 2019

Tgl.	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1	15	23	31	34	26	24	31	69	50	69	44	31
2	22	31	19	38	51	26	35	49	43	170	56	21
3	15	19	46	45	41	26	49	49	59	78	61	13
4	25	23	50	34	41	55	34	51	51	67	71	20
5	42	27	47	34	35	25	22	65	44	76	48	17
6	-	20	45	29	34	26	35	71	99	61	50	28

7	56	26	47	50	63	17	18	80	61	59	62	22
8	32	30	44	41	105	26	28	63	64	90	60	27
9	33	22	46	33	105	25	30	74	99	134	72	30
10	26	39	38	38	96	27	35	69	146	123	60	27
11	40	46	47	34	100	41	52	75	96	137	52	20
12	50	30	-	50	103	23	53	85	113	99	85	19
13	-	35	50	42	95	25	53	59	177	153	92	16
14	39	48	15	40	102	30	53	72	123	128	56	16
15	30	30	54	35	100	32	41	77	131	136	41	18
16	34	40	44	39	88	24	53	77	129	332	44	10
17	39	24	50	34	23	22	47	82	118	167	50	18
18	39	35	40	29	25	30	53	82	142	60	58	23
19	37	31	49	39	27	23	50	75	148	69	61	13
20	18	47	42	36	28	27	53	66	156	94	67	18
21	26	49	47	-	29	29	50	63	231	97	71	31
22	37	43	35	19	32	30	51	88	299	83	72	26
23	32	51	42	36	25	25	47	108	463	79	54	7
24	33	51	37	32	29	30	80	111	250	157	46	22
25	28	50	43	30	29	38	70	101	89	189	49	13
26	31	42	36	50	25	39	53	93	80	88	35	17
27	31	34	34	36	26	40	70	45	80	90	35	20
28	21	39	35	41	30	28	56	51	89	86	36	17
29	29	0	46	31	25	49	64	42	85	88	39	12
30	26	0	50	51	24	31	58	27	85	88	39	31
31	29	0	35	0	25	0	52	32	0	48	0	-
Rata2	31,55	35,18	41,47	37,24	51,19	29,77	47,61	69,39	126,67	109,52	55,53	20,10

Berdasarkan Kepmen LH Nomor: Kep45/MENLH/10/1997

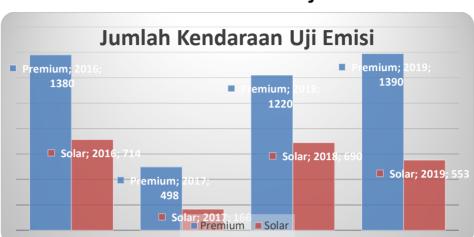
0	-	50	Baik
51	-	100	Sedang
101	-	200	Tidak Sehat
201	-	300	Sangat Tidak Sehat
301	-	keatas	Berbahaya

Kegiatan lain yang mendukung indikator ini yaitu :

Kegiatan pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor (spotcheck kendaraan bermotor) selama tiga hari berturut-turut pada ruas jalan yang berbeda dengan target total 1500 kendaraan. Hari pertama dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2019 di Jalan Hos Cokroaminoto (Halaman parkir Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi) pada pukul 08.00-15.00 WIB. Hari kedua dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2019 di Jalan Sultan Thaha (Depan WTC) dan pengujian hari ketiga tanggal 10 Oktober 2019 di Jalan H. Agus Salim (halaman parkir Gedung Senam Kotabaru). Adapun hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor selama 3 hari pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Data hasil uji emisi gas buang kendaraan bermotor tahun 2019

No	Jenis Kendaraan	Lulus Uji		Tidak Lulus		Jumlah Unit
140	Jenis Kendardan	Unit	%	Unit	%	Januari Onit
1	Bensin	1345	97	45	3	1390
2	Solar	275	50	278	50	553
	Jumlah					1943



Grafik Jumlah Kendaraan Uji Emisi

Telah dilaksanakannya pemantauan kualitas udara jalan raya (road side monitoring) mulai pukul 06.00 sampai dengan 05.30 hari berikutnya. Hari pertama dilaksanakan di jalan H Agus Salim, hari kedua di jalan Slamet Riyadi, dan hari ketiga di jalan Hos Cokroaminoto. Hasil pengujian di laboratorium terhadap sample pengujian kualitas jalan raya/road side di tiga titik lokasi untuk ketujuh parameter adalah memenuhi baku mutu. Ambang baku mutu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengedalian pencemaran udara :

Hasil Laboratorium Kualitas Udara di Lokasi Sampling Jalan H. Agus Salim (08 – 09 Oktober 2019)

NO	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Baku mutu	Metode
1	Sulfur dioksida (SO ₂)	Mg/m3	58	365	SNI 19-7119.7- 2005
2	Karbon Moniksida (CO)	Mg/m3	6.301	10.000	SNI 7119.10-2011
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Mg/m3	62	150	SNI 7119.2-2017
4	Oksidan/Ozon (0 ₃))	Mg/m3	50	235	SNI 7119.8-2017
5	Hydro Carbon (HC)	Mg/m3	127	160	SNI 7119.13-2009
6	PM10 Particulate	Mg/m3	97	150	SNI 7119.14-2016

Hasil Laboratorium Kualitas Udara Dilokasi Sampling Jalan Slamet Riyadi (09 – 10 Oktober 2019

NO	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Baku mutu	Metode
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Mg/m3	51	365	SNI 19-7119.7-
					2005
2	Karbon Monoksida	Mg/m3	5.843	10.000	SNI 7119.10-
	(CO)				2011
3	Nitrogen Dioksida	Mg/m3	60	150	SNI 7119.2-
	(NO_2)				2017
4	Oksidan/Ozon (NO ₃)	Mg/m3	57	235	SNI 7119.8-
					2017
5	Hydro Carbon (HC)	Mg/m3	109	160	SNI 7119.13-
					2009
6	PM10 Particulate	Mg/m3	80	150	SNI 7119.15-
					2016

Hasil Laboratorium Kualitas Udara Di Sampling Jalan HOS Cokroaminoto (10 – 11 Oktober 2019)

NO	Parameter	Satuan	Hasil Pengujian	Baku mutu	Metode
1	Sulfur Dioksida (SO ₂)	Mg/m3	62	365	SNI 19-7119.7-
					2015
2	Karbon dioksida (CO)	Mg/m3	6.072	10.000	SNI 7119.7-2017
3	Nitrogen Dioksida	Mg/m3	65	150	SNI 7119.8-2017
	(NO_2)				
4	Oksidan/Ozon (0 ₃)	Mg/m3	54	235	SNI 7119.10-
					2011
5	Hydro Carbon (HC)	Mg/m3	110	160	SNI 7119.15-
					2016
6	PM10 Particulate)	Mg/m3	86	150	SNI 7119.4-2017

Pemantauan kinerja lalulintas (traffic counting) hari pertama dilakukan di Jl. H. Agus Salim (depan kantor DLH Kota Jambi), hari kedua di Jl. Slamet Riyadi (depan kantor BPJS/Jamsostek) dan hari ketiga di Jl. Hos Cokroaminoto, berdasarkan perhitungan menggunakan Software data base Langit Biru menunjukan Nilai VCR (Volume Capacity Ratio) sebagai berikut:

VCR pada ketiga ruas jalan yang dipantau

No	lolon	VCR Maksimum			
No	Jalan	Pagi	Siang	Sore	
1	H. Agus Salim	0.50	0.46	0.57	
2	Slamet Riyadi	0.38	0.36	0.43	
3	HOS Cokroaminoto	0.51	0.40	0.54	

VCR adalah perbandingan antara jumlah kendaraan yang melintas dengan kapasitas maksimum yang dapat ditampung ruas jalan tersebut, dan merupakan gambaran dari tingkat pelayanan ruas jalan. Standar nilai VCR yang ditetapkan berdasarkan manual kapasitas jalan Indonesia (NKJI,1997) adalah sebagai berikut:

Kriteria tingkat pelayanan (TP) jalan

NO	Tingkat pelayanan	Kreteria	Nilai
1	Α	TP Sangat tinggi	0,00-0,20
2	В	TP Tinggi	0,21-0,44
3	С	TP Sedang	0,45-0,74
4	D	TP Rendah	0,75-0,84
5	E	TP Sangat rendah	0,85-1,00
6	F	TP Sangat-sangat rendah	>1.00

Berdasarkan dari tabel kriteria diatas, tingkat pelayanan pada jalan H. Agus Salim berada pada peringkat C yang berarti bahwa kemanpuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria rendah sampai dengan sedang. Tingkat pelayanan pada jalan Slamet Riyadi berada pada tingkat B berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria tinggi sampai sangat tinggi. Sedangkan tingkat pelayanan pada jalan HOS Cokroaminoto berada pada tingkat C dan B yang berarti bahwa kemampuan ruas jalan untuk melayani volume kendaraan yang melintas masuk kriteria sedang sampai dengan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) pada tahun 2019 telah memperhatikan beberapa hal yang perlu diperbaiki pada pelaksanaan tahun 2018 yang lalu yaitu publikasi ke masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan, ketersediaan Alat Uji Emisi, serta pemenuhan alat yang memenuhi standar dan terkalibrasi baik. Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencemaran udara dari sumber bergerak di Kota Jambi belum menujukkan situasi yang memerlukan perhatian serius. Namun demikian sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota, hal ini perlu tetap diperhatikan.

IKU ketiga belas mengenai indeks kualitas tutupan lahan dengan target 41,30 terealisasi dengan angka 44,81 atau tercapai sebesar 108,49% masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Belum tercapainya indeks tutupan lahan tahun 2019 ada beberapa faktor antara lain kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan RTH melalui regulasi, kebijakan, kajian, pengawasan dan pengendalian RTH, untuk menambah lahan RTH diperlukan instansi dan pendanaan/anggaran dari instansi terkait, terbatasnya lahan yang dapat ditanami ataupun dijadikan RTH, beralihnya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan, mahalnya harga tanah/lahan.

Kondisi ini didapatkan dari pendataan ulang data terhadap perhitungan nilai indeks kualitas tutupan lahan dari aspek nilai indeks tutupan hutan, indeks performance hutan, indeks kondisi habitat, indeks konservasi badan air, dan indek kondisi tutupan tanah. Penilaian aspek-aspek ini bukanlah perbandingan tampilan tutupan lahan hijau berbanding luas wilayah, namun perhitungan nilai kualitas yang dihasilkan dari setiap indeks tersebut, mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, penyediaan Ruang Terbuka Hijau, penghijauan/peningkatan tutupan vegetasi di kawasan perkotaan.

Sedangkan factor yang bisa menurunkan kinerja antara lain kegiatan pembukaan lahan atau alih fungsi lahan menjadi pemukiman atau sarana prasarana fisik lainnya.

Perhitungan IKTL dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

IKTL = 0,252 x ITH + 0,281 x IPH + 0,087 x IKH + 0,163 x IKBA + 0,217 x IKT

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No.	Uraian	Nilai Indeks	Perkalian	Jumlah Indeks
1	2	3	4	5= (3 x 4)
	ITH	45,36	0,252	11,43
	IPH	50,00	0,281	14,05
	IKH	3,18	0,087	0,28
	IKBA	17,61	0,163	2,87
	IKT	74,58	0,217	16,18
	IKTL			44,81

Keterangan:

ITH = Indeks Tutupan Hutan/Lahan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKH = Indeks Kondisi Habitat

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi :

a. Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari taman hutan, RTH taman kota, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH pemakaman, perumahan, lahan pertanian, belukar rawa, perkebunan, jalur hijau jalan dan pedestrian, RTH kawasan perkantoran pemerintah dan RTH fungsi tertentu (sabuk hijau).

- b. Indeks Performance Hutan, nilai indeks pada areal yang tidak mengalami perubahan pada periode tertentu diberi nilai 50.
- c. Indeks Kondisi Habitat terdiri dari indeks stadia tiang dan indeks stadia pohon.
- d. Indeks Konservasi Badan Air terdiri dari tutupan hutan buffer dan indeks konservasi badan air.
- e. Indeks Kondisi Tutupan Tanah

Adapun program atau kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan diantaranya adalah :

a. Melaksanakan sosialisasi dan workshop sekolah Adiwiyata, Pada tahun 2019 jumlah sekolah Adiwiyata sebanyak 32 sekolah dan telah dilakukan sosialisasi serta pembinaan peningkatan kapasitas sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dari tingkat SD, SMP dan SMA yang ada di Kota Jambi, hingga memperoleh penghargaan yaitu sekolah Adiwiyata Nasional dan sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2019 berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1037/MENLHK/P2SDM/SDM.2/12/2019 tanggal 06 Desember 2019 dan penetapan sekolah Adiwiyata tingkat Kota Jambi pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan SK Walikota Jambi Nomor 386 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019.

No	Nama	Tingkat	Sekolah Penerima
	Kejuaraan/Kegiatan	Kejuaraan/Kegiatan	Penghargaan
1	Sekolah Adiwiyata Mandiri	Mandiri	1. SD Negeri 60 /IV Kota Jambi

	lo	Nama	Tingkat	Sekolah Penerima
IN	10	Kejuaraan/Kegiatan	Kejuaraan/Kegiatan	Penghargaan
,	1	Sekolah Adiwiyata Kota	Kota Jambi	1. MIS Nurul HIdayah Kota Jambi 2. SD Islam Al Falah 1 Kota Jambi

3. SD Islam Al
Falah 2 Simp
Kawat Kota
Jambi
4. SDN 3 / IV Kota
Jambi
5. SDN 44 / IV
Kota Jambi
6. SDN 95 / IV
Kota Jambi
7. SDN 99 / IV
Kota Jambi
8. SDN 118 / IV
Kota Jambi
9. SDN 199 / IV
Kota Jambi
10. SDN 43 / IV
Kota Jambi
11. SDN 10 / IV
Kota Jambi
12. MIN Kota
Jambi
1. MTS N 3 Kota
Jambi
2. SMP N 11 Kota
Jambi
1. Man 2 (Man
Model) Kota
Jambi

a. Kegiatan penataan (ulang) taman yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) taman, yaitu : (1) Penataan Taman Auduri (Lanjutan); (2) Penataan Taman Lingkungan Perumnas Kota Baru (Lanjutan); (3) Penataan Taman Simpang Beringin (Lanjutan); (4) Penataan Taman Simpang Tanjung (Lanjutan); (5) Penataan Taman Simpang Danau Teluk (Lanjutan); (6) Penataan Taman Bulken (Lanjutan); (7) Penataan Taman Kongkow (Lanjutan); (8) Penataan Taman Pasir Panjang (Lanjutan); (9) Penataan Taman

- Tugu Kirab Remaja (Lanjutan); (10) Penataan Taman JI. RB. Siagian (Lanjutan); (11) Penataan Taman Tugu Keris Siginjai (Lanjutan).
- b. Pembangunan taman baru pada tahun 2019 sebanyak 5 (lima) unit taman yaitu Taman Villa Kenali, Taman Genbi, Taman Simpang 4 Purnama, Taman RT. 32 Kenali Asam Bawah, Taman Simpang Masjid Nurdin Hasanah.
- c. Kegiatan Proklim (Pragram Kampung Iklim) tahun 2019 telah dilaksanakan berupa penyuluhan dan pembinaan. Penyuluhan dilaksanakan di 5 kecamatan dalam Kota Jambi, dan pelaksanaan Penyuluhan pada 5 kelurahan. Lokasi Kelurahan yaitu Kelurahan Beringin, Talang Bakung, Penyengat Rendah, Kenali Asam atas dan Kebun Handil. Pada tahun 2018 kampung iklim di Kelurahan Talang Jauh mendapatkan katagori pratama dan kampung iklim di Kelurahan Mudung Laut katagori Madia dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sedangkan untuk tahun 2019 kampung iklim di Kelurahan Kenali Asam Atas mendapatkan katagori Pratama dan kampung iklim di Kelurahan Talang Bakung mendapatkan katagori Madia.
- d. Pendataan profil keanekaragaman hayati Kota Jambi di Hutan Kota M. Sabki mempunyai manfaat dan nilai penting, antara lain: terkumpulnya data dasar mengenai keanekaragaman hayati Kota Jambi di Hutan Kota M. Sabki dan sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, penyusunan strategi, dan rancang tindak pengelolaan keanekaragaman hayati di Kota Jambi.

SASARAN 8 MENINGKATNYA PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAYANAN PERDAGANGAN

Sasaran yang kedelapan yaitu meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan.

Tabel 3.10. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 8 (Kedelapan) Tahun 2019

	NO SASARAN INDIKATOR KINERJA		IVATOR	ANGKA	% CAPAIAN 2018		2019		TARGET AKHIR
NO				AWAL RPJMD		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	14.	Persenta se pembina an, pengawa san dan pelayan an perdagan gan	20,00%	20,00%	36,00%	63,34%	175,94	100,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				20,00%		63,34%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Sasaran ke delapan dengan 1 (satu) buah IKU ini dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dengan target 36,00% terealisasi sebesar 63,34% atau dengan capaian 175,94% dengan kategori SANGAT TINGGI, dengan cara pengukuran jumlah realisasi seluruh indikator sasaran strategis yang mendukung urusan perdagangan pada Renstra tahun pelaksanaan (tahun n) terdiri dari:

 Persentase realisasi retribusi
 Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksanaan operasional perpasaran Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu (1) Pencetakan karcis retribusi pelataran, digunakan sebagai bukti pembayaran retribusi dan PKL (2) Pencetakan blanko setoran retribusi perpasaran, digunakan sebagai bukti pembayaran retirubusi (3) Pencetakan kartu control pedagang, digunakan sebagai sarana pengawasan pembayaran retribusi. Yang menjadi fokus kegiatan ini adalah memperoleh PAD dari sektor retirubsi pasar dengan formulasi pengukuran target PAD sebesar 4.100 M dibandingkan dengan realisasi PAD sebesar 4,186 M dengan capaian 101.00%
- b. Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk
 Bentuk aksi yang dilakkan dalam kegiatan ini adalah mempersiapkan lokasi pasar bedug untuk masyarakat Kota Jambi dengan target 2 (dua) lokasi pasar bedug terealisasi 2 (dua) lokasi yaitu Jl. Leimena dan Jl. Mr. Assat. Dengan capaian 100,00%
- Persentase pasar yang bersih dan tertib
 Untuk implementasi pencapaian indikator sasaran ini di dukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran Bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan kebersihan pasar pada pasar-pasar milik pemerintah daerah yaitu pasar induk talang gulo, pasar talang banjar, pasar aur duri, pasar olak kemang, pasar TAC, pasar kebun handil dan pasar mayang sari. Target indikator di tahun 2019 sebanyak 8 unit pasar terealisasi sebanyak 8 unit pasar dengan capaian 100,00%.
 - Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL
 - Dengan indikator jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban. Bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan

kebersihan pasar pada pasar-pasar milik pemerintah daerah yaitu pasar induk talang gulo, pasar talang banjar, pasar aur duri, pasar olak kemang, pasar TAC, pasar kebun handil dan pasar mayang sari. Target indikator di tahun 2019 sebanyak 8 unit pasar terealisasi sebanyak 8 unit pasar denagan capaian 100,00%.

- 3. Persentase pelaku usaha formal dalam pengawasan Untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai kota jasa dan perdagangan maka pelaku usaha formal dalam pengawasan ini dijadikan indikator mengukur ketercapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Indikator sasaran pelaku usaha formal maksudnya adalah pelaku usaha yang memenuhi kelengkapan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tugas pokok dan fungsi pada urusan perdagangan dan perindustrian. Untuk implemnetasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 di dukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa Dengan indikator jumlah pelaku usaha formal barang dan jasa yang beredar dalam pengawasan. Adapun bentuk aksi yang dilakukan, yaitu:
 - Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Talang Banjar setiap hari
 - 2) Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Aur Duri sebagai pembanding harga sembako setiap minggu
 - Melakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Handil setiap minggu
 - 4) Melaksanakan pasar murah dan bazar di bulan Ramadhan
 - 5) Melakukan pemantauan harga barang penting setiap bulan
 - 6) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait perihal kelangkaan ketersediaan kebutuhan pokok

7) Melakukan pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok di pasar rakyat menyambut perayaan hari-hari tertentu

Realisasi capaian inikator kinerja kegiatan ini di tahun 2019 dari target sebesar 150 pelaku usaha terealisasi 150 pelaku usaha dengan capaian 100,00%.

b. Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan

Adapun bentuk aksi yang dilakukan pada tahun 2019 yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan pelaku usaha terhadap pelaku usaha
- 2) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha minol tertang Permendag Nomor 20/M-dag/Per/2014 tentang Laporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol
- Melakukan pembinaan dan penagwasan terhadap isi dari sarana perdagangan (gudang) yang sesuai dengan legalitas yang dimilikinya
- 4) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap toko swalayan dan pusat perbelanjaan di dalam Kota Jambi terhadap kemitraan UMKM
- 5) Melakukan peninjauan lokasi terhadap sarana perdagangan dalam penerbitan rekomendasi terkait klasifikasi usaha tertentu
- 6) Melakukan pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok di gudang terhadap komoditi beras, tepung, minyak kemasan dan kacang kedelai sebelum menyambut perayaan hari-hari tertentu.

Pelaku usaha yang dalam pembinaan dan pengawasan dengan target 122 pelaku usaha terealisasi 122 pelaku usaha dengan capain 100,00%.

 Persentase UTTP yang ditera tera ulang
 Berdasarkan data yang dimiliki ditargetkan tahun 2019 UTTP yang sudah ditera tera ulang mencapai 600 unit. Untuk implemntasi pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2019 didukung oleh 1 (satu) kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetereologian dengan indikator jumlah UTTP yang ditera tera ulang dengan formulasi target UTTP yang di tera tera ulang sebesar 1.170 UTTP terealisasi sebesar 5.729 UTTP dengan capaian 489,66%

- 5. Persentase pelaku usaha perdagangan yang dibina Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan, dengan indikator jumlah pelaku usaha mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan dengan target pelaku usaha yang mengikuti pelatihan, sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan sebanyak 118 pelaku usaha terealisasi 135 pelaku usaha dengan capaian 114,40%.
- 6. Persentase sarana dan prasarana perdagangan Untuk impelementasi pencapaian indikator kinerja ini adalah 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan sarana dan prasarana perdagangan dan industri, dengan indikator persentase sarana dan prasarana perdagangan seperti pembangunan atau rehabilitasi fisik antara lain berupa pemeliharaan gedung pasar sebanyak 22 unit pasar, pengecatan rumah kemasan sebanyak 1 paket dan pembangunan utilitas pasar aur duri sebanyak 1 paket dengan capaian 100,00%.

dibagi dengan jumlah seluruh sasaran yang mendukung urusan perdagangan pada renstra tahun pelaksanaan (tahun n) sebanyak 6 sasaran di kali 100%, hasilnya 63,34%.

SASARAN 9 MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN

Sasaran kesembilan adalah meningkatnya ketahanan pangan yang dalam pelaksanaannya Prioritas pembangunan yang kelima adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi.

Tabel 3.11.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 9 (Kesembilan) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		ANGKA	%			TARGET AKHIR	
	STRATEGIS		NERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	15.	Skor pola pangan harapan	87,90%	87,90%	90,59%	90,70%	100,12%	92,50%
	RATA-RATA % CAPAIAN				87,90%				

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Sasaran meningkatnya ketahanan pangan menetapkan 1 (satu) IKU yaitu skor pola pangan harapan dengan target 90,50% terealisasi sebesar 90,70% dengan capaian 100,22% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana data bersumber dari data primer melalui pengambilan data kuesioner ke 11 kecamatan dan data sekunder (berdasarkan SUSENAS) tapi data ini dipublikasikan pada awal tahun berikutnya. Data diambi adalah data konsumsi rumah tangga dengan sistem RECALL yang pelaksanaannya dilakukan 1 hari sebelumnya.

Cara pengukurannya dimana rumus telah ada pada sistem aplikasi Harmonisasi Penghitungan Skor Pola Pangan (PPH) yang merupakan aplikasi dari kementerian Pertanian. Adapun datanya berikut:

SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL BERDASARKAN SURVEI KONSUMSI PANGAN TAHUN 2019 KOTA JAMBI

				Perhit	ungan Sk	or Pola Pa	ngan Ha	rapan (P	PH)	
No	Kelompok Pangan	Kalori	%	% AKE *)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Gap Skor AKE dan Skor Maksimal	Skor PPH
1.	Padi- padian	1130,7	51,7	52,6	0,5	25,8	26,3	25,0	1,3	25,0
2.	Umbi- umbian	105,8	4,8	4,9	0,5	2,4	2,5	2,5	0,0	2,5
3.	Pangan Hewani	284,4	13,0	13,2	2,0	26,0	26,5	24,0	2,5	24,0
4.	Minyak dan Lemak	222,4	10,2	10,3	0,5	5,1	5,2	5,0	0,2	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	29,8	1,4	1,4	0,5	0,7	0,7	1,0	-0,3	0,7
6.	Kacang- kacangan	71,0	3,2	3,3	2,0	6,5	6,6	10,0	-3,4	6,6
7.	Gula	112,5	5,1	5,2	0,5	2,6	2,6	2,5	0,1	2,5
8.	Sayur dan Buah	105,0	4,8	4,9	5,0	24,0	24,4	30,0	-5,6	24,4
9.	Lain-lain	126,3	5,8	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2188,0	100,0	101,8	11,5	93,1	94,7	100,0		90,7

Keterangan =

*) Angka Kecukupan 2150,0

Kkal/Kap/Hari

Energi (AKE) : Analis

Analisis penyebab keberhasilan/peningkatan kinerja adalah dukungnan pelaksnaan anggaran untuk kegiatan tersedut tersedia, data konsumsi rumah tangga tersedia, adanya dukungan dari masyarakat untuk memberikan data konsumsi rumah tangga, meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat sedangkan faktor –faktor yang mendorong keberhasilan diantaranya terlaksananya sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan Aman (B2SA), terlaksananya sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, tersedianya kawasan rumah pangan lestari (KPPL)/P2L, adanya petugas survey analisis

pola konsumsi yang sudah terlatih dan tersedianya responden yang kooperatif.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yang sudah dilaksankan di Kelompok Wanita Tani (KWT) sedangkan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan yaitu skor pola pangan harapan merupakan IKU Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi dengan target sebesar 90,50%, terealisasi sebesar 90,70% atau dengan capaian 100,22% masuk **SANGAT** TINGGI dikarenakan kategori adanya pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Semakin besar capaian pola pangan harapan konsumsi pangan maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan masyarakat sehingga capaian kinerja semakin baik.

SASARAN 10 MENINGKATKAN KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PDRB

Sasaran selanjutnya adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 10 (Kesepuluh) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	%			TARGET AKHIR	
	STRATEGIS				CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	16.	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,36%	2,36%	2,37%	2,38%	100,24%	2,41%
	RATA-RATA % CAPAIAN				2,36%			100,24%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Sasaran ke 10 (sepuluh) meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menetapkan 1 (satu) IKU yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB dengan target 2,37% terealisasi sebesar 2,38% dengan capaian 100,24% masuk kategori **SANGAT TINGGI**. Hal berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan oleh BPS bahwa kontribusi pariwisata terhadap PDRB Kota Jmabi sebesar 2,38% di hitung dari prosentase PDRB pada sektor akomodasi dan makan minum ada kenaikan sebear 0,01% dari target yang telah ditetapkan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi tahun 2019 menargetkan kunjungan wisatawan sebanyak 450.000 orang. Sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Jambi sebesar sekitar 637.598 orang atau mengalami peningkatan sebesar 141% dari target. Jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan jumlah kunjungan tamu hotel selama tahun 2019 di Kota Jambi. Rata-rata lamanya hari kunjungan wisatawan di Kota Jambi di hitung dari lamanya tinggal wisatawan di Kota Jambi. Hal ini dari jumlah rata-rata tamu yang menginap selama3 (tiga) hari. Adapun jumlah hotel yang berinvestasi di Kota Jambi adalah hotel bintang 5 sebanyak 1 hotel, hotel bintang 4 sebanyak 4 hotel, hotel bintang 3 sebanyak 2 hotel, hotel bintang 1 sebanyak 3 hotel dan hotel melati sebanyak 85 hotel.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan adalah program dan kegiatan telah dianggarkan di dalam dokumen penggunaan anggaran (DPA) perangkat daerah tahun 2019, adanya komitmen pimpinan dimana Walikota Jambi memberikan dukungan suport yang sangat tingga terhadap kemajuan kepariwisataan dan kebudayaan Kota Jambi, adanya dukungan stakeholder pariwisata, dan instansi terkait seperti dari para penggiat pariwisata, pelaku seni dan budaya serta dari pengelola dan pemilik usaha pariwisata serta dari instansi pemerintah baik instansi vertikal, provinsi dan Pemerintah Kota Jambi. Lebih lanjut adanya peran serta masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut seperti memberikan suport dalam mendukung setiap kegiatan atau even yang dilaksanakan selalau ramai meriah dan tidak pernah terjadi hambatan dan kekacauan semuanya berjalan dengan lancar dan tertib.

Adapun yang menjadi faktor penyebab kegagalan, adalah masih kurang maksimalnya koordinasi dan dukungan stakeholder pengelola usaha pariwisata di Kota Jambi, masih kurangnya perencanaan penganggaran pada kegiatan dan keterbatasan alokasi anggaran yang diperuntukkan.

SASARAN 11

MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sasaran kesebelas terkait meningkatkan pendapatan asli daerah yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Tabel 3.13.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 11 (Kesebelas) Tahun 2019

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	%		TARGET AKHIR		
NO					CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
11.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	17.	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	4,00%	4,00%	8,00%	16,09%	201,13%	9,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				4,00%				

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Sasaran ke 11 (sebelas) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) menetapkan 1 (satu) IKU yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target 8,00% terealisasi 16,00% dengan capaian 201,13% termasuk kategori SANGAT TINGGI. Faktor pendukung adalah realisasi tahun ini sebesar Rp. 393.429.595.383,99 dikurangi dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 338.891.882.592,96 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 338.891.882.592,96 dengan capaian 201,13%.

Memperhatikan realisasi PAD yang terjadi di tahun 2019 sebesar Rp. 393.429.595.383,99 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2019 sebesar Rp. Rp 364. 8% 142.193.000,00 (kenaikan sebesar dari tahun 2018 Rp. 338.891.882.593,00) sudah tidak relevan lagi. Dalam penetapan target peningkatan PAD tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 adalah sebesar 13% 338.891.882.593,00 atau dari Rp. meningkat menjadi Rp. 381.743.685.000,00.

Peningkatan target PAD tahun 2019 dari 8% di dalam RPJMD menjadi 13% dihasilkan dari perubahan target pada komponen-komponen PAD yaitu peningkatan target pajak yang semula meningkat 9,5 % menjadi 19%, retribusi yang semula 6% menjadi 2%, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan yang semula 1% menjadi 9%, dan lain-lain PAD yang sah yang semula 7 % menjadi 6%.

Adapun Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil-hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah berikut :

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2018	2019	PENINGKATAN %
1.	Pajak Daerah	215.444.388.499,00	255.915.037.458,55	18,78
2.	Retribusi Daerah	40.389.059.087,09	38.540.603.597,06	-4,58%
3.	Hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.854.962.599,49	9.783.144.576,94	10,48%
4.	Lain-lain PAD yang sah	74.203.472.407,38	89.190.809.751,44	20,20%

Dari tabel diatas terlihat bahwa Penyumbang terbesar realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah dari sektor Pajak Daerah sebesar Rp. 255.15.037.458,55 dengan peningkatan sebesar 18,78% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp.89.190.809.751,44 dengan Peningkatan sebesar 20,20%.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber Penerimaan Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan Pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sumber sumber Penerimaan Daerah yang bersifat Potensial. Dalam rangka upaya mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai Pengkoordinir Penghasil PAD khususnya dalam bidang Pajak. Adapun faktor pendukung Keberhasilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi yaitu :

 Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah yang berbasis Teknologi Informasi.
- 3. Pembenahan Data Base Wajib Pajak
- 4. Melaksanakan tindakan Pengendalian dan Penagihan Pajak Daerah
- 5. Peningkatan Deposito Pemerintah pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Tahun 2019 Badan Pengelola Pajak dan Reribusi Daerah telah memperluas kemitraan melalui Bank Persepsi dan layanan bayar milik Mitra yaitu Bank BTN, Bank Bukopin, Bank CIMB Niaga, PT.Pos, Bank BNI, Bank OCBC NISP, Bank Pembangunan Daerah Kota Jambi, yang berdampak terhadap realisasi pembayaran pajak tepat waktu.

SASARAN 12 MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI

Sasaran dua belas terkait meningkatkan realisasi investasi yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 11 (kesebelas) dengan melaksanakan Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Tabel 3.14. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 12 (dua belas) Tahun 2019

NO STE	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018		TARGET AKHIR		
	STRATEGIS					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
12.	Meningkatkan realisasi investasi	18.	Realisasi investasi	410 M	410 M	430,5 M	1.055. T	245,12%	523,37 M
	RATA-RATA % CAPAIAN				410 M			245,12%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)



Indikator Kinerja
Utama Realisasi Investasi
yang dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kota
Jambi menetapkan target

sebesar 430,5 M pada tahun 2019, terealisasi sebesar 1.055 Triliun, persentase capaian sebesar 245,12% persen masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Data pendukungnya adalah sebanyak 45 perusahaan membuat yang sudah memenuhi syarat komitmen berupa rekomendasi perizinan telah membuat laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang didaftarkan melalui aplikasi OSS pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, dimana aplikasi tersebut terkoneksi ke Badan Koordinator Penanaman Modal dan laporan dari 45 perusahaan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinator Penanaman Modal.

Selain itu secara berkala terus dilaksanakan bimbingan teknis dan kegiatan turun ke lapangan dikarenakan masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui cara penginputan pada aplikasi OSS terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Adapun kegiatan ini bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan investasi serta memberikan *multiplayer effect* positif bagi perekonomian daerah.

Pelayanan Perizinan pada DPMPTSP Kota Jambi adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang modal. penanaman

perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan, bina marga dan lingkungan hidup, komunikasi, dan informasi serta perhubungan.

Data Izin yang diterbitkan Tahun 2019

No.	Dokumen Izin yang Terbit	Jumlah
1.	Dokumen Izin Usaha Baru	6.214
2.	Dokumen Izin IMB	3.672
3.	Dokumen Izin Registrasi	4.438
4.	Dokumen Izin IMB RTGL	3.104
5.	Dokumen Izin Usaha Lainnya	1.941
6.	Dokumen Izin Usaha Perawat dan sejenisnya	601
	TOTAL	19.970

Berdasarkan data diatas, adapun data izin yang diterbitkan tahun 2019 yaitu izin usaha baru sebanyak 6.214 dokumen, izin registrasi sebanyak 4.438 dokumen, izin usaha lainnya sebanyak 1.941 dokumen, izin usaha perawat dan sejenisnya sebanyak 601 dokumen dan izin mendirikan bangunan sebanyak 3.672 dokumen.

Hasil laporan dari pelaku usaha triwulan I s/d III tahun 2019 angka capaian realisasi investasi tahun 2019 Rp. 1.055.269.443.825 tersebut diterima melalui akumulasi LKPM Online yang telah disetujui oleh BKPM Pusat sebanyak 280 perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dan Jasa Industri yang sudah diiverifikasi oleh BKPM Pusat.

Rumusan Indikator dan formulasi Perhitungan Tahun 2019

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
Target Realisasi Investasi (Renstra/RPJMD		430.500.000.000	

Realisasi Investasi	317.734.437.285	1.055.269.443.825	
Peningkatan Realisasi Investasi		232 %	Realisasi Investasi 2019 – Realisasi Investasi 2018 x 100%
Capaian Target Realisasi		245,13%	Realisasi Investasi 2019 x 100% Realisasi Investasi Target

Rencana Investasi di Kota Jambi Tahun 2019

NO.	BULAN	JUM-	JUM-	JUMLAH INVESTASI	TOTAL MODAL		
NO.	BOLAIN	TKI-L TKI-P		(Rp)	TOTAL MODAL		
1.	Januari	797	1.016	4.516.899.406.463	61.827.000.000		
2.	Februari	1.298	1.041	927.376.760.698	57.313.460.000		
3.	Maret	1.596	1.563	6.813.473.355.459	67.354.325.000		
4.	April	993	382	2.620.572.147.181	50.496.500.000		
5.	Mei	28	17	7.891.032.000	2.177.750.000		
	Jumlah	4.712	4.019	14.886.212.701.801	239.169.035.000		

Sumber data : sistem OSS dari investor diatas Rp.500.000.000

Rencana tabel Investasi diatas pada bulan Januari s/d bulan Mei tahun 2019 data melalui OSS dengan menggunakan OSS Versi 1.0 dari data perusahaan yang OSS dan NIB yang bisa Online waktu itu karena OSS masih berada dalam Lingkup Kementerian Perekonomian. Sedangkan untuk bulan mei s/d desember OSS tersebut telah berubah menggunakan Versi 1.1 namun data perusahaan OSS dan NIB tersebut tidak bisa diakses (Online) maupun di Unduh karena aplikasi tersebut untuk sementara masih dalam transisi yang akan dialihkan dari Kementerian Perekonomian ke BKPM RI Pusat.

SASARAN 13 MENINGKATKAN PENYERAPAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

Sasaran ke 13 (ketiga belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,Koperasi dan UKM Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019 melakukan upaya untuk mewujudkan sasaran ke 13 (ketiga belas) dengan melaksanakan Program Peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja.

Tabel 3.15.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 13 (tiga belas) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018		TARGET AKHIR		
						TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	19.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,96%	64,96%	65,00%	65,79%	101,21%	66,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				64,96%			101,21%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ke 19 (kesembilan belas) ditargetkan poada tahun 2019 sebesar 65,00% terealisasi sebesar 65,79% dengan capaian 101,21% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Adapun formulasi pengukuran jumlah angkatan kerja sebesar 297.290 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja sebesar 451.865 orang sehingga capaian tercatat sebesar 65,79%, capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan Pencapaian indikator ini didukung oleh program peningkatan kualitas, perlindungan dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki 2 (dua) indikator yaitu:

1. Persentase tenaga kerja yang terdaftar yang dilatih dan ditempatkan

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama

Pengukuran capaian indikator program ini adalah jumlah angkatan kerja sebanyak 297.290 orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebanyak 451.865 orang. Jadi capaian indikator program sebesar 65,79% melampui target sebesar 65,00%.

Tingkat Partisipasi Angakatan Kerja (TPAK) merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Secara umum , apabila tingginya TPAK disebabkan oleh tingginya jumlah penduduk yang berkerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik.

Dari angka capaian indikator kinerja sasaran sebesar 65,79%, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja. Artinya keterlibatan tenaga kerja secara aktif dalam perekonomian meningkat. Peningkatan ini akan memberikan nilai positif bila diringi dengan meningkatnya tingkat kesempatan kerja (jumlah penduduk yang bekerja dibanding jumlah angkatan kerja).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian sasaran dan program diatas, yaitu :

- 1. Bertambahnya penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang berstatus bukan angkatan kerja (ibu rumah tangga, pelajar, penerima pendapatan) yang terjun dan terlibat langsung untuk mencari nafkah.
- 2. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang penempatan tenaga kerja pada tahun anggaran 2019, memiliki kontribusi langsung kepada pencari kerja dalam meningkatkan pengetahuan/keahlian sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja, meskipun jumlah tenaga kerja yang terdaftar belum sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, hal ini dikarenakan masih kurangnya anggaran untuk menambah quota jumlah peserta pelatihan dan masih kurangnya jumlah

- posisi lowongan kerja yang diminati oleh para pencari kerja.
- 3. Pembinaan dan evaluasi secara berkala bagi pencari kerja yang telah mengikuti pelatihan dan yang telah ditempatkan sesuai dengan lowongan kerja yang diinformasikan, sehingga dapat diketahui sejauh mana para pencari kerja tersebut mampu memaksimalkan keahlian dan kesempatan yang dimiliki untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri sebagai sumber penghasilannya.

SASARAN 14 MENINGKATKAN DAYA SAING USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL

Sasaran ke 14 (keempat belas) terkait meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja,Koperasi dan UKM Kota Jambi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019.

Tabel 3.16. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 14 (empat belas) Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	% CAPAIAN 2018		TARGET AKHIR		
	STRATEGIS					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil	20.	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61%	7,61%	8,08%	8,08%	100,00%	10,00%
		21.	Persentase daya saing produk IKM	4,30%	4,30%	4,30%	19,30%	448,8%	8,3%
		22.	Persentase koperasi berkualitas	13,00%	13,00%	16,06%	16,50%	102,73%	36,70%
RATA-RATA % CAPAIAN					8,30%			217,17%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

IKU kedua puluh menetapkan persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dengan target 8,08% terealisasi 8,08% dengan capaian sebesar 100,00% termasuk kategori **SANGAT TINGGI**. Pengukuran pencapaian persentase usaha mikro kecil yang berkualitas yaitu jumlah UKM berkualitas sebanyak 870 UKM dibandingkan dengan jumlah UKM sebanyak 10.763 UKM. Dan realisasi capaian sebesar 8,08%, artinya hal ini memenuhi target yang telah ditetapkan. Usaha mikro krcil dapat dikategorikan berkualitas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1. Memiliki kelengkapan izin usaha dan sertifikat kelayakan usaha lainnya
- Memiliki tempat usaha dan kelengkapan sarana dan prasarana usaha yang memadai
- 3. Mempunyai modal usaha dan telah melaksanakan manajemen pembukuan usaha
- 4. Telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen usaha dan memiliki rencana kerja
- 5. Mampu mengembangkan produk dan pemasaran produk
 Pencapaian indikator ke 20 di dukung oleh program pengembangan sistem
 pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, dengan indikator
 program persentase usaha mikro menjadi usaha kecil.

Adapun faktor-faktor yang mendorong keberhasilan capaian indikator sasaran dan indikator program diatas, yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha kecil menengah, baik pelatihan, pemberian bantuan peralatan usaha hingga kegiatan promosi dimana kegiatan-kegiatan tersebut memang diharapkan mampu memotivasi para pelaku Usaha Kecil Menengah untuk meningkatkan kualitas dan keragaman inovasi produk yang dihasilkan sehingga mampu bersaing dipasaran, hal ini tentu akan mempermudah pelaku usaha mikro mengembangkan skala usahanya menjadi usaha kecil.

Menurut pasal 6 UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, kriteria pengelompokan tersebut, yaitu :

a) Usaha Mikro

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b) Usaha Kecil

- Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000,000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 2. Pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaku usaha kecil menengah yang telah diberi pelatihan, bantuan peralatan usaha dan diikutsertakan dalam kegiatan promosi, untuk mengetahui sejauh mana para pelaku usaha kecil menengah tersebut mampu memaksimalkan pengetahuan dan bantuan yang diperoleh untuk mengembang usahanya. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi dalam upaya tersebut, dapat diberi arahan untuk mencari solusi yang mungkin dapat dilakukan.
- Motivasi dan kesadaran dari para pelaku usaha mikro kecil untuk dapat mengembangkan usahanya, yang sekaligus berdampak pada tingkat perekonomian mereka.

DATA UMK PER JENIS USAHA KOTA JAMBI TAHUN 2019

No	Kecamatan	Rekapitulasi UMKM	UMKM PERBIDANG USAHA											
			Kuliner	Fashion	Pendi dikan	Otomotif	Ojek	PKL	UMKM Yang Menjadi Anggota Koperasi	Ag ro	ті	Jasa/ Kreatifitas	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Telanaipura	1.195	452	60	-	42	292	53	88	1	63	144	1.195	
2	Jambi Selatan	847	499	55	-	26	124	162	52	4	17	92	1.031	
3	Jambi Timur	1.423	575	38	1	57	125	206	193	-	19	209	1.423	
4	Pasar Jambi	929	406	108	-	15	-	228	-	4	9	159	929	
5	Pelayangan	601	281	60	-	7	72	61	91	2	8	33	615	
6	Danau Teluk	656	401	69	-	3	-	98	31	-	3	51	656	
7	Kota Baru	736	242	55	-	39	251	56	18	-	11	64	736	
8	Jelutung	553	111	40	-	8	66	207	35	-	3	83	553	
9	Alam Barajo	1.116	435	63	-	42	-	109	-	-	19	264	932	
10	Danau Sipin	1.592	742	106	-	30	-	346	-	-	35	319	1.578	
11	Paal Merah	1.115	490	87	-	52	-	231	-	5	22	228	1.115	
	Jumlah	10.763	4.634	741	1	321	930	1.757	508	16	209	1.646	10.763	

IKU ke 21 (dua puluh satu) persentase daya saing produk IKM, dengan target 4,30% terealisasi 19,30% dengan capaian 448,8% termasuk kategori SANGAT TINGGI. Adapun formulasi pengukuran realisasi indikator kinerja sasaran (tahun n) dibagi target indikator kinerja sasaran (tahun n) yang didukung oleh urusan perindustrian dengan menggunakan 2 indikator kinerja dan diwujudkan oleh program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan industri dan perdagangan, yaitu:

1. persentase IKM yang di bina

Dalam mewujudkan sukses atau tidaknya suatu IKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IKM. Pelaku usaha IKM merupakan salah satu variabel dalam pencapaian Kota Jambi menjadi kota jasa dan perdagangan Dengan baiknya IKM yang dibina sehingga mampu mewujudkan menjadi IKM yang mandiri dapat menunjukkan peran pemerintah sangat penting. Untuk implementasi di dukung dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan pembinaan dan pengembangan dan peningkatan industri kimia, agro, dan hasil hutan
 Bentuk aksi dari dari kegiatan ini pelatihan home industri pembuatan makanan aneka kue basah dan kering untuk anggota P2WKSS sebanyak 50 orang. Adapun target dari kegiatan ini adalah 50 unit IKM dibagi dengan realisasi sebanyak 50 Unit IKM tercapai 100,00%.
- b. Kegiatan pembinaan pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika, dan aneka kerajinan
 Bentuk aksi dari kegiatan ini adalah pelatihan kerajinan kayu sebanyak 11 (sebelas) orang. Adapun target kegiatan tersebut sebanyak 13 unit IKM terealisasi sebanyak 11 unit IKM tercapai 84,61%.
- c. Kegiatan peningkatan pengembangan SDM industri kecil dan menengah Bentuk aksi dari kegiatan ini berupa pemberian pelatihan achevement motivation training (AMT) untuk SDM IKM yang terdapat di Kota Jambi, dimana ditargetkan sebanyak 40 unit IKM terealisasi 40 unit IKM tercapai 100,00%.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil menengah Pada kegiatan ini bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan diklat BTP/BTM yang dimana dalam emeproduksi akan menggunakan bahan-bahan baku yang dilarang. Pada kegiatan ini ditargetkan sebesar 40 unit IKM terealisasi sebesar 40 Unit IKM dengan capaian 100,00%.

- e. Kegiatan pembentukan kelembagaan industri kecil dan menengah Bentuk aksi yang dilakukan yaitu melaksanakan pelatihan manajemen kelompok dan usaha sindustri selama 3 hari yang diikuti oleh 30 orang. Capaian kinerja ini adalah 100,00% dengan target 30 Unit IKM terealisasi 30 unit IKM.
- 2. persentase IKM yang bermitra.

IKM yang sukses dan mandiri merupakan salah satu penunjang atau penipang tercapainya visi dan misi Walikota menjadikan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa terutama di Provinsi Jambi, sehingga kemampuan membina dan memfasilitasi IKM menjadi hal yang sangat urgen oleh karena itu IKM dijadikan indikator dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Untuk implementasi pencapaian indikator kinerja di dukung oleh 3 (tiga) kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM Bentuk aksi yang akan dilaksanakan antara lain cetak stiker dan konsultasi kemasan. Adapun target dari kegiatan tersebut sebesar 57 unit IKM terealisasi sebesar 258 unit IKM, maka capaian indikator kinerja 453,63%
- b. Kegiatan ekspose industri kecil dan menengah Bentuk aksi yang dilakukan yaitu bazar dan lomba, mengikuti pameran, fashion, magang pengrajin. Adapun target dari kegiatan tersebut 57 unit IKM terealisasi 58 unit IKM dengan capaian 101,75%
- c. Kegiatan promosi/pameran produk Jambi
 Bentuk aksi yang dilakukan yaitu membawa unit IKM mempromosikan hasil produknya ke tempat pameran. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bertujuan mengembangkan ekonomi berbasis potensi daerah, memberikan peluang bagi IKM untuk

berinteraksi langsung dengan para pengunjung/customer/buyer, mengajak masyarakat mencintai seni budaya dan produk Kota Jambi, mempromosikan produk unggulan daerah dan kerajinan nusantara sehingga membuka lapangan kerja dan kesempatan investasi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 11 peserta unit IKM. Indikator kinerja dari target sebesar 10 unit IKM terealisasi sebesar 11 unit IKM dengan capaian 110,00%.

Maju atau mundurnya perkembangan koperasi, dipengaruhi oleh keaktifan para anggota, profesionalitas pengurus dan pembinaan dari pemerintah. Ketiga hal ini harus sejalan agar perkembangan suatu koperasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, guna meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Sebagai salah satu gerakan ekonomi kerakyatan yang turut memberi andil dalam peningkatan ekonomi suatu wilayah, koperasi diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, untuk itulah pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kota Jambi berupaya meningkatkan kualitas koperasi binaan melalui program dan kegiatan-kegiatan di tahun 2019, yang merupakan kesinambungan dari tahun anggaran sebelumnya. Pencapaian indikator sasaran dan indikator program oleh bidang perkoperasian ini, di dorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 memberikan manfaat langsung kepada gerakan koperasi binaan, baik kepada anggota, pengurus maupun pengawas. Adapun sub-sub kegiatan dalam kegiatan ditahun 2019, yaitu :
 - Penyuluhan tentang sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota tentang hak dan kewajiban sebagai anggota, serta peran pengurus dan pengawas. Dalam kegiatan ini menggunakan alat peraga/simulasi, sehingga para anggota diajak berperan aktif sehingga lebih

memahami materi yang disampaikan.

- Memberikan pelatihan kepada calon pengurus, pengurus dan pengawas agar dapat mengelola manajemen koperasi dengan baik, dari penyusunan laporan keuangan koperasi secara manual, penyusunan laporan keuangan koperasi melalui aplikasi (SIAKop), bimbingan teknis dan ujian berbasis kompetensi sebagai syarat bagi koperasi untuk mendapatkan nomor induk koperasi (NIK) dari Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Penyelenggaraan hari koperasi tingkat Kota Jambi yang mengundang perwakilan dari setiap koperasi binaan, dimana dalam acara tersebut diadakan beberapa kegiatan, seperti : pemberian hadiah kepada koperasi unggul, pasar murah, dan pemberian hibah barang kepada koperasi berupa alat-alat kelengkapan kantor (Komputer, printer, dan Meja Komputer).
- Memberikan penghargaan kepada pengurus koperasi yang mampu melaksanakan RAT tepat waktu dengan penilaian kesehatan laporan keuangan yang baik, berupa kegiatan sharing informasi keluar kota guna menambah wawasan bagi pengurus untuk lebih baik dalam mengelola koperasinya.
- 2. Pembinaan dan evaluasi secara Pembinaan dan evaluasi secara berkala kepada koperasi yang telah diberi penyuluhan, pelatihan, bantuan peralatan usaha dan diikutsertakan dalam kegiatan sharing informasi, untuk mengetahui sejauh mana koperasi tersebut mampu memaksimalkan pengetahuan, bantuan, dan pengalaman yang diperoleh untuk terus mengembang koperasinya. Sehingga jika ada masalah yang dihadapi dalam upaya tersebut, dapat diberi arahan untuk mencari solusi yang mungkin dapat dilakukan.
- 3. Kesadaran dari para anggota, pengurus dan pengawas untuk bekerjasama dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas

koperasinya, meskipun untuk hal ini masih perlu bimbingan secara berkesinambungan dari pembina, mengingat selalu adanya hal-hal non teknis yang mempengaruhi pasang surut pengelolaan koperasi yang berasal dari intern koperasi itu sendiri.

IKU ke 22 persentase koperasi berkualitas, dengan target sebesar 16,06% terealisasi 16,50% dengan capaian 102,73& termasuk kategori SANGAT TINGGI. Di tahun 2019, jumlah koperasi berkualitas sebanyak 36 koperasi dengan target sebanyak 218 koperasi. Koperasi dikategorikan berkualitas, jika telah memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki sarana kantor dan usaha koperasi
- Tertib administrasi (memiliki buku 16)
- Penyelenggaraan rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, dan/atau rapat gabungan dalam 1 tahun
- Melaksanakan RAT
- Memiliki rencana kerja (RK) dan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi (RAPBK)
- Peningkatan jumlah anggota
- Memiliki dana pendidikan
- Memiliki dana sosial
- Penyelenggaraan audit
- Laporan keuangan yang sehat untuk KSP/USP

			DA	TA JUMLA	H KOPE	rasi per Je	NIS USAH	ia tahun 201	9				
NO	Kecamatan / District	Kotabaru	Alam Barajo	Jambi Selatan	Paal Merah	Jelutung	Pasar Jambi	Telanaipura	Danau Sipin	Danau Teluk	Pelayangan	Jambi Timur	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	KUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kop. Pertanian/Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kop. Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kop. Peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kop. Nelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
6	Kop. Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7	Kopti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Kopra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
9	Kopinkra	-	1			-		-			1		-
10	Koppontren	1	-							1	1		3
11	Kopkar	2	-	-	1	3	3	5	4	-	-	2	20
12	Kop. Angkatan Darat	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	1	8
13	Kop. Angkatan Laut												-
14	Kop. Angkatan Udara												-
15	Kop. Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
16	Kop. Serba Usaha	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
17	Kop. Pasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kop. Simpan Pinjam	2	1	2	3	1	-	4	1	-	-	-	14
19	Kop. Angkutan Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kop. Angkutan Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kop. Angkutan Udara												-
22	Kop. Angkutan Sungai												-
23	Kop. Angkutan Penyeberangan												-
24	Kop. Wisata												-
25	Kop. Telkom												-
26	Kop. Perumahan	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
27	K.B.P.R												-
28	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	23	4	9	3	3	3	30	3	1	-	4	83
29	Kop.Listrik Pedesaan												-
30	Kop. Asuransi Indonesia												-
31	Kop. Wanita	1	2	1	2	1	1	-	2	-	-	2	12
32	Kop. Profesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kop. Veteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kop. Wredatama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kop. Pepabri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36	Kop. Mahasiswa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
37	Kop. Pemuda	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-
38	Kop. Pertambangan												-
39	Kop. Pedagang Kaki Lima	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	2	_
40	Kop. Jamu Gendong												_
41	Kop. Lainnya (Umum, Mesjid)	7	10	2	9	7	5	12	7	2	1	2	64
42	KJKS (BMT)	2	-		1	2		1	_ ′		_ '		6
74		41	18	14	19	18	16	54	18	4	3	17	218
12	Jumlah Kop. Skunder	- 41	- 10	1	- 19	- 10	-	1	10	-	-	-	210
43									40				
	Jumlah	41	18	15	19	18	16	55	18	4	3	17	220

SASARAN 15 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN

Sasaran ke 15 (kelima belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019. Dalam mewujudkan sasaran ke 15 (kelima belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.17.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 15 (lima belas) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		ANGKA	%	2019			TARGET AKHIR
NO	STRATEGIS		INERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,34%	72,34%	72,35%	-	•	72,37%
	RATA-RATA % CAPAIAN			72,34%			=		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ke dua puluh tiga, angka harapan hidup (AHH) dengan target 72,35% belum terealisasi masuk kategori BELUM TERDATA dikarenakan data baru akan dipublikasi oleh Badan Statistik Kota Jambi di bulan Juli tahun 2020.

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2019

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Persentase
1.	Rumah sakit	17	22,6
2.	Puskesmas	20	26,6
3.	Puskesmas Pembantu (Pustu)	38	50,6
	Jumlah	75	33,26

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Pada tahun 2019 fasilitas kesehatan terbanyak di Kota Jambi adalah puskesmas pembantu sebanyak 38 unit atau sebesar 50,6 persen dari total

seluruh fasilitas kesehatan yang ada. Sementara itu fasilitas lainnya adalah rumah sakit sebesar 22,6 persen (17 unit) dan puskesmas sebesar 26,6 persen atau 20 unit.

Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di Kota Jambi Tahun 2018 dan 2019

No	Angka Kematian	2018	2019
1.	Ibu	2	5
2.	Bayi	10	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Dari tabel diatas jumlah kematian ibu tahun 2018 sebanyak 2 orang sedangkan tahun 2019 sebanyak 5 orang, terjadi peningkatan hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dimana penyebab kematian ibu adalah pre eklampsia, eklampsia dan perdarahan.

Faktor penyebabnya bisa dari perilaku ibu pada saat hamil dimana asupan makanan tidak sesuai dengan kebutuhan saat hamil, tablet Fe sudah diberikan tetapi kecukupan tablet Fe tergantung dari kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe tersebut di rumah. Selain itu juga budaya dalam pengambilan keputusan juga mempengaruhi, dimana seharusnya ibu bersalin di rujuk ke rumah sakit tetapi karena menunggu keputusan dari keluarga/suami sehingga terlambat sampai kefasilitas kesehatan/rumah sakit.

Kematian bayi menurun dari tahun 2018, hal ini karena Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu danbayi baru lahir terhadap petugas kesehatan, pelayanan kesehatan ibu bersalin di faskes sesuai standar, pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, pelayanan kesehatan balita sesuai standar.

Sedangkan penyebab kematian bayi karena asfiksia, hal ini terjadi karena anemia pada ibu yang membuat darah tidak dapat membawa oksigen, proses persalinan berlangsung lama, ibu hamil memiliki tekanan darah yang terlalu tinggi atau rendah, saat persalinan berlangsung ibu

dan/atau bayi mengalami infeksi, plasenta lepas dari rahim terlalu cepat mengakibatkan hilangnya oksigen atau bayi terlilit tali pusar.

Pemenuhan Gizi Ibu dan Bayi Di Kota Jambi Tahun 2018 dan 2019

No	Gizi	2018		2019	
		Jumlah	PMT	Jumlah	PMT
1.	Bumil KEK	696	696	146	146
2.	Balita Kurus	722	722	223	223

Sumber data: Dinas Kesehatan Kota Jambi

Dari tabel di atas diketahui jumlah Bumil dpt PMT yang 2018: 696 (100%), balita kurus dpt PMT 146 (100%). Untuk tahun 2019 bumil dpt PMT 722 (100%), balita kurus dpt PMT 223 (100%).

Penurunan jumlah bumil KEK (kekurangan energi kronis) dan Balita kurus anatar atahun 2018 dengan tahun 2019, hal ini disebabkan telah dilaksanakan upaya pemenuhan gizi ibu dan bayi telah dilaksanakan sesuai target yaitu 100 persen. Hal ini dilakukan dengan dilaksanakan kelas ibu hamil di masyarakat sehingga pengetahuan ibu hamil tentang gizi bumil meningkat, dan deteksi dini bumil KEK dilakukan pada saat ANC. Selain itu telah meningkatnya pengetahuan ibu tentang 1000 HPK (seribu hari pertama kehidupan) yakni dengan cara:

- 1. Pemeberian PMT bumil
- 2. Pemberian tablet tambah darah 90 tablet
- 3. Pemberian IMD
- 4. Pemberian ASI ekslusif 0 5 bulan 29 hari bulan
- 5. Pemberian MP ASI usia 6 24 bln.

SASARAN 16 MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESBILITAS PENDIDIKAN

Sasaran ke 16 (keenam belas) terkait meningkatkan derajat kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019. Dalam mewujudkan sasaran ke 16 (keenam belas) didukung oleh program akses dan mutu pelayanan masyarakat.

Tabel 3.18.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 16 (enam belas) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		ANGKA AWAL RPJMD	%		2019		TARGET AKHIR RPJMD 2023
NO	STRATEGIS				CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,25%	14,25%	14,60%	14,62%	100,14%	14,64%
		25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	21,32%	21,32%	21,32%	21,30%	99,91%	4,32%
		26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,68%	10,68%	10,68%	10,68%	100,00%	10,72%
	RATA-RATA % CAPAIAN				15,42%			100,2%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Untuk mewujudkan Sasaran 16 (keenam belas) menetapkan 3 (tiga) Iku yaitu Iku ke dua puluh empat, harapan lama sekolah (HLS) dengan target 14,60% terealisasi 14,60% dengan capaian 100,14%masuk kategori SANGAT TINGGI, dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi dikarenakan nilai itu digabungkan dengan siswa yang bersekolah di pesanteran di pesantren dan MTS dan MI yang datanya tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Iku ke dua puluh lima, persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan dengan target 21,32% terealisasi 21,30% dengan capaian 99,91% masuk kategori SANGAT TINGGI, dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi.

Selanjutnya, Iku kedua puluh enam rata-rata lama sekolah (RLS) dengan target 10,68% terealisasi 10,68% dengan capaian 100,00%, masuk kategori SANGAT TINGGI dimana data pendukung dan pengukuran dilakukan oleh BPS Kota Jambi.

Dapat dijelaskan untuk ketiga IKU di atas, dimana permasalahan pokok yang dihadapi oleh bidang pendidikan di Kota Jambi yaitu belum optimalnyadaya saing pendidikan, dimana pendidikan merupakan prasayarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di tingkat global. Permasalahan pendidikan Kota Jambi adalah belum optimalnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan masih terbatasnya daya tampung siswa terutama ditingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri, masih banyaknya saran dan prasarana pendidikan dasar yang perlu diperbaiki, belum terpenuhinya kebutuhan guru, masih rendahnya kualitas guru dan siswa.

SASARAN 17

MENGENDALIKAN ANGKA KELAHIRAN PENDUDUK

Sasaran ke 17 (ketujuh belas) terkait mengendalikan angka kelahiran penduduk dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019. Sasaran 17 (ketujuh belas) menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, berikut

Tabel 3.19.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 17 (tujuh belas) Tahun 2019

	SASARAN	INDIKATOR		ANGKA	%			TARGET AKHIR	
NO	STRATEGIS		INERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	27.	Laju pertumbuh an penduduk	N/A	N/A	1,05%	-	•	1,01%
		28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	N/A	96,23%	96,04%	99,80%	97,15%
	RATA-RATA % CAPAIAN				N/A			49,90%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

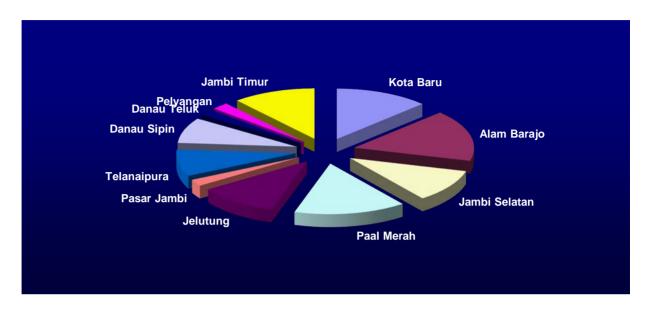
Iku kedua puluh tujuh laju pertumbuhan penduduk, dengan target 1,05% belum terealisasi masuk kategori BELUM TERDATA dikarenakan data bersumber dari BPS Kota Jambi yang belum dipublikasikan.

Untuk Laju Pertumbuhan Penduduk dapat kita sandingkan dengan data sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kota Baru	38.147	37.210	97.284
2.	Aalam Barajo	49.295	47.889	61.743
3.	Jambi Selatan	30.415	31.328	89.835
4.	Paal Merah	Paal Merah 45.455 44.380		63.369
5.	Jelutung	31.716	31.653	12.532
6.	Pasar Jambi	6.109	6.423	50.482
7.	Telanaipura	25.115	25.367	48.228
8.	Danau Sipin	24.073	24.155	12.083
9.	Danau Teluk	6.999	6.084	13.585
10.	Pelayangan	7.053	6.532	66.709
11.	Jambi Timur	33.632	33.077	75.384

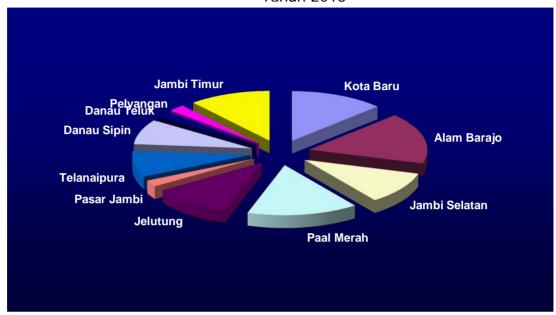
Grafik Jumlah Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017



Jumlah Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Kota Baru	39.011	38.038	77.049
2.	Aalam Barajo	50.376	48.953	99.329
3.	Jambi Selatan	30.710	31.639	62.349
4.	Paal Merah	45/860	44.781	90.641
5.	Jelutung	31.936 31.856		63.792
6.	Pasar Jambi	6.094 6.404		12.498
7.	Telanaipura	25.362	25.604	50.966
8.	Danau Sipin	24.311	24.378	48.689
9.	Danau Teluk	6.020	6.103	12.123
10.	Pelayangan	7.111	6.583	13.694
11.	Jambi Timur	33.775	33.198	66.973

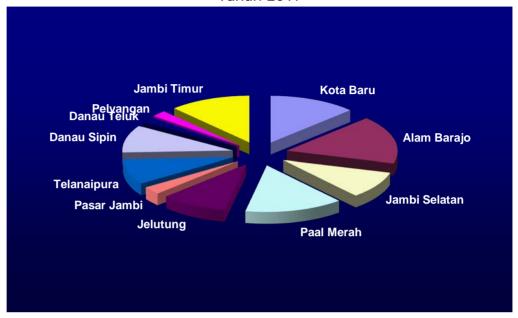
Grafik Jumlah Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018



Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Telanai Pura	552	583	1.135
2.	Jambi Selatan	612	603	1.215
3.	Jambi Timur	827	732	1.559
4.	Pasar Jambi	188	168	356
5.	Pelayangan	gan 143 149		292
6.	Danau Teluk	142 121		263
7.	Kota Baru	Baru 852 820		1.672
8.	Jelutung	649	627	1.276
9.	Alam Barajo	1060	1093	2.153
10.	Danau Sipin	623	609	1.232
11.	Paal Merah	971	915	1.886

Grafik Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017



Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1.	Telanai Pura	423	470	893	
2.	Jambi Selatan	533	530	1.063	
3.	Jambi Timur	653	617	1.270	
4.	Pasar Jambi	135	134	269	
5.	Pelayangan	103	150	253	
6.	Danau Teluk	117	112	229	
7.	Kota Baru	615	686	1.301	
8.	Jelutung	551	552	1.103	
9.	Alam Barajo	882	840	1.722	
10.	Danau Sipin	434	434	868	
11.	Paal Merah	847	766	1.613	

Grafik Jumlah Kelahiran Penduduk Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018



Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI
1.	Telanai Pura	687
2.	Jambi Selatan	947
3.	Jambi Timur	334
4.	Pasar Jambi	459
5.	Pelayangan	107
6.	Danau Teluk	101
7.	Kota Baru	1.078
8.	Jelutung	443
9.	Alam Barajo	-
10.	Danau Sipin	-
11.	Paal Merah	-

Grafik Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2017



Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI
1.	Telanai Pura	679
2.	Jambi Selatan	1.050
3.	Jambi Timur	461
4.	Pasar Jambi	181
5.	Pelayangan	108
6.	Danau Teluk	102
7.	Kota Baru	1.208
8.	Jelutung	450
9.	Alam Barajo	1.208
10.	Danau Sipin	679
11.	Paal Merah	1.050

Grafik Banyaknya Pernikahan di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2018



Lebih lanjut Iku kedua puluh delapan persentase jumlah keluarga sejahtera dengan target 96,23% terealisasi 96,04% dengan capaian 99,80% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Dengan cara pengukuran realisasi akumulasi keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II sebesar 129.308 keluarga dibandingkan target keluarga sejahtera 134.690 keluarga dengan capaian 99,80%. Data pendukung terdiri dari:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	KELUARGA SEJAHTERA I	KELUARGA SEJAHTERA II	%
1.	Telanaipura	10.727	5.739	4.371	94,25
2.	Jambi Selatan	13.652	6.047	7.370	98,28
3.	Jambi Timur	15.548	6.553	8.738	98,35
4.	Pasar Jambi	2.583	1.323	1.114	94,35
5.	Pelayangan	3.503	1.526	1.916	98,26
6.	Danau teluk	3.239	927	2.283	99,10
7.	Kota Baru	16.379	6.808	8.848	95,59
8.	Jelutung	14.294	6.766	7.011	96,38
9.	Alam Barajo	21.645	10.931	9.119	92,63
10.	Danau Sipin	10.396	4.781	5.160	95,62
11.	Paal Merah	22.724	10.164	11.813	96,71
	JUMLAH	134.690	61.565	67.743	96,04

Indikator keluarga yang dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera dari BKKBN, yaitu:

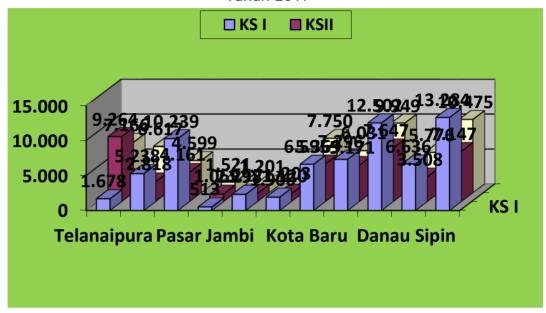
- a. Indikator Keluarga Sejahtera I (KS I)
 - Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
 - Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja /sekolah dan Bepergian
 - Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
 - Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
 - Bila Pasangn Usia Subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
 - Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah
- b. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II)
 - Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
 - Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluaga makan daging/ikan/telur
 - Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam Setahun
 - Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni rumah
 - Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
 - Ada seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh Penghasilan
 - Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin
 - Pasangan Usia Subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
- c. Indikator Keluarga Sejahtera III (KS III)
 - keluarga berupaya meningkatkan pengetahuna agama

- Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang
- Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi
- Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal
- Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet

Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera I, II dan III Per Kecamatan Tahun 2017

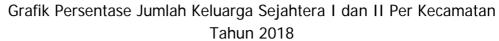
NO	KECAMATAN	KS I	KS II	KS III
1.	Telanai Pura	1.678	9.264	7.166
2.	Jambi Selatan	5.238	2.818	6.617
3.	Jambi Timur	10.239	4.161	4.599
4.	Pasar Jambi	513	1.069	1.521
5.	Pelayangan	2.298 1.171		1.201
6.	Danau Teluk	1.900	1.120	203
7.	Kota Baru	6.595	5.369	7.750
8.	Jelutung	7.296	5.171	6.031
9.	Alam Barajo	12.502	7.647	9.949
10.	Danau Sipin	6.636	33.508	5.776
11.	Paal Merah	13.284	7.147	10.475

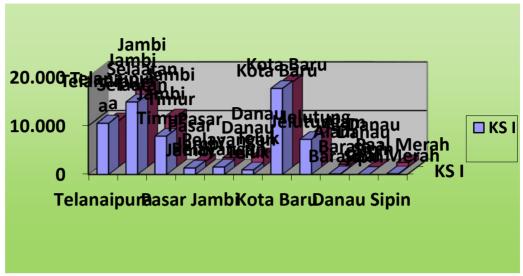
Grafik Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera I, II dan III Per Kecamatan Tahun 2017



Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera I dan II Per Kecamatan Tahun 2018

NO	KECAMATAN	KS I	KS II
1.	Telanai Pura	10.521	9.448
2.	Jambi Selatan	14.830	16.478
3.	Jambi Timur	7.883	10.248
4.	Pasar Jambi	1.327	1.109
5.	Pelayangan	1.526	1.906
6.	Danau Teluk	935	2.278
7.	Kota Baru	17.620	17.394
8.	Jelutung	7.217	6.589
9.	Alam Barajo	117	534
10.	Danau Sipin	7	37
11.	Paal Merah	146	909





Dari tabel di atas dapat dianalisa sebagai berikut:

- Kecamatan Telanaipura: Jumlah Keluarga Sejahtera meningkat dari 18.944 menjadi 21.032, naik 2.088 (111,02%) disebabkan lahan pertanian berkurang beralih menjadi lahan perumahan dan Ruko dan banyak beralih profesi dari bertani ke berdagang sehingga mereka kurang mahir dan peluang pekerjaan berkurang dan urbanisasi yang tinggi yaitu pendatang yang tidak punya keterampilan
- Kecamatan Jambi Selatan : Jumlah Keluarga Sejahtera meningkat dari 17.477 menjadi 32.183, naik 14.736 (184,14) disebabkan lahan pertanian berkurang beralih menjadi lahan perumahan dan Ruko dan banyak beralih profesi menjadi berdagang buruh dan lain - lain dan peluang pekerjaan berkurang dan urbanisasi yang tinggi yaitu pendatang yang tidak punya keterampilan
- Kecamatan Kota Baru : Jumlah Keluarga Sejahtera meningkat dari 23.355 menjadi 37.275, naik 13.290 (159,60) disebabkan lahan pertanian berkurang beralih menjadi lahan perumahan dan Ruko dan banyak beralih profesi menjadi berdagang, buruh dan lain - lain dan

peluang pekerjaan berkurang dan urbanisasi yang tinggi yaitu pendatang yang tidak punya keterampilan

Data kelompok UPPKS Tahun 2017 di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SK	Nama Kelompok	ket
1.	Telanaipura	Penyengat Rendah			
2.	Jambi Selatan	Tambak Sari	1	- Melati Mandiri	ada
3.	Jambi Timur	Tanjung Pinang	1	- Mandiri	ada
		Tanjung Sari	1	- Pesona	ada
		Kasang Jaya	1	- Kasang Jaya	ada
4.	Pasar Jambi	Beringin			
		Tahtul Yaman	1 - Lembayung 1 - Sejahtera 1 - Melati		ada
		Tanjung Johor	· ·		ada
		Mudung Laut	1	- Melati	ada
5.	Kota Baru	Kemali Asam	1	- Beringin	ada
		Bawah			
6.	Jelutung	Payo Lebar	2	- Berkah	Ada
				- Melati	Ada
		Talang Jauh	1	- Cemara I	Ada
		Lebak Bandung	1	- Bina Benur Muda V	Ada
		Cempaka Putih	1	- Kenanga	Ada
7.	Alam Barajo	Bagan Pete	1	- Maju Bersama	Ada
8.	Danau Teluk	Ulu Gedong	1	- Sejahtera RT.09	Ada
9.	Danau Sipin	Solok Sipin	1	- kel. Solok sipin	Ada
10.	Paal Merah	Talang Bakung	1 - Melati Bakung		Ada
		Lingkar Selatan	1	- Keluarga Berkwalitas kampung kb	Ada
	Juml	ah	19		

Data kelompok UPPKS Tahun 2018 di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah SK	Nama Kelompok	ket
1.	Telanaipura	Simpang IV	4		
		Sipin			
		Pematang	2		
		Sulur			
		Penyengat	1		
		Rendah			
2.	Jambi Selatan	Tambak Sari	1	-Melati Mandiri	
3.	Jambi Timur	Sijenjang	1	-MANDIRI	ada
		Rajawali	- J. J. g		
		Tanjung	1	-MANDIRI	ada
		Pinang			
		Tanjung Sari	1	-PESONA	ada
		Kasang Jaya	1	-CENDRAWASIH	ada
4.	Pasar Jambi	Beringin	1	-BERKAH	
5.	Pelayangan	Arab Melayu	1	-Sinar Baru	ada
		Tahtul Yaman	1	-Lembayang	ada
		Tanjung Johor	1	-Sejahtera	
		Mudung Laut	1	-Melati RT 08	ada
6.	KotaBaru	UPPKS			
		Kasamba	1	-Kenali Asam Bawah	ada
7.	Jelutung	Payo Lebar	2	-SERU	
				-MELATI	ada
		Talang Jauh	1	-Cemara I	ada
		Lebak Bandung	1	-Bina Benur Muda V	ada
		Kebun Handil	1	-Melati I	ada

		Jelutung	3	-CITRA MANDIRI	ada
				-VITA FOOD	ada
				-Maju Bersama	ada
		Cempaka Putih	1	-Kenanga	ada
8.	Alam Barajo	Kenali Besar	2	-MAWAR PUTIH	
				-Bougenville I	
		Bagan Pete	1	-MAJU BERSAMA	
9.	Danau Teluk	Ulu Gedong	1	-SEJAHTERA RT.09	ada
			1	-Nilam Sari	ada
10.	Danau Sipin	Solok Sipin	1	-CENDANA	
		Sungai Putri	2	-RANTING 5	
				-Dara Petak	
				-SIPIN DANAU	
		Legok	1	SEJAHTERA	ada
11.	Paal Merah	Talang Bakung	1	-MELATI BAKUNG	
				-Keluarga	
		Lingkar Selatan	1	Berkwalitas	
				kampung kb	
			1	-Mentari	ada
	Jumla	ıh	40		

DATA KELOMPOK UPPKS KOTA JAMBI TAHUN 2017

			Jumlah .	Anggota Kelompok	
No.	Kecamatan	UPPKS	Kelompok	UPPKS yang	UPPKS ber-
		UPPKS	UPPKS	berstatus PUS	KB
1.	Telanai Pura	35	175	67	66
2.	Jambi	10	59	29	17
2.	Selatan	10	59	29	17

3.	Jambi Timur	9	126	118	87
4.	Pasar Jambi	24	216	59	57
5.	Pelayangan	20	309	89	89
6.	Danau Teluk	13	65	64	63
7.	Kota Baru	6	212	145	127
8.	Jelutung	23	215	193	84
9.	Alam Barajo	5	237	155	132
10.	Danau Sipin	27	135	112	96
11.	Paal Merah	20	100	60	44
	Jumlah		1849	1091	862

CAKUPAN JUMLAH ANGGOTA POKTAN YANG BER-KB TAHUN 2018

No	Uraian	Jumlah A	Anggota	%
INO	Oi didi i	Kelompok	Ber-KB	70
1	2	3	4	5
1.	Cakupan anggota BKB ber KB	7.239	4.392	60,67
2.	Cakupan anggota BKR ber KB	3.353	2.301	68,63
3.	Cakupan anggota BKL ber KB	3.297	1.729	52,44
4.	Cakupan Remaja dalam Pusat	11	56	509,90
	Informasi			
	dan Konseling Remaja/Mahasiswa			
5.	Cakupan PUS peserta KB Anggota	1.297	632	48,72
	UPPKS			
	yang ber-KB mandiri			
6.	Pusat Pelayanan Keluarga	11	11	100,00
	Sejahtera di			
	setiap Kecamatan			

SASARAN 18 MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER

Sasaran ke 18 (kedelapan belas) terkait meningkatkan kesetaraan gender dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019. Sasaran 18 (kedelapan belas) menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama, berikut

Tabel 3.20.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 18 (delapan belas) Tahun 2019

NO SASARAN		SASARAN INDIKATOR		ANGKA	%		2019			
NO	STRATEGIS	KINERJA		AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	AKHIR RPJMD 2023	
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	29.	Indeks pembangun an gender	94,89	94,89%	94,90	94,46	99,54%	94,95	
		30.	Indeks pemberda yaan gender	68,07	68,07%	68,10	69,83	102,54%	68,50	
	RATA-RATA % CAPAIAN			81,48%			101,04%			

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku kedua puluh sembilan indeks pembangunan gender, dengan target 94,90 terealisasi dengan angka 94,46 atau tercapai 99,54% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana penghitungan dan data pendukung indeks pembangunan gender bersumber dari UNDP dengan indikator umur harapan hidup terealisasi sebesar 70,45% laki-laki dan 74,35% Perempuan, angka harapan lama sekolah (tahun) terealisasi sebesar 14,48% Laki-laki dan 14,88% Perempuan dan angka rata-rata lama sekolah(tahun) terealisasi sebesar 11,06% laki-laki dan 10,28% perempuan, pengeluaran perkapita 15,647% laki-laki dan 11,187%

perempuan dan nilai IPM 80,74% laki-laki dan 76,27% perempuan dengan hasil nilai indeks pembangunan gender sebesar 94,46%.

Pembangunan manusia meliputi konsep yang luas, mencakup pemberdayaan, kerjasama, kesetaraan, keberlanjutan, dan keamanan (Amartya Sen, 1989). Untuk menyederhanakan konsep yang sangat luas ini, UNDP menyusun ukuran pembangunan manusia yang dikenal sebagai Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan Gender Development Index atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial. Kualitas manusia dalam IPM diukur dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Komponen pembentuk IPM yang digunakan adalah umur harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta pengeluaran konsumsi (mewakili dimensi ekonomi).

Tabel IPG Provinsi Jambi Tahun 2018

Kode	e Kabupaten/Kota		UHH EYS Kabupaten/Kota		5	Pengelua MYS Kapi		' IPM		IPG		
		L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	L	Р	
1500	JAMBI	68,89	72,80	12,73	13,15	8,67	7,77	15.522	7.367	75,16	66,47	88,44
1501	Kerinci	67,62	71,57	14,01	13,57	8,96	7,65	15.257	7.026	76,08	65,67	86,32
1502	Merangin	69,02	72,94	11,97	12,18	8,26	7,21	14.231	6.987	73,05	64,29	88,01
1503	Sarolangun	66,98	70,86	12,34	12,23	8,23	7,03	16.702	9.785	73,87	66,70	90,29
1504	Batang Hari	68,24	72,16	12,90	13,24	8,27	7,35	15.744	5.816	74,64	63,06	84,49
1505	Muaro Jambi	69,01	72,91	12,66	13,32	8,47	7,81	13.258	3.952	73,41	58,88	80,21
1506	Tanjung Jabung Timur	63,87	67,75	11,49	12,37	6,84	6,02	14.206	6.181	68,09	59,44	87,30
1507	Tanjung Jabung Barat	65,87	69,80	12,27	12,86	7,91	7,18	13.848	5.622	71,15	61,10	85,87
1508	Tebo	67,81	71,68	12,37	12,58	8,19	7,23	14.867	8.327	73,22	66,06	90,22
1509	Bungo	65,40	69,33	12,60	12,72	8,67	7,49	17.494	8.418	74,33	65,56	88,20
1571	Kota Jambi	70,45	74,35	14,48	14,88	11,06	10,28	15.647	11.187	80,74	76,27	94,46
1572	Kota Sungai Penuh	69,84	73,73	15,11	14,65	10,63	9,83	12.554	9.915	78,32	73,96	94,43

Keterangan:

UHH : Usia Harapan Hidup

EYS : Harapan Lama Sekolah

MYS : Rata-rata Lama Sekolah

Dari data diatas terlihat IPG Kota Jambi tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi dan melebihi rata-rata IPG Provinsi Jambi dan angka ini sudah sesuai dengan target Renstra DPMPPA Kota Jambi yaitu target IPG sebesar 94,46. Hal ini sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

1. Usia harapan Hidup

Pada aspek kesehatan, nilai umur harapan hidup perempuan (74,35) di Kota Jambi lebih tinggi dibandingkan laki-laki (70,45). Hal sangat terkait dengan female advantages (FA) atau keunggulan perempuan , terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, female advantages lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang

menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Meskipun usia harapan hidup perempuan Kota Jambi lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti morbiditas dan keluhan kesehatan, perempuan masih di atas laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan dalam mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

2. Harapan Lama Sekolah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu investasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun negara. Tingkat pendidikan yang baik akan mengarahkan suatu negara menuju kondisi yang lebih baik. Karena itu, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan.

Di Kota Jambi Harapan Lama Sekolah Perempuan 14,88 sedangkan laki-laki 14,48. Harapan Lama Sekolah perempuan di Kota Jambi merupakan angka tertinggi disbandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas rata-rata Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Rata-rata Lama Sekolah Perempuan di Kota Jambi 10,28 sedangkan laki-laki 11,06. Angka tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun rata-rata lama sekolah Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingakan laki-laki. Dari data diatas menggambarkan bahwa perlunya upaya Pemerintah Kota Jambi dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah perempuan di Kota Jambi

4. Pengeluaran Per Kapita

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Pengeluaran Per Kapita Perempuan di Kota Jambi 11.187 sedangkan laki-laki 15.647. Angka pengeluaran per kapita perempuan tersebut merupakan tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi dan diatas angka rata-rata Provinsi Jambi. Namun pengeluaran per kapita Perempuan di Kota Jambi masih rendah dibandingakan laki-laki. Dapat di simpulkan sector perekonomian di Kota Jambi masih di dominasi oleh laki-laki.

Rendahnya capian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, serta angkutan, pergudangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki

tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relative tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.

Iku ketiga puluh indeks pemberdayaan gender dengan target 68,10 terealisasi 69,83 dengan capaian 102,54% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana penghitungan dan data pendukung indeks pembangunan gender bersumber dari UNDP dengan data pendukung keterlibatan perempuan di parlemen sebesar 20,00%, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 52,72% dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 29,25%.

Perbedaan capaian dalam ekonomi menjadi penyebab utama ketimpangan gender di Indonesia. Salah satu sebab dari hal adalah kurangnya peran perempuan dalam pasar tenaga kerja. Bukan tanpa sebab, budaya patriarki yang masih melekat hingga saat ini memberikan sekat bagi perempuan untuk lebih bertanggung jawab di bidang domestik atau pekerjaan rumah tangga. Sementara peran publik diberikan kepada laki-laki. Pembebanan peran domestik mengakibatkan secara umum perempuan menjadi kurang produktif secara finansial.

Upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendorong kesetaraan gender dari sisi ketenagakerjaan menampakkan hasil yang cukup menggembirakan. Berbagai indikator ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perempuan semakin berkontribusi dalam pasar tenaga kerja. Meski capaian beberapa indikator tersebut belum dapat menyamai laki-laki, namun dalam perkambangannya indikator tenaga kerja perempuan tumbuh lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi kesetaraan gender di Indonesia pada umumnya dan di Kota Jambi pada khususnya.

Tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Jambi Tahun 2018

		Keterlibatan	Perempuan	Sumbangan	
	Provinsi/	Perempuan	Sebagai	Pendapatan	
Kode	Kabupaten/	di Parlemen	Tenaga	Perempuan	IDG
	Kota	(%)	Profesional	(%)	
			(%)		
1500	JAMBI	16,98	53,58	30,09	67,78
1501	Kerinci	10,00	49,46	42,69	67,44
1502	Merangin	0,00	59,10	41,07	53,34
1503	Sarolangun	8,57	63,51	30,24	57,30
1504	Batanghari	17,14	52,40	34,45	70,76
1505	Muaro Jambi	14,29	45,87	35,15	68,81
1506	Tanjung Jabung	23,33	71,66	22,54	59,92
	Timur				
1507	Tanjung Jabung	14,29	43,08	26,92	63,10
	Barat				
1508	Tebo	14,71	59,59	28,63	63,55
1509	Bungo	17,14	54,48	22,87	61,27
1571	Kota Jambi	20,00	52,72	29,25	69,83
1572	Kota Sungai	0,00	53,28	34,48	52,41
	Penuh				

Dari data diatas terlihat IDG Kota Jambi tertinggi dibandingkan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Jambi dan melebihi rata-rata IPG Provinsi Jambi dan angka ini melebihi target Renstra DPMPPA Kota Jambi yaitu target IDG sebesar 68,10. Hal ini sangat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator SDGs yang tercantum pada Target 5.5 "Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, dan Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Masyarakat", "Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di Parlemen Tingkat Pusat, Parlemen Daerah dan Pemerintah Daerah. Selama ini, parlemen di Indonesia masih didominasi oleh laki-laki. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dilakukan dengan ditetapkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa sekurang-kurangnya harus ada 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Meski belum mampu memenuhi

target yang diharapkan, tapi dengan tren keterwakilan perempuan di parlemen yang cenderung meningkat telah menimbulkan optimisme bahwa peran perempuan di bidang politik semakin nyata terlihat dan berpotensi untuk terus ditingkatkan.

Di Kota Jambi tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih dibawah 30% yaitu sebanyak 20%. Masih dibutuhkannya strategi dari Pemerintah maupun Partai Politik untuk berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Jambi. Pada tahun 2019 Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Pelatihan bagi Calon Legislatif Perempuan di Kota Jambi dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman caleg perempuan agar tidak hanya menjadi penonton dalam pemilihan legislative namun bias berbicara banyak dan mewakili suara perempuan di Kota Jambi.

Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Perbaikan berbagai indikator ketenagakerjaan seperti meningkatnya partisipasi kerja perempuan dan penurunan pengangguran selama satu

dekade terakhir, diikuti dengan peningkatan iuga persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga profesional. Persentase tenaga professional perempuan cenderung meningkat. Selain persentase perempuan yang bekerja sebagai tenaga professional, indikator pemberdyan gender lain yang juga meningkat adalah komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN). Persentase jumlah ASN perempuan cederung meningkat dari waktu ke waktu, pada tahun 2018 jumlah ASN Perempuan Pemerintah Kota Jambi sebesar 4.440 (67,47%) dan laki-laki sebesar 2.141 (32,53%). Sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu jumlah ASN Perempuan Pemerintah Kota Jambi sebesar 6.110 (76,24%) dan laki-laki sebesar 1.904 (23,76%). Meski demikian, peran perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan relatif masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari persentase pejabat struktural laki-laki dan perempuan yang masih timpang. Selain masalah rendahnya jumlah pejabat struktural ASN perempuan, terdapat beberapa tantangan lain yang harus dihadapi dan membutuhkan penanganan dari berbagai pemangku kepentingan terkait, diantaranya adalah keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan ketimpangan upah yang masih saja terjadi. Selanjutnya, masalah yang umum terjadi pada pekerja perempuan yang telah menikah adalah kecenderungan untuk meninggalkan pekerjaan ketika memiliki anak, kemudian masuk kembali ke pekerjaan tersebut ketika sudah siap.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Kesenjangan capaian antara laki-laki dan perempuan di pasar tenaga kerja merupakan fenomena yang umum terjadi terutama di negaranegara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. Pemerintah Kota Jambi telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan sumbangan

pendapatan antara laki-laki dan perempuan diantaranya memberi pelatihan maupun keterampilan seperti membatik, menjahit, wirausaha dan lainnya sehingga perempuan dapat ambil bagian dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga dapat mewujudkan ketahanan keluarga yang lebih baik.

SASARAN 19 MENINGKATKAN PEMENUHAN HAK ANAK

Sasaran ke 19 (kesembilan belas) terkait meningkatkan pemenuhan hak anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019.

Tabel 3.21. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 19 (sembilan belas) Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		ANGKA	%		TARGET AKHIR		
			INERJA	AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00%	50,00%	70,00%	70,00%	100,00%	100,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				50,00%			100,00%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ketiga puluh persentase hak anak yang terpenuhi, dengan target 70,00% terealisasi 70,00% atau tercapai 100,00% masuk dalam kategori SANGAT TINGGI, dimana target 70,00% berdasarkan standarisasi Kota Layak Anak adalah kategori Madya. Standar Kota Layak Anak (KLA merupakan pemenuhan hak anak dengan kategori:

Pratama Range : konstanta 500 – 600 poin
 Madya : konstanta 700 – 800 poin

3. Nindya : konstanta 800 – 900 poin

4. Utama : konstanta 1.000 poin

Tahun 2019 Kota Jambi mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan kategori Madya, konstanta 700 – 800 poin. Cara pengukurannya adalah jumlah 5 variabel Kota Layak Anak sebesar konstanta 700 dibandingkan dengan konstanta 1.000 di kali 100 dengan capaian 70,00%.

No	Variabel Pemenuhan Hak Anak
1.	Hak sipil dan kebebasan
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3.	Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4.	Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5.	Perlindungan khusus

No	Skor	Standar	Та	rget	Capaian		
		Penilaian KLA	2018	2019	2018	2019	
1.	500 – 600 poin	Pratama	60%	70%	Pratama	Madya	
2.	600 – 700 poin	Madya					
3.	700 – 800 poin	Nindiya					
4.	800 – 900 poin	Utama					
5.	900 – 1000 poin	KLA					

Persentase pemenuhan hak anak pada tahun 2019 berdasarkan evaluasi kota layak anak yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terhadap upaya pemenuhan hak anak di Kota Jambi dengan hasil capaian Kota Jambi mendapatkan penghargaan kategori Madya dengan range nilai 600 - 700 poin dari 1000 poin yang harus dipenuhi, dengan formulasi nilai $700/1000 \times 100\% = 70\%$, artinya berdasarkan nilai tersebut indikator kinerja utama pemenuhan hak anak untuk tahun 2019 sudah terpenuhi.

Faktor-faktor yang mendorong keberhasilan tercapainya analisisi atas efisiensi penggunaan daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan antara lain:

- Adanya sumber dana baik dari APBD maupun sumber lain seperti CSR dunia usaha
- Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi sebagai kota layak anak
- Tanggung jawab dari gugus tugas kota layak anak dalam pemenuhan hak anak
- Dukungan dari dunia usaha dalam bentuk dana dan program kegiatan
- Dukungan dari media dalam pengembangan kota layak anak
- Dukungan dari masyarakat dalam perwujudan kota layak anak
- Dukungan dari pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam perwujudan KLA
- Dukungan dari lembaga swadaya masyarakat
- Program inovasi pemerintah daerah dalam upaya percepatan pencapaian kota layak anak.

SASARAN 20 MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Sasaran ke 20 (kedua puluh) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019.

Tabel 3.22. Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Untuk Sasaran ke 20 (dua puluh) Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS	CACADAN	INDIKATOR		ANGKA	%		TARGET AKHIR		
	KINERJA		AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023	
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	32.	Persentase pemberda yaan masyarakat dalam pembangun an	60,23%	60,23%	60,23%	70,96%	117,81%	52,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				60,23%			117,81%	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ketiga puluh dua persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan target 60,23% terealisasi 70,96% dengan capaian 117,81% masuk dalam kategori **SANGAT TINGGI**. Formulasi pengukuran Lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat sebanyak 38 variabel data aktif dibagi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat/kapasitas pemberdayaan masyarakat yang ada sebanyak 62 variabel.

Kategori/kriteria LPM aktif antara lain:

- Adanya surat keputusan LPM terbaru
- 2. 50 60% anggota /pengurus aktif dalam pertemuan
- 3. Ada rencana kerja yang partisipatif
- 4. Mengikutsertakan diri (ketua dan pengurus) dalam musrenbang kecamatan dan kelurahan dibuktikan dengan daftar hadir
- 5. Ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan
- 6. Menggerakkan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan
- 7. Adanya kerjasama antar lembaga di masyarakat
- 8. Perbaharuan SK dilakukan setiap 5 tahun sekali

Sebagai meta data adanya data LPM di 11 kecamatan/62 kelurahan

NO	Kecamatan	Jumlah LPM	Aktif	Kurang Aktif
1.	Jambi Timur	9 Orang	9 Orang	-
2.	Jelutung	7 Orang	7 Orang	-
3.	Pasar Jambi	4 Orang	4 Orang	-
4.	Pelayangan	6 Orang	6 Orang	-
5.	Jambi Selatan	5 Orang	5 Orang	-
6.	Telanaipura 6 Orang 6 Orang		6 Orang	-
7.	Kota Baru	5 Orang	5 Orang	-
8.	Danau Teluk	5 Orang	5 Orang	-
9.	Paal Merah	5 Orang	5 Orang	-
10.	Danau Sipin	5 Orang	5 Orang	-
11.	Alam Barajo	5 Orang	5 Orang	-
		62 Orang	62 Orang	

Analisa program/kegiatan yang dilakukan oleh LPM antara lain:

Input				Proses			Output			
1.	Adanya keputusan terbaru	surat LPM	•	Mengikuti musrenbang kelurahan/ kecamatan		-	Adanya bu hadir musre			
2.	50 - anggota/per aktif pertemuan	60% ngurus dalam	-	Penyusunan kegiatan	laporan	-	Adanya bel hasil komitr Adanya kerjasama	ner		
3.	3. Ada dokumen rencana kegiatan			Melaksanaka kerjasama Menggerakka						
4.	Dokumen k antar	erjasama lembaga		swadaya royong	gotong	-	Lingkungan aman dan r		bersih man	

kemasyarakatan	- Memantau kegiatan
(draft)	pembangunan

Dukungan dan hambatan

Dukungan antara lain adanya sumber dana dari APBD maupun swadaya masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perkembangan ekonomi dan pembangunan sedangkan hambatan bagi LPM tidak diikutsertakan dalam pengawasan pembangunan di kelurahan.

SASARAN 21 MENINGKATKAN PRESTASI DAN KREATIVITAS KEPEMUDAAN

Sasaran ke 21 (kedua puluh satu) meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019.

Tabel 3.23.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 21 (dua puluh satu) Tahun 2019

Ī		SASARAN	INDIKATOR	ANGKA	%		2019		TARGET AKHIR	
	NO STRATEGIS		KINERJA		AWAL RPJMD	CAPAIAN 2018	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
	21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	33.	Indeks pembangun an pemuda	50,00%	50,00%	50,00	-	1	52,00
Ī	RATA-RATA % CAPAIAN				60,23%					

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ketiga puluh tiga indeks pembangunan pemuda, dengan target 50,00 belum terealisasi masuk kategori BELUM TERDATA dikarenakan data bersumber dari BPS Kota Jambi yang belum dipublikasikan.

SASARAN 22 MENURUNKAN ANGKA PMKS

Sasaran ke 22 (kedua puluh dua) menurunkan angka PMKS dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam tahun anggaran 2019.

Tabel 3.24.
Rekapitulasi Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Untuk Sasaran ke 22 (dua puluh dua) Tahun 2019

		SASARAN STRATEGIS	INDIKATO KINERJ <i>i</i>		ANGKA	% CAPAIAN 2018		TARGET AKHIR		
NO	NO				AWAL RPJMD		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD 2023
	22.	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	60,00%	60,00%	65,00%	25,26%	38,86%	85,00%
	RATA-RATA % CAPAIAN				60,00%			38,86%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019. (Data diolah)

Iku ketiga puluh empat persentase PMKS yang tertangani, dengan target 65,00% terealisasi 25,26% atau dengan capaian 38,86% masuk dalam kategori SANGAT RENDAH. Dengan formulasi pengukuran jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 647 orang terdiri dari lansia terlantar sebanyak 53 orang, anak terlantar sebanyak 351 orang, disabilitas terlantar sebanyak 30 orang dan gelandangan dan pengemis sebanyak 213 orang dibandingkan dengan target PMKS sebanyak 10.423 orang terdiri dari lansia terlantar sebanyak 8.462 orang, anak terlantar sebanyak 217 orang, disabilitas terlantar sebanyak 1.428 orang dan gelandangan dan pengemis sebanyak 316 orang.

Analisa capaian kinerja dimana untuk menentukan capain kinerja sasaran dan kegiatan digunakan pengukuran melalui skala ordinal sebagai berikut:

	Skala Pengukuran Ordinal Kinerja								
No	Skala Pengukuran Ordinal	Kategori							
1.	85 s/d 100	Sangat Berhasil							
2.	70 - < 85	Berhasil							
3.	55 - < 70	Cukup Berhasil							
4.	> 55	Kurang Berhasil							

Sumber data: Dinas Sosial Kota Jambi

Kategori Sasaran Strategis Berdasarkan Skala Dan Kalrifikasinya

No	Katego	ri Capaian	Jumlah Indikator	Persentase	
	Skala	Klarifikasi	Kinerja Sasaran		
1.	< 55	Kurang Berhasil	-	-	
2.	55 - 70	Cukup Berhasil	-	-	
3.	71- 85	Berhasil	-	-	
4.	86 - 100	Sangat Berhasil	12	101,05%	

Secara umum pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja 8 (delapan) sasaran Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2019 dikalsifikasikan mencapai kinerja sangat berhasil/sangat baik dengan nilai capaian kinerja sebesar 101,05. Secara umum dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019 Dinas Sosial telah mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Namun tetap dilakukan peningkatan kinerja dari sasaran tersebut agar dapat lebih tinggi dari tahun 2019.

Banyaknya Penyandang Cacat di Kota Jambi Per Kecamatan Tahun 2019 (Orang)

Number of Disabled People in Jambi City by District, 2019 (Person)

Tuna / Cacat

Physical defect

Kecamatan District	Netra <i>Blind</i>	Wicara/ Rungu <i>Deaf</i> and Mute	Tubuh <i>Handicapp</i> <i>ed</i>	Mental <i>Mental</i> <i>Defect</i>	Jompo <i>Decreipt</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kota Baru	5	12	22	11	3825
Alam Barajo	5	12	30	14	2151
Jambi Selatan	15	12	112	69	2567
Paal Merah	32	25	94	38	4297
Jelutung	19	27	66	55	2465
Pasar Jambi	8	6	21	27	942
Telanaipura	0	12	31	30	1933
Danau Sipin	0	0	4	24	2196
Danau Teluk	0	6	20	4	1038
Pelayangan	0	48	24	0	758
Jambi Timur	32	58	205	75	5539
J u m l a h/Total	116	218	629	347	27711

Sumber data : Dinas Sosial Kota Jambi

Banyaknya Anak Terlantar dan Yatim Piatu di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2019 (Orang)

Number of Neglected Children and Decrepit in Jambi City by District 2019 (Person)

Kecamatan	Laki-laki		
District		Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	<i>Male</i> (2)	(3)	(4)
	(-/	(-)	('/
Kota Baru	41	83	124
Alam Barajo	97	76	173
Jambi Selatan	0	0	0
Paal Merah	59	97	156
Jelutung	80	101	181
Pasar Jambi	0	0	0
Telanaipura	0	0	0
Danau Sipin	41	27	68
Danau Teluk	0	0	0
Pelayangan	0	0	0
Jambi Timur	0	0	0
Jumlah	318	384	702

Sumber

: Dinas Sosial Kota Jambi

Jumlah Korban Bencana Alam di Kota Jambi Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2019 (Orang)

Number of Natural Disaster Victim in Jambi City by Type and District 2019 (Person)

Kecamatan	Kebakaran		
District	Conflagration	Banjir Flood	Angin Puting Beliung Whirling Wind
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Baru	2	0	0
Alam Barajo	5	1	0
Jambi Selatan	2	0	0
Paal Merah	2	0	0
Jelutung	2	0	0
Pasar Jambi	0	0	0
Telanaipura	3	0	0
Danau Sipin	0	0	0
Danau Teluk	4	0	0
Pelayangan	1	0	0
Jambi Timur	2	0	0
Jumlah/Total	23	1	0

Sumber : Dinas Sosial Kota Jambi

Permasalahan

Dari Penyelenggaraan Program Kegiatan Pemerintahan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 pada Dinas Sosial Kota Jambi khususnya dalam bidang Sosial, maka terdapat beberapa permasalahan pokok dan memerlukan Solusi pemecahan yang terjadi antara lain adalah :

1) Belum Optimalnya Penanganan dan Penertiban Razia Gepeng.

- Belum Optimalnya Penanganan tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, khususnya bantuan korban bencana.
- Belum Optimalnya Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya.
- 4) Belum Optimalnya Pelayanan dan Rehabilitasi bagi PMKS.
- 5) Belum Optimalnya Pemberian Bantuan Usaha kepada PMKS
- 6) Belum Optimalnya Peran serta Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial
- 7) Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berasal dari Luar Daerah
- 8) Masih tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat kesejahteraan PMKS.

Solusi pemecahan yang terjadi antara lain adalah :

- 1) Menambah Tingkat Intensitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap perkembangan hasil penertiban dan penanganan PMKS.
- 2) Menambah Anggaran Distribusi Bantuan Sosial bagi korban bencana dan Anggaran Penanganan dan pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal Tujuannya ke dalam Anggaran APBD Kota Jambi.
- 3) Membangun Rumah Singgah, Sarana Prasarana Pusat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS.
- 4) Memberikan Pelatihan Keterampilan dan Wirausaha Mandiri kepada PMKS.
- 5) Memberikan Bantuan Peralatan Keterampilan Usaha Mandiri kepada PMKS
- 6) Memberdayakan dan meningkatkan Peran Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan dan penanggulangan masalah-masalah Sosial
- 7) Menyusun dan membuat rencana strategis secara terpadu, melakukan sinkronisasi dan koordinasi, serta memanfaatkan Forum Kerjasama

antar daerah dalam rangka mengatasi masalah-masalah kesejahteraan social.

3.3. PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2018

Tahun 2019 merupakan tahun kelima dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023. Dengan tetap memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan Kota Jambi dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2005-2025, ditetapkan prioritas pembangunan sebagai panduan gerak langkah kemana pembangunan akan diarahkan.

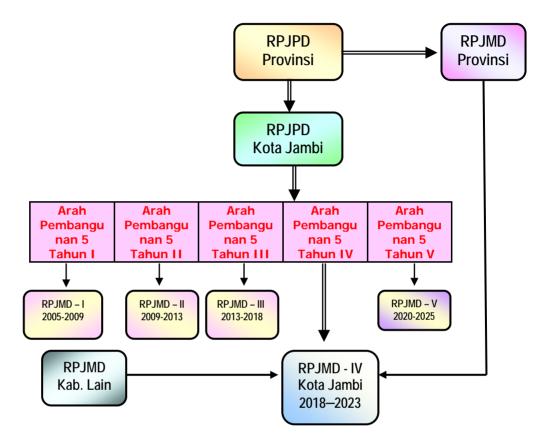
Keempat prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi tahun 2018 - 2023 ditujukan untuk memperkuat identitas pembangunan Kota Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Jambi periode 2005 – 2025 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan gerakan dan kekuatan yang sinergis dengan daerah sekitarnya dan pemerintahan diatasnya.

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD Kota Jambi periode 2018 -2023 disamping berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Jambi, juga memperhatikan RPJMD kabupaten/kota tetangga, RPJMD Provinsi Jambi dan RPJM Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Permendagri Nomor 86 tahun 2017 sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan seperti terlihat pada Gambar 3.1. berikut ini.

Gambar 3.2.

Skema Keterkaitan RPJMD Kota Jambi 2018 – 2023

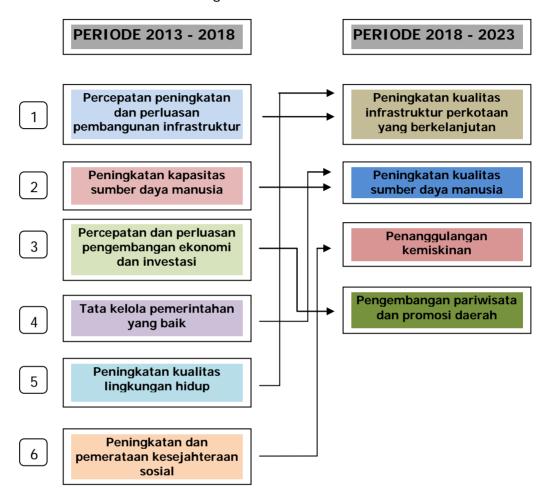
dan RPJPD Kota Jambi 2005 – 2025



Sumber: RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 -2023

Sebagai gambaran umum untuk dapat melihat sinkronisasi dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada Prioritas Pembangunan yang akan dicapai disetiap tahun, khususnya pada tahun 2019 yang merupakan tahun Pertama periode pemerintahan tahun 2018 -2023 dengan periode tahun 2013 -2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Periode Tahun 2013 – 2018 dengan Periode Tahun 2018 -2023



Selanjutnya sebagai panduan dalam pencapaian prioritas pembangunan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih juga dalam RPJMD telah ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus di jabarkan dan dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Sebagai perbandingan jumlah tujuan, sasaran dan IKU selama periode tahun 2008 -2013 dengan periode tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25.
Perbandingan Jumlah Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Periode Tahun 2013 -2018 dengan Periode Tahun 2018 -2023

NO	LIDALAN	PEF	RIODE
NO	URAIAN	2013-2018	2018-2023
1.	MISI	5	5
2.	TUJUAN	11	6
3.	SASARAN	22	22
4.	INDIKATOR	38	34
	KINERJA		
	UTAMA		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tujuan pada periode sebelumnya adalah sebanyak 11 buah dan pada periode 2018 – 2023 menjadi 6 tujuan. Namun untuk jumlah sasaran tetap yaitu 22 sasaran dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) terjadi penurunan, yaitu untuk sasaran di periode sebelumnya adalah sebanyak 38 indikator, periode saat ini adalah sebanyak 34 indikator.

Tabel 3.26.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 1 (KESATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018		2019			TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
1.	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Opini wajar tanpa pengecualian (WTP)	WDP	WTP	-	-	N/A	N/A	N/A	WTP
		Rasio jabatan terhadap pendidikan dan keahlian	N/A	90,00	92,12	102,36	N/A	N/A	N/A	90,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,33	N/A	N/A	N/A	2,44	2,85	116,80	2,44
		Indeks profesionali tas ASN	N/A	N/A	N/A	N/A	56	56,2	100,35	88,00
		Nilai SAKIP	В	N/A	N/A	N/A	В	В	100,00	А
		Indeks survey persepsi korupsi	N/A	N/A	N/A	N/A	3,65	3,35	91,78	3,8

In	ndeks	85,28	Baik	Baik	86,00	85,50	83,66	97,84	88,5
Ke	Cepuasan		Sekali	Sekali					
M	//asyarakat								

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat dari target, realisasi dan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pertama yaitu indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dimana angka awal RPJMD terealisasi sebesar 2,33 naik menjadi 2,44 di tahun 2019 dan terealisasi 2,85 atau dengan capaian 116,80 persen.

IKU kedua yaitu indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Tetapi IKU rasio jabatan terhadap pendidikan dan keahlian terkait dengan IKU indeks profesionalitas ASN di tahun 2018 tercapai sebesar 102,36%. selanjutnya angka awal RPJMD 2018-2023 tidak ada data (N/A) dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 56 terealisasi 556,2 atau dengan capaian 100,35 persen.

IKU ketiga yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dilihat pada periode RPJMD 2013-2018 tidak ada IKU nilai SAKIP tetapi terdapat data untuk tahun 2018 dari hasil nilai evaluasi yang dipublikasikan oleh KemenPAN RB RI dan capaiannya sama sebesar 100,00 persen pada tahun 2019 tetapi untuk nilai hasil evaluasi mengalami peningkatan sebesar 62,09 pada tahun 2018 menjadi 65,02 pada tahun 2019. Kota Jambi juga dalam hal ini sangat berkomitmen untuk meningkatkan nilai SAKIP.

IKU keempat yaitu indeks survey persepsi korupsi dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks survey persepsi korupsi adalah IKU opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Pada RPJMD 2018-2023 Pemerintah Kota menetapkan angka awal RPJMD untuk tahun 2019 dengan target 3,65 indeks tersebut telah di publikasikan oleh Kementerian PAN dan RB RI dengan realisasi sebesar 3,35 atau dengan capaian 91,78 persen.

Lebih lanjut IKU kelima adalah indeks kepuasan masyarakat, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 82,15 persen tahun 2019 sedangkan di tahun 2018 sebesar 86,00%.

Tabel 3.27.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 2 (KEDUA)

NO	SASARAN	SASARAN INDIKATOR KINERJA	-		2018			2019		
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
2.	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesai an jumlah kasus atau pelanggar an PERDA dan PERWAL	82,00	N/A	N/A	N/A	82,00	82,00	100,00	60,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keenam yaitu penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Iku penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL, dimana angka awal RPJMD sebesar 82,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 82,00 terealisasi 82,00 atau dengan capaian 100,00 persen.

Tabel 3.28. TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019 SASARAN KE 3 (KETIGA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
3.	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketujuh yaitu cakupan pelayanan pemadam kebakaran dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Iku cakupan pelayanan pemadam kebakaran, dimana angka awal RPJMD sebesar 100,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100,00 terealisasi 100,00 atau dengan capaian 100,00 persen. Dikarenakan cakupan pelayanan pemadam kebakaran tercapai sesuai target yang meliputi respon time, pelayanan pra dan pasca kebakaran, pelayanan cepat tanggap penyelamatan dan sebagainya.

Tabel 3.29.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 4 (KEEMPAT)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
4.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya	Persentase penyelesaian permasalahan keagamaan	N/A	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00
	ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	20,00	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00	100,00	100,00

masyarakat					

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ke delapan yaitu persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 yang merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018 mengenai IKU persentase penyelesaian permasalahan keagamaan dengan capaian sebesar 100,00 persen. IKU RPJMD 2013-2018 tidak berbeda jauh dengan IKU periode RPJMD 2018-2023. IKU persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila, pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 20,00.

Tabel 3.30.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 5 (KELIMA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
5.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	20,00	N/A	N/A	N/A	20,00	20,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesembilan adalah persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase Orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat, dimana angka awal RPJMD sebesar 20,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 20,00 terealisasi 20,00 atau dengan capaian 100,00 persen.

Tabel 3.31.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 6 (KEENAM)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
6.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan utilitas	Rasio panjang jaringan jalan baik	65,44	100,00	92,50	92,50	N/A	N/A	N/A	100,00
	perkotaan	Rasio panjang drainase dalam kondisi baik	46,67	100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	N/A	100,00
		Rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah	0,97	0,35	0,29	82,85	N/A	N/A	N/A	0,35
		Cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah	65,50	80,00	77,00	96,25	N/A	N/A	N/A	80,00
		Rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman	51,34	98,00	97,00	98,98	N/A	N/A	N/A	98,98
		Peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang	31,00	95,00	91,00	95,79	N/A	N/A	N/A	95,00
		Peningkatan fasilitas keselamatan lalin	50,00	88,00	100,00	113,64	N/A	N/A	N/A	88,00
	ahar - Bagian	Cakupan layanan infrastruktur dan utilitas	50,50	N/A	N/A	N/A	53,07	49,50	93,27	85,79

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesepuluh yaitu cakupan layanan infrastruktur dan utilitas dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas adalah IKU rasio panjang jaringan jalan yang baik dengan dengan capaian 92,50 persen, IKU rasio panjang drainase dalam kondisi baik dengan capaian 100,00 persen, IKU cakupan pelayanan jaringan air minum per jumlah rumah capaian 96,25 persen, IKU rasio luas kawasan kumuh per luas wilayah dengan capaian 82,85 persen, IKU rasio kecukupan lampu penerangan jalan umum dan lampu taman dengan capaian 98,98 persen, IKU

peningkatan fasilitas terminal penumpang dan barang dengan capain 95,79 persen dan IKU peningkatan fasilitas keselamatan lalin dengan capaian 113,64 persen. disamping itu ditambah juga dengan beberapa komponen yang termasuk dalam IKU cakupan layanan infrastruktur dan utilitas untuk tahun 2019 periode RPJMD 2018-2023 terdiri dari rasio jembatan dalam kondisi baik, rasio cakupan pelayanan air limbah, rasio bangunan dalam kondisi baik, rasio dokumen perencanaan yang diimplementasikan dan rasio kesesuaian ruang sehinggan target yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah 53,07 persen terealisasi sebesar 49,50 persen dengan capaian 93,27 persen dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 50,50.

Tabel 3.32.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 7 (KETUJUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
7.	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan	Rasio ketaatan terhadap RT/RW	N/A	100,00	97,50	97,50	N/A	N/A	N/A	100,00
	lingkungan hidup	Rasio RTH terhadap luas wilayah	8,00	11,25	10,76	95,64	N/A	N/A	N/A	95,64
		Penurunan tingkat polusi air pada S. Tembuku dan S. Asam	26,2 mg/L	18-16 mg/L	20,60 mg/L	68,29	N/A	N/A	N/A	18-16 mg/L
		Cakupan penanganan sampah	61,67	80,00	78,70	98,38	N/A	N/A	N/A	80,00
		Indeks kualitas air	43,24	N/A	N/A	N/A	37,75	38,27	101,27	43,38
		Indeks kualitas udara	91,27	N/A	N/A	N/A	80,7	76,84	95,21	91,45
		Indeks kualitas tutupan lahan	60,77	N/A	N/A	N/A	41,30	44,81	108,49	61,37

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesebelas yaitu indeks kualitas air dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU indeks kualitas air adalah IKU penurunan

tingkat polusi air pada S. Tembuku dan S. Asam dengan dengan capaian 68,29 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 32,11 mengalami kenaikan dengan target sebesar 38,27 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berkaitan dengan belum optimalnya pengawasan dan penegakkan hukum pada pelaku usaha industri yang masih membuang buangan limbah industri ke badan sungai. Badan Lingkungan Hidup Kota Jambi terus secara optimal akan memantau dan mengendalikan kualitas lingkungan di Kota Jambi khususnya kualitas air.

IKU kedua belas yaitu indeks kualitas udara dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU indeks kualitas udara, dimana angka awal RPJMD sebesar 80,68 dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80,7 terealisasi 76,84 atau dengan capaian 95,21 persen.

IKU ketiga belas yaitu indeks kualitas tutupan lahan dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU indeks kualitas tutupan lahan adalah IKU rasio RTH terhadap luas wilayah dengan dengan capaian 10,76 persen, IKU cakupan penanganan sampah dengan capaian sebesar 98,38 persen dan IKU rasio ketaatan terhadap RT/RW dengan capaian sebesar 97,50 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 39,33. mengalami kenaikan sebesar 44,81 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal ini instansi terkait pengadaan RTH pada awalnya identik dengan pembelian lahan. Namun dengan segala keterbatasan lahan di dalam kota dan juga keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Jambi mengambil inisiatif dan inovasi untuk mengoptimalkan lahan tidur yang ada dan tersebar di seluruh eilayah Kota Jambi untuk di jadikan taman dan Ruang Terbuka Hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu markah

jalan di sepanjang jalan utama dan jalan protokol di Kota Jambi di tanami pohon penghijauan sehingga tetap dapat bermanfaat sebagai RTH dan paru-paru bumi.

Tabel 3.33.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 8 (KEDELAPAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
8.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan	Cakupan bina perdagangan/ usaha informal	2.00	13.60	27.93	205.36	N/A	N/A	N/A	13,60
	perdagangan	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	20,00	N/A	N/A	N/A	36,00	63,34	175,94	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keempat belas yaitu persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan adalah IKU cakupan bina perdagangan/usaha informal dengan capaian 205,36 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 20,00 mengalami penurunan sebesar 175,94 persen di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.34.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 9 (KESEMBILAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
9.	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan	87,90	N/A	N/A	N/A	90,59	90,70	100,12	92,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kelima belas yaitu skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019

yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU skor pola pangan harapan, dimana angka awal RPJMD sebesar 87,90 dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 90,59 terealisasi 90,70 atau dengan capaian 100,12 persen.

Tabel 3.35.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 10 (KESEPULUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
10.	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	Terselenggaranya event berskala nasional dan internasional	0	2 kali	2 kali	100,00	N/A	N/A	N/A	2 Kali
	terhadap PDRB	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	2,35	N/A	N/A	N/A	2,35	2,38	100,42	2,41

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU keenam belas yaitu kontribusi pariwisata terhadap PDRB dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018, IKU yang terkait IKU kontribusi pariwisata terhadap PDRB adalah IKU terselenggaranya event berskala nasional dan internasional dengan capaian 100,00 persen di tahun 2018 dan ditetapkan angka awal RPJMD 2018-2023 sebesar 2,35 sedangkan untuk tahun 2019 terealisasi sebesar 2,38 dengan capaian 100,42 berdasarkan hasil data oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.36.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 11 (KESEBELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
11.	Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	4,00	N/A	N/A	N/A	8,00	16,09	201,13	9,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketujuh belas yaitu persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dapat dilihat pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun

2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dimana angka awal RPJMD sebesar 4,00 persen dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 8,00 persen terealisasi 16,09 persen atau dengan capaian 201,13 persen. Hal ini disebabkan sumbangan terbesar diberikan dari sektor pajak daerah dan sektor lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.37.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 12 (KEDUA BELAS)

N	0	SASARAN	INDIKATOR	ANGKA		2018			2019		TARGET
			KINERJA	AWAL							AKHIR
				RPJMD	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	RPJMD
							CAPAIAN			CAPAIAN	
1	2.	Meningkatkan	Realisasi	410 M	100,00	76,80	76,80	430,5	1,055 T	245,12	523,37
		realisasi	investasi					М			М
		investasi									

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedelapan belas yaitu realisasi investasi dapat dijelaskan disini periode RPJMD 2013-2018 dan periode RPJMD 2018-2023 adalah sama, dengan capaian yang mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 245,12 persen di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 76,80 persen tahun 2018. Hal ini disebabkan dampak dari perkembangan Kota Jambi yang semakin pesat sehingga banyak pelaku usaha yang berinvestasi di Kota Jambi.

Tabel 3.38.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 13 (KETIGA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
13.	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	Jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap	N/A	20,00	42,26	211,30	N/A	N/A	N/A	20,00
		Jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM	N/A	3,75	2,55	68,00	N/A	N/A	N/A	3,75

Tingkat	64,96	N/A	N/A	N/A	65,00	65,79	101,21	66,00
partisipasi								
angkatan								
kerja (TPAK)								

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kesembilan belas yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Tetapi terdapat IKU yang terkait dengan IKU periode RPJMD 2018-2023, yaitu IKU jumlah angkatan kerja terdaftar yang terserap dengan capaian 68,00 persen dan IKU jumlah serapan tenaga kerja pada UMKM dengan capaian 2,55 persen. Sedangkan untuk IKU RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 64,96 persen dengan capaian sebesar 101,21 persen di tahun 2019.

Tabel 3.39.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 14 (KEEMPAT BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
14.	Meningkatkan daya saing usaha skala	Jumlah koperasi aktif	193 Unit	218 Unit	218 Unit	100,00	N/A	N/A	N/A	218 Unit
	mikro dan kecil	Jumlah UMKM dan IKM mandiri	140 Unit	170 Unit	265 Unit	155,88	N/A	N/A	N/A	170 Unit
		Rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar pemerintah	50,00	85,00	87,50	102,94	N/A	N/A	N/A	85,00
		Rasio PKL yang tertata	N/A	90,00	277,28	308,08	N/A	N/A	N/A	90,00
		Pertumbuhan industri	2,60	15,30	44,15	288,56	N/A	N/A	N/A	15,30
		Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	7,61	N/A	N/A	N/A	8,08	8,08	100,00	10,00
		Persentase daya saing produk IKM	4,30	N/A	N/A	N/A	4,30	19,30	448,8	8,3

Persentase	13,00	N/A	N/A	N/A	16,06	16,50	102,73	36,70
koperasi								
berkualitas								

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh yaitu persentase usaha mikro kecil yang berkualitas dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU persentase usaha mikro kecil yang berkualitas RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 7,61 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen di tahun 2019.

IKU kedua puluh satu yaitu persentase daya saing produk IKM, dimana IKU RPJMD 2013-2018 yang terkait adalah IKU rasio peningkatan sarana dan prasarana pasar-pasar pemerintah dengan capaian sebesar 102,94 persen di tahun 2018, IKU pertumbuhan industri dengan capaian 288,56 persen di tahun 2018, IKU rasio PKL yang tertata dengan capaian 277,28 persen dan IKU jumlah UMKM dan IKM mandiri dengan capaian sebesar 15,88 persen. RPJMD 2018-2023 menetapkan angka awal RPJMD adalah sebesar 4,30 persen dan di tahun 2019 dengan target 4,30 persen teralisasi sebesar 19,30 persen atau dengan capaian 448,8 persen.

IKU kedua puluh dua yaitu persentase koperasi berkualitas dimana IKU RPJMD 2013-2018 yang terkait adalah IKU jumlah koperasi aktif dengan capaian 288,56 persen di tahun 2018. RPJMD 2018-2023 menetapkan angka awal RPJMD adalah sebesar 4,30 persen dan di tahun 2019 dengan target 4,30 persen teralisasi sebesar 19,30 persen atau dengan capaian 448,8 persen.

Tabel 3.40.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 15 (KELIMA BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
15.	Meningkatkan derajat kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan	40,00	90,00	92,00	102,22	N/A	N/A	N/A	90,00
		Jumlah puskesmas dengan pelayanan 24jam	3 Unit	10 Unit	20 Unit	200,00	N/A	N/A	N/A	10 Unit
		Angka Harapan Hdup (AHH)	72,34	N/A	N/A	N/A	72,35	-	-	72,37

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh tiga yaitu angka harapan hidup dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU angka harapan hidup terkait dengan IKU cakupan pelayanan kesehatan rujukan dengan capaian sebesar 102,22 persen dan IKU jumlah puskesmas dengan pelayanan 24 jam dengan capaian 200,00 persen tahun 2018. RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 72,34 persen dengan target sebesar 72,35 persen di tahun 2019 dan belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

Tabel 3.41.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 16 (KEENAM BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
16.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	Angka partisipasi sekolah pada usia sekolah	77,78	84,98	91,74	107,95	N/A	N/A	N/A	84,98
		Angka rata- rata lama sekolah (ARLS)	10,45	11,45	-	-	N/A	N/A	N/A	11,45

Jumlah	82,57	97,50	92,65	95,03	N/A	N/A	N/A	97,50
tenaga								
pendidik								
yang memenuhi								
kualifikasi								
Jumlah	60,00	85,00	88,14	103,69	N/A	N/A	N/A	85,00
sekolah	00,00	05,00	00,14	103,03	14//	14,71	14//	03,00
sesuai SNP								
pada semua								
jenjang								
pendidikan								
Harapan	14,25	N/A	N/A	N/A	14,60	14,62	100,14	14,64
lama								
sekolah								
(HLS)								
Persentase	21,32	N/A	N/A	N/A	21,32	21,30	99,91	4,32
masyarakat								
tidak								
mampu								
yang								
mendapat jaminan								
pelayanan								
pendidikan								
Rata-rata	10,68	N/A	N/A	N/A	10,68	10,68	100,00	10,72
lama		,,,	,	,,,				,
sekolah								
(RLS)								

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh empat yaitu harapan lama sekolah (HLS) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU harapan lama sekolah (HLS) adalah IKU RPJMD 2018-2023 ditetapkan angka awal sebesar 72,34 persen dengan target sebesar 72,35 persen di tahun 2019 dan belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasikan oleh Badan Statistik Pusat Kota Jambi.

IKU kedua puluh lima yaitu persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan adalah IKU angka partisipasi sekolah pada usia sekolah dengan capaian sebesar 107,95 persen.

Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan layanan pendidikan ditetapkan angka awal sebesar 21,32 persen dengan target sebesar 21,30 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 21,30 persen dengan capaian sebesar 99,91 persen.

IKU kedua puluh enam yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU rata-rata lama sekolah (RLS) adalah IKU angka rata-rata lama sekolah (RLS) dengan capaian belum ada data karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi. Periode RPJMD 2018-2023 IKU rata-rata lama sekolah (RLS) ditetapkan angka awal sebesar 10,68 persen dengan target sebesar 10,68 persen di tahun 2019 dan terealisasi sebesar 10,68 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.42.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 17 (KETUJUH BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
17.	Mengendalikan angka kelahiran penduduk	Cakupan PUS peserta KB yang berKB	77,00	87,00	84,00	96,55	N/A	N/A	N/A	87,00
		Laju pertumbuhan penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	1,05	-	-	1,01
		Persentase jumlah keluarga sejahtera	N/A	N/A	N/A	N/A	96,23	96,04	99,80	97,15

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh tujuh yaitu laju pertumbuhan penduduk dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan

wakil walikota terpilih 2018-2023. Adapun IKU yang terkait dengan IKU laju pertumbuhan penduduk adalah IKU cakupan PUS peserta KB yang berKB dengan capaian dengan capaian sebesar 96,55 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU laju pertumbuhan penduduk dengan target sebesar 1,05 persen di tahun 2019 dan belum ada data capaian karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

IKU kedua puluh delapan yaitu persentase jumlah keluarga sejahtera dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase jumlah keluarga sejahtera dengan target sebesar 96,23 persen terealisasi sebesar 96,04 persen dengan capaian sebesar 99,80 persen pada tahun 2019.

Tabel 3.43.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 18 (KEDELAPAN BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
18.	Meningkatkan kesetaraan gender	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan	47,00	70,00	84,00	120,00	N/A	N/A	N/A	70,00
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan hukum	19,00	30,00	31,00	103,33	N/A	N/A	N/A	30,00
		Indeks pembangunan gender	94,89	N/A	N/A	N/A	94,90	94,46	99,54	94,95
		Indeks pemberdayaan gender	68,07	N/A	N/A	N/A	68,10	69,83	102,54	68,50

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU kedua puluh sembilan yaitu indeks pembangunan gender dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks pembangunan gender adalah IKU cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan dan pengaduan dengan capaian sebesar 120,00 persen dan IKU cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan hukum dengan capaian sebesar 103,33 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan gender ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 94,89 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 94,90 terealisasi sebesar 94,46 dengan capaian sebesar 99,54 persen.

IKU ketiga puluh yaitu indeks pemberdayaan gender dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan gender ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 68,07 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 68,10 terealisasi sebesar 69,83 dengan capaian sebesar 102,54 persen.

Tabel 3.44.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 19 (KESEMBILAN BELAS)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
19.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Kelurahan layak anak	2 Kel	17 Kel	12 Kel	70,59	N/A	N/A	N/A	17 Kel
		Persentase hak anak yang terpenuhi	50,00	N/A	N/A	N/A	70,00	70,00	100,00	100,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh satu yaitu persentase hak anak yang terpenuhi dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU persentase hak anak yang terpenuhi adalah IKU kelurahan layak anak dengan capaian sebesar 70,59 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase hak anak yang terpenuhi ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 50,00 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 70,00 persen terealisasi sebesar 70,00 persen dengan capaian sebesar 100,00 persen.

Tabel 3.45.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 20 (KEDUA PULUH)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
20.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	60,23	N/A	N/A	N/A	60,23	70,96	117,81	52,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh dua yaitu persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. Periode RPJMD 2018-2023 IKU persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 60,23 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 60,23 persen terealisasi sebesar 70,96 persen dengan capaian sebesar 117,81 persen.

Tabel 3.46.
TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019
SASARAN KE 21 (KEDUA PULUH SATU)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
21.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	Jumlah sarana dan prasarana, olah raga, seni dan budaya	10,00	60,00	60,00	100,00	N/A	N/A	N/A	60,00
		Indeks pembangunan pemuda	50,00	N/A	N/A	N/A	50,00	-	-	52,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh tiga yaitu indeks pembangunan pemuda dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU indeks pembangunan pemuda adalah IKU jumlah sarana dan prasarana olah raga, seni dan budaya dengan capaian 100,00 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan pemuda ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 50,00 dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 50,00 persen belum terealisasi dikarenakan belum dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Jambi.

Tabel 3.47.

TARGET DAN REALISASI IKU TAHUN 2018 DAN 2019

SASARAN KE 22 (KEDUA PULUH DUA)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGKA AWAL		2018			2019		TARGET AKHIR
			RPJMD	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	RPJMD
22.	Menurunkan angka PMKS	Rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani pertahun	30,00	60,00	93,14	155,23	N/A	N/A	N/A	60,00
		Persentase penduduk miskin	9,80	7,30	71,53	979,86	N/A	N/A	N/A	7,30
		Persentase PMKS yang tertangani	60,00	N/A	N/A	N/A	65,00	25,26	38,86	85,00

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Jambi. 2019 (data diolah)

IKU ketiga puluh empat yaitu persentase PMKS yang tertangani dapat dijelaskan disini pada tahun 2018 tidak ada data (N/A) dikarenakan tahun 2018 merupakan akhir periode RPJMD 2013-2018, dimana indikator kinerja utama berbeda dengan tahun 2019 yang merupakan awal periode RPJMD 2018-2023 dari walikota dan wakil walikota terpilih 2018-2023. IKU yang terkait dengan IKU persentase PMKS yang tertangani adalah IKU rasio peningkatan jumlah PMKS yang dilayani pertahun dengan capaian sebesar 155,23 persen dan IKU persentase penduduk miskin dengan capaian sebesar 979,86 persen. Periode RPJMD 2018-2023 IKU indeks pembangunan pemuda ditetapkan angka awal RPJMD sebesar 60,00 persen dan pada tahun 2019 dengan target sebesar 65,00 persen terealisasi sebesar 25,26 persen dengan capaian 38,86 persen.

3.4. PENDANAAN PER PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2018 DAN 2019

Dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diarahkan dalam Prioritas Pembangunan dengan target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap tahunnya, tentu saja tidak lepas dari masalah pendanaan. Sesuai dengan kemampuan daerah yang ada, Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menyusun alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.47. di bawah ini.

Pada akhir perencanaan RPJMD 2013-2018 pada Tahun 2018 Prioritas Percepatan Peningkatan Perluasan Pembangunan Infrastruktur yang menggunakan alokasi dana APBD TA 2018 adalah sebesar Rp. 341.129.513.050,- atau 36,98% dari total anggaran belanja langsung tahun 2018 dan Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup menggunakan alokasi APBD TA 2018 adalah sebear Rp. 46.335.399.950,- atau 5,02 persen dari total belanja langsung pada tahun 2018. Untuk awal perencanaan

RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar Rp. 377.645.530.800,- atau sebesar 36,31 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Untuk prioritas kedua pada tahun 2018 yaitu Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 364.081.164.000,- atau sebesar 39,47 persen dari total belanja langsung tahun 2018 dan Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik menggunakan alokasi APBD tahun 2018 sebesar Rp. Rp, 126.081.307.000,atau 13,67 persen dari total belanja langsung tahun 2018. Untuk awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Peningkatan Kualitas SDM APBD TΑ 2019 menggunakan alokasi dana adalah sebesar 415.791.627.135,- atau sebesar 39,98 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Prioritas pembangunan ketiga yaitu Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial yang dianggarkan oleh APBD pada tahun 2018 14.280.000.000,- atau sebesar 1,55 persen dari total belanja langsung daerah tahun 2018. Untuk awal perencanaan RPJMD 2018-2023 adalah Prioritas Penanggulangan Kemiskinan menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar Rp. 223.876.115.739,- atau sebesar 21,53 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Prioritas pembangunan keempat yaitu Percepatan dan Perluasan Pengembangan Ekonomi dan Investasi pada tahun 2018 dialokasikan sebesar Rp. 30.441.725.000 atau sebesar 3,30 persen dari total belanja langsung daerah tahun 2018. Untuk awal perencanaan RPJMD 2018-2023 **Prioritas** Pengembangan adalah Pariwisata dan Promosi Daerah menggunakan alokasi dana APBD TA 2019 adalah sebesar 15.847.089.000,- atau sebesar 1,52 persen pada tahun 2019 dari total belanja langsung pada tahun tersebut.

Tabel 3.48.
Alokasi APBD Per Prioritas Pembangunan Tahun 2018 dan 2019

NO	PRIORITAS PERIODE RPJMD	ALOKASI APBD-P 2018		PRIORITAS PERIODE		ALOKASI APBD-P 2019	
	2013-2018	BL	%		RPJMD 2018-2023	BL	%
1	PERCEPATAN PENINGKATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	341.129.513.050	36,97	1	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR PERKOTAAN YANG BERKELANJUTAN	377.645.530.800	36,31
2	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	364.081.164.000	39,47	2	PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	415.791.627.135	39,98
3	PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI	30.441.725.000	3.29	3	PENANGULANGAN KEMISKINAN	223.876.115.739	21,5.
4	TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK	126.081.307.000	13,67	4	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN PROMOSI DAERAH	15.847.089.000	1,52
5	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	46.335.399.950	5,02				
6	PENINGKATAN DAN OEMERATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	14.280.000.000	1,55				
TOTAL BELANJA LANGSUNG		922.349.109.000				1.039.954.489.234	

Sumber : Bappeda Kota Jambi. 2019. (Data Diolah)

3.5. AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2019

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 92,61,00% dari total anggaran yang dialokasikan. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Secara lebih detail penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019 dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini.

3.5.1. Pendapatan Daerah

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - Realisasi PAD sebesar Rp. 393.429.595.383,99 dari target sebesar
 Rp. 381.743.685.000,00
 - Dari komponen PAD, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp. 255.915.037.458,55 dari target sebesar Rp. 242.090.000.000,00,- Sedangkan penerimaan terkecil berasal dari Pendapatan Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 38.540.603.597,06 dari target sebesar Rp. 45.068.647.000,00.
 - Jika dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan sumber dana ekstern (DAU, DAK, Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya dan dana penyesuaian), Tingkat Kemandirian Daerah 35,44 persen, Artinya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sendiri masih rendah. Hal ini berdasarkan kategori yang

ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tapi secara teknis pendapatan asli daerah Kota Jambi melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 101,41 persen.

2) Dana Perimbangan

- Sumber penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan adalah realisasi sebesar Rp. 1.110.177.033.331,00.,- dengan target sebesar Rp. 1.130.319.892.976,00,-
- Dari komponen Dana Perimbangan ini, penyumbang terbesar adalah Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 757.404.051.000,00,- (sesuai target) sedangkan yang terkecil adalah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 132.185.357.673,00,-

Tabel 3.49.
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Daerah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	
		(Rp)	(Rp)	%
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	381.743.685.000,00	393.429.595.383,99	103,06
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	242.090.000.000,00	255.915.037.458,55	105.71
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	45.068.647.000,00	38.540.603.597,06	85,52
1.3	Pendapatan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.700.000.000,00	9.783.144.576,94	100,86
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	84.885.038.000,00	89.190.809.751,44	105,07
2	DANA PERIMBANGAN	1.130.319.892.976,00	1.110.177.033.331,00	96,43
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	137.965.056.000,00	132.185.357.673,00	95,81
2.2	Dana Alokasi Umum	757.404.051.000,00	757.404.051.000,00	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	234.950.785.976,00	220.587.624.658,00	93,89
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	102.358.694.000,00	195.935.881.048,00	109,72
3.1	Pendapatan Hibah	61.479.800.000.00	60.013.627.967,00	97,62
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 2)	81.347.485.000,00	114.911.044.081,07	141,26
3.3	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	11.291.209.000,00	11.291.209.000,00	100,00
3.4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.720.000.000,00	9.720.000.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.614.422.271.976,00	1.699.542.509.763,00	103,07

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2019.

- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - Dari Komponen penerimaan Lain-lain Pendapatan yang sah, penyumbang terbesar adalah Dana bagi hasil dari provinsi sebesar Rp 114.911.044.081,07,- dari target sebesar Rp. 81.347.485.000,00.

3.5.2. Belanja Daerah

Dalam rangka perhitungan SAB (Standar Analisis Belanja), anggaran belanja unit kerja dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Belanja Operasi adalah belanja yang dikeluarkan dari Kas Umum Negara/Daerah dalam rangka menyelenggarakan operasional pemerintah sedangkan Belanja Modal adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka membeli dan/atau mengadakan barang modal. Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga dapat dilihat tabel 3.49 berikut:

Tabel 3.49. menunjukkan:

- a. Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.661.380.787.461,83 atau 89,86% dari anggaran sebesar Rp 1.848.826.216.875,00,-. Komposisi belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal dan belanja tak terduga. Realisasi belanja tidak langsung ini dipergunakan:
 - Realisasi belanja operasi yang terbesar digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp. 674.550.141.407,00 atau 86,42% dari anggaran sebesar Rp 780.513.273.241,00 belanja pegawai digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, insentif pemungutan pajak daerah dan insentif pemungutan retribusi daerah.
 - Belanja hibah sebesar Rp. 13.663.492.850,00 atau 92,78% dari anggaran sebesar Rp. 14.726.000.000,00.

- Belanja bantuan sosial sebesar Rp. 5.801.400.000,00 atau 75,82% dari anggaran sebesar Rp. 7.651.455.000,00,-.
- Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota,
 pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp. 836.172.392,00 atau
 63,97% dari anggaran sebesar Rp. 1.307.132.400,00.
- Belanja tidak terduga sebesar Rp. 1.064.101.080,00 atau 50,53% dari anggaran sebesar Rp. 2.105.867.000,00,-.
- b. Rata-rata realisasi komponen belanja operasi dibawah 100%, dari belanja operasional tersebut realisasi belanja yang terkecil adalah belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik sebesar Rp. 836.172.392,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.307.132.400,00,-.
- c. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 432.100.003.926,32,- atau 95,31% dari anggaran sebesar Rp. 453.345.007.861,00,-

Realisasi Belanja Modal ini dipergunakan:

- Realisasi belanja modal yang terbesar dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan (konstruksi/pembelian) bangunan yaitu sebesar Rp 137.954.168.967,00,- atau 97,12% dari anggaran sebesar Rp. 142.040.477.962,-
- Realisasi belanja modal yang terkecil dipergunakan untuk membiayai kegiatan peralatan industri kecil dan menengah yaitu sebesar Rp 11.847.000,00 atau 98,73% dari anggaran sebesar Rp. 12.000.000,00.
- d. Realisasi belanja tak terduga sebesar Rp. 1.500.470.100,00 atau sebesar 100,00% dari Total Rp. 1.500.470.100,00.

Tabel 3.50. Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI				
		(Rp)	(Rp)	%			
	BELANJA DAERAH						
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	806.303.727.641,00	695.915.307.729,00	73,90			
1.1	BELANJA PEGAWAI	780.513.273.241,00	674.550.141.407,00	86,42			
1.2	BELANJA HIBAH	14.726.000.000,00	13.663.492.850,00	92,78			
1.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	7.651.455.000,00	5.801.400.000,00	75,82			
1.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	1.307.132.400,00	836.172.392,00	63,97			
1.5	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.105.867.000,00	1.064.101.080,00	50,53			
2	BELANJA LANGSUNG	1.042.522.489.234,00	965.465.479.733,00	91,30			
2.1	BELANJA PEGAWAI	66.138.355.995,00	58.010.762.225,00	87,71			
2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	523.039.125.378,00	475.354.713.581,51	90,88			
2.3	BELANJA MODAL	453.345.007.861,00	432.100.003.926,32	32 95,31			
	JUMLAH BELANJA	1.848.826.216.875,00	1.661.380.787.462,00	82,60			

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. 2019.

3.5.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.50 berikut ini.

Berdasarkan perhitungan APBD tahun anggaran 2019 tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp. 1.614.422.271.976,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.699.542.509.763,00 atau 103,07% dari target. Disisi lain, belanja dianggarkan sebesar Rp. 1.848.826.216.875,00 direalisasikan sebesar Rp. 1.661.380.787.462,00 atau 82,60% dari anggaran.
- b. Dari anggaran defisit sebesar (Rp. 172.924.144.899,00) dan realisasikan defisit sebesar (Rp. 38.161.722.301,23) atau sebesar (22,07%).

Tabel 3.51.
Anggaran dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		
		(Rp)	(Rp)	%	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.614.422.271.976,00	1.699.542.509.763,00	103,07	
2	BELANJA DAERAH	1.848.826.216.875,00	1.661.380.787.462,00	82,60	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(172.924.144.899,00)	38.161.722.301,23	(22,07)	
3	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.924.144.899,00	172.924.144.899,00	100,00	
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	172.924.144.899,00	172.924.144.899,00	100,00	
SIS	SA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)	-	211.085.867.201,12	-	

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah Kota Jambi. 2019

- c. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif yaitu dapat melampaui target pendapatan dan sekaligus melakukan penghematan (menekan) realisasi belanja (efisiensi).
- d. Dalam tahun anggaran 2019, pada kegiatan pembiayaan terdiri dari penerimaan yang ditargetkan Rp. 172.924.144.899,00 dapat direalisasikan sebesar 100% dari target penerimaan pembiayaan dimaksud, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak ada sama sekali baik target maupun realisasi.
- e. Realisasi Pembiayaan netto sebesar Rp. 172.924.144.899,00 atau 100,00%, pada tahun anggaran 2019 didapatkan SILPA dari jumlah anggaran sebesar Rp. 211.085.867.201,12.

3.6. PENGHARGAAN YANG DIRAIH PEMERINTAH KOTA JAMBI SELAMA TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN 15 MARET 2020

Walikota Jambi yaitu Bapak H. SYARIF FASHA, ME dan Wakil Walikota Jambi yaitu Bapak DR. Dr. H. MAULANA, MKM merupakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yang dilantik pada tanggal 7 November 2018. Tahun 2014

merupakan tahun kedua berjalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau.

1. PENGHARGAAN ATAS PRESTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI TAHUN 2018



TerasNews

Pemerintah Kota Jambi pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 raih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat B dari Kementerian PAN-RB. Penghargaan ini diberikan secara langsung oleh menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Dr. H. Asman Abnur, S.E, M.Si kepada

Wakil Walikota Jambi DR. Dr. Maulana.MKM di Hotel Trans Luxury Kota Bandung.

2. PENGHARGAAN SMART CITY. TOPINSPIRING E-GOVRNMENT MANAGEMENT SYSTEM 2019



Pada 27 Maret 2019, Kota Jambi kembali mencatatkan tinta emas, penghargaan dalam kategori "Top Inspiring e-Government Management System 2019", yang diterima langsung oleh Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta.

Kota Jambi dinilai sebagai daerah di Indonesia yang memberi nilainilai inspriasi atas dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam membangun konsep <u>smart city</u> melalui berbagai inovasi.

3. PENGHARGAAN INDONESIA INNOVATION AWARD



Pada 25 April 2019 Walikota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih Penghargaan Indonesia Innovation Award 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Nasional (APTIKNAS). Walikota Jambi Syarif Fasha diniliai memiliki

inovasi cemerlang dengan melahirkan Program Kampung Bantar dalam mengakselerasi pembangunan Kota.

4. PENGHARGAAN TOKOH NASIONAL PEDULI LANSIA



Pada 27 Mei 2019 Sebagai wujud kecintaan terhadap masyarakatnya yang telah memasuki usia lanjut, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME bersama jajaran Pemerintah Kota Jambi, menggelar Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tahun 2019 Tingkat Kota Jambi.

Acara yang turut dirangkai dengan

tasyakuran atas diraihnya penghargaan kepada Wali Kota Syarif Fasha sebagai Tokoh Nasional Peduli Lansia itu, berlangsung di Lapangan Utama Balaikota Jambi pada hari Sabtu, 20 Juli 2019.

Tidak hanya itu, Wali Kota Fasha juga menyediakan santunan dan tali asih untuk seluruh lansia yang hadir di acara tersebut. Tampak suasana haru

bercampur gembira saat Wali Kota Syarif Fasha menyerahkan santunan, dan berdialog akrab bersama para lansia tersebut.

5. PENGHARGAAN TANDA JASA BAKTI KOPERASI DAN UKM



Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Jambi Hj. Yuliana Fasha, SE, M. Si. AK, Ca, kembali mengharumkan nama kota Jambi ditingkat nasional.

Kali ini Ketua TP PKK Kota Jambi itu berhasil meraih penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2019 yang diserahkan

oleh Menteri Koperasi dan UKM RI AAGN Puspayoga, pada tanggal 11 Juli 2019 yang berlangsung pada Hari Koperasi Nasional di Java Heritage Hotel Banyumas, Jawa Tengah.

Mewakili Hj. Yuliana Fasha, penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Ketua TP PKK Kota Jambi Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG.

Penghargaan Jasa Bakti Koperasi dan UKM Tahun 2019 yang diserahkan kepada Ketua TP PKK yang juga sekaligus Ketua Dekranasda Kota Jambi itu merupakan wujud pengakuan dan penghargaan atas dedikasi dan kepedulian Yuliana Fasha terhadap upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM yang ada di Kota Jambi.

6. PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2019 KATEGORI MADYA



Pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2019, Kota Jambi kembali membuktikan eksistensinya sebagai daerah yang mampu berbicara banyak dalam hal meraih prestasi membanggakan bagi masyarakatnya. Pada momen puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2019 yang dipusatkan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kota Jambi kembali mencatatkan namanya dalam jajaran daerah yang berhasil meraih penghargaan dari Pemerintah Pusat. Wakil Wali Kota Jambi H. Maulana menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun 2019 dengan kategori Madya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yambise. Yang menarik dan membanggakan adalah Kota Jambi masuk dalam jajaran daerah yang sukses meng-"upgrade" kategori daerahnya dari Pratama menjadi Madya.

7. PENGHARGAAN INDONESIA'S ATTRACTIVENESS AWARD
(IAA) KOTA TERBAIK SEKTOR PELAYANAN PUBLIK
PERINGKAT PLATINUM



Kota Jambi konsisten 3 tahun berturut-turut sukses meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional Indonesia's Attractiveness Award (IAA). Pada tahun 2019 ini, Kota Jambi menyandang titel sebagai Kota Sedang Terbaik Sektor Pelayanan Publik dengan Peringkat Platinum. Pada tanggal 23 Juli 2019 bertempat di Pullman Hotel Thamrin Jakarta, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME menerima langsung penghargaan tersebut dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, BSEE., M.BA. Turut hadir pula pada malam penghargaan IAA tersebut, Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya.

Penghargaan tersebut makin membuktikan determinasi dan kehandalan kepemimpinan Wali Kota Jambi Syarif Fasha, dalam menahkodai Pemerintah Kota Jambi.

8. PENGHARGAAN TOP EKSEKUTIF MUSLIM 2019



Kota Jambi kembali ukir prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, dianugerahi Penghargaan TOP Eksekutif Muslim 2019, Bidang Pemerintahan, yang secara simbolis diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dalam sebuah acara yang dihelat oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) yang berlangsung di The Media Hotel & Towers, Jakarta, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Wali Kota Syarif Fasha pada ajang Penghargaan TOP Eksekutif Muslim, TOP Eksekutif Muslimah, TOP Halal dan IPEMI Award 2019. IPEMI memberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasha, karena dinilai telah berprestasi dan berperan dalam kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi Muslim dan Muslimah lainnya.

Fasha juga dinilai mampu mendorong peranan wanita dan wanita pengusaha di Kota Jambi untuk terus berprestasi, berkarya, dan berkontribusi bagi kemajuan keluarga dan daerah. Sebagai seorang kepala daerah, Fasha juga dinilai sukses sebagai sosok inspiratif dan memberi contoh yang baik karena telah berprestasi dan berhasil sebagai seorang praktisi dalam dunia wirausaha (entrepreneur).

Selain Wali Kota Syarif Fasha, terdapat beberapa kepala daerah lain yang memperoleh penghargaan serupa. Seperti, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, beberapa Anggota DPR RI, Wali Kota, Bupati, BUMN, BUMD, serta tokoh nasional lainnya.

9. PENGHARGAAN TANDA KEHORMATAN JASA BINTANG PRATAMA



Bertepatan rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada sejumlah orang yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara. Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera itu diberikan berdasarkan Keppres RI Nomor 72/TK/Tahun 2019 yang dikeluarkan pada 13 Agustus 2019.

Salah satu yang menerima penghargaan itu adalah Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Wali Kota Jambi periode 2013-2018 dan 2018-2023 ini menerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Jasa Pratama, yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu siang, 15 Agustus 2019.

Penganugerahan itu diberikan atas pengabdian yang telah diberikan Fasha kepada masyarakat Kota Jambi dalam masa kepemimpinannya.

10. PIAGAM PENGHARGAAN NASIONAL PEMBINA OLAHRAGA BERPRETASI



Kinerja Wali Kota Jambi kembali di apresiasi pemerintah pusat. Kali ini Wali Kota Dr. H. Syarif Fasha, ME mendapat apresiasi atas kinerja gemilangnya di bidang keolahragaan. Sebagai kepala daerah, Ia dinilai sukses melakukan pembinaan olahraga di Kota Jambi.

Dia pun dinyatakan sebagai tokoh terpilih yang akan meraih Penghargaan Olahraga Nasional Berprestasi Tahun 2019, sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga. Penghargaan bergengsi dibidang olahraga tersebut akan di anugerahi oleh Presiden RI Joko widodo pada saat puncak Hari Olahraga Nasional

(HAORNAS) ke XXXVL tahun 2019 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan pada tanggal 8 September 2019 bertempat di Siring Menara.

11. PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA SINDONEWS



Komitmen dan kesungguhan duet kepemimpinan Wali Kota Jambi Syarif Fasha, ME, wakilnya bersama Maulana dalam membangun Kota Jambi Terkini (Tertib, Ekonomi

Maju, Rakyat sejahtera, Kompetitif, Inovatif, Nyaman dan Iman), tidak perlu diragukan lagi. Terlebih dalam membangun penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan yang lebih baik dan efektif. Atas kinerjanya itu, Kota Jambi untuk kesekian kalinya kembali meraih apresiasi tertinggi dari di bidang penyelenggaraan pemerintah pusat sistem transportasi perkotaan. Kota Jambi kembali meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk keempat kalinya. Kota Jambi dinilai sukses dalam pembangunan bidang lalu lintas, serta berinovasi di bidang angkutan tersebut. Yang paling membanggakan Kota Jambi meraih WTN Tanpa Catatan bersama 39 kabupaten/kota dari 77 daerah penerima penghargaan itu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu tanggal 15 September 2019. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019.

12. ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA (APKLI) AWARD 2019



Kesungguhan dan komitmen Wali Kota Jambi Syarif Fasha, dalam menata dan memberdayakan pelaku ekonomi mikro, menuai apresiasi. Kali ini apresiasi itu hadir

dari Pedagang Kaki Lima (PKL), yang berhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI).

Wali Kota Jambi dua periode itu diganjar penghargaan APKLI Award Tahun 2019, atas kiprahnya dalam bidang tata kelola ekonomi kemasyarakatan kerakyatan, melalui PKL. Penghargaan itu diserahkan Ketua Umum APKLI Pusat, Ali Mahsum, M Biomed, pada malam Pentas Harmoni Car Free Night (CFN), yang berlangsung kawasan Tugu Keris Siginjai, Kotabaru, Sabtu malam, 5 Oktober 2019.

Pada kesempatan itu, mendampingi Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana, dan Ketua APKLI Provinsi Jambi Adhy Putra Siaga. Wali Kota dengan jargon Kota Jambi Terkini itu dinilai sukses dalam memanusiakan pedagang kaki lima.

Penghargaan tersebut, tidak terlepas dari kiprahnya dalam membangun manajemen tata kelola yang telah dirasakan manfaatnya terutama bagi pelaku IKM, pedagang kaki lima yang ada di Kota Jambi.

13. PENGHARGAAN TERBAIK SATU KATEGORI DANA SHARING TERBAIK KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Pemerintah Kota Jambi kembali meraih prestasi, kali ini mendapat penghargaan terbaik 1 kategori Dana Sharing Terbaik Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam Program Keluarga Harapan. Penghargaan yang diserahkan oleh Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi itu, berlangsung pada acara Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi, bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi pada tanggal 10 Oktober 2019 yang diwakili oleh Wakil Wali Kota DR.dr Maulana,MKM

14. PENGHARGAAN MENTERI KEUANGAN RI ATAS OPINI WTP PEMKOT JAMBI



Keberhasilan Pemerintahan Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota DR. H. Syarif Fasha ME dalam meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dari BPK RI, kembali mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Pusat.

Atas nama pemerintah pusat, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, memberikan penghargaan khusus kepada Pemerintah Kota Jambi atas raihan prestasi gemilang bidang pengelolaan keuangan pemerintah.

Bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa sore tanggal 23 Oktober 2019, Plt. Gubernur Jambi DR. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum, atas nama Kementerian Keuangan RI, menyerahkan secara resmi penghargaan tersebut kepada Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha.

Acara tersebut turut pula dihadiri oleh beberapa Kepala Daerah di Provinsi Jambi yang meraih WTP di tahun 2017, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Negara (DJPBN) Provinsi Jambi, Tiarta Sebayang, Forkompimda Provinsi Jambi, BPKP Perwakilan Jambi, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang ada di Provinsi Jambi.

Menteri Keuangan RI memang memberi apresiasi khusus bagi daerah yang berhasil meraih opini WTP dalam bentuk penghargaan dan dana insentif bagi daerah.

Perjuangan Pemkot Jambi yang dimotori oleh Wali Kota H. Syarif Fasha tersebut sangatlah tidak mudah. Sebagai mana diketahui bahwa, Pemkot Jambi telah berhasil meraih opini WTP untuk kedua kalinya, berturut-turut, setelah sebelumnya tidak pernah sekalipun meraih opini tertinggi dalam pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah tersebut.

Sementara itu Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, seusai acara menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas penghargaan yang diberikan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan RI tersebut.

15. PENGHARGAAN KEHORMATAN BINTANG ASTHA HANNAS

Wali Kota Jambi, Sy Fasha, dianugerahi penghargaan bergengsi atas jasa dan kiprahnya sebagai kepala daerah yang sukses membangun kapasitas ASN.

Dia dianugerahi Penghargaan Kehormatan Bintang Astha Hannas (Revolusi Mental) oleh Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia (PKBI) Astha Hannas.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian upacara penutupan Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Mental, dalam rangka peningkatan kapasitas ASN di lingkup Pemkot Jambi, di Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astha Hannas, Binong, Subang Jawa Barat, 25 Oktober lalu.

Fasha merupakan Wali Kota Pertama di Indonesia yang menerima penghargaan itu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pembina Kampus PKBI, Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS. Upacara penganugerahan dilakukan dengan prosesi tradisi pedang pora. Fasha dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut.

16. PIAGAM KEHORMATAN TOP 25 LEADERS SEVEN MEDIA ASIA AWARD2019, KATEGORI TOP LEADERS AND THE BEST PERFOMANCE



Wali Kota Jambi Syarif Fasha, dianugerahi Penghargaan Top 25 Leaders Seven Media Asia Awards 2019, dengan kategori Top Leader and Best Performance, yang diserahkan dalam sebuah selebrasi yang berlangsung di Harris Hotel and Residences Sunset Road Denpasar – Bali, Jumat malam tanggal 1 November 2019. Wali

Kota Fasha di ganjar penghargaan dan apresiasi tersebut atas kegigihan,

prestasi dan sumbangsihnya bagi kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta pencapaian kinerja dan kepemimpinan terbaik bagi daerah yang dipimpinnya.

17. PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI ROLE MODEL PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DENGAN KATEGORI SANGAT BAIK DARI MENPAN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan hasil evaluasi pelayanan publik kepada pemerintah daerah di wilayah I termasuk Kota Jambi bertempat di Batam, Kepulauan Riau, Kamis tanggal 7 November 2019.

18. PIAGAM KEHORMATAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) PROVINSI JAMBI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jambi menggelar syukuran gedung seretariat <u>PWI Provinsi Jambi</u>, di Jalan Jakarta Ujung, No 3 Kotabaru, Kota Jambi, Sabtu tanggal 16 November 2019 Gedung yang dibangun sejak 1998 itu baru selesai direnovasi. Kegiatan peresmian itu turut dihadiri Ketua Umum PWI Pusat, Atal Depari dan Wakil Ketua Dewan Pers Hendri CH Bangun.

Wali Kota Jambi Sy Fasha mendapat penghargaan dari PWI sebagai tokoh peduli pers. Dirinya mengatakan, dengan penghargaan ini diharapkan dapat memicu semangat untuk membawa kemajuan di Kota Jambi.

19. PIAGAM KEHORMATAN APRESIASI BUNDA PAUD TINGKAT NASIONAL TAHUN 2019



Kota Jambi sukses membuktikan dirinya sebagai daerah yang sangat produktif dan konsisten untuk terus berprestasi dan meraih berbagai penghargaan bergengsi.

Seolah haus untuk terus berprestasi, dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir, Kota Jambi terus ukir prestasi membanggakan. Berbagai penghargaan dan prestasi beruntun menghampiri Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi.

Tidak mau ketinggalan, Bunda PAUD Kota Jambi Hj. Yuliana Fasha, S.E., M.Si. Ak. Ca., Senin tanggal 18 November 2019, menerima penghargaan Apresiasi Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Tingkat Nasional Tahun 2019.

Bertempat di Balai Kartini Jakarta, penganugerahan penghargaan tersebut di tandai dengan penyerahan piagam, trophy, souvenir serta penyematan pin emas Bunda PAUD yang di serahkan langsung oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional Hj. Tri Suswati Tito Karnavian.

Acara yang dirangkai dengan Peluncuran Program Penguatan Pendidikan Karakter Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini itu, turut pula dihadiri Ibu Wury Estu Handayani (Istri Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin), Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhajir Effendi, serta Mendikbud Nadiem Makarim.

Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019 ini hanya diserahkan kepada 6 orang Bunda PAUD Provinsi dan 23 orang Bunda PAUD Kabupaten / Kota di Indonesia. Yang paling membanggakan adalah Hj. Yuliana Fasha merupakan satu-satunya Bunda PAUD dari Provinsi Jambi yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Penghargaan Apresiasi Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2019 merupakan ajang apresiasi dan penganugerahan atas kinerja, serta kepedulian Bunda PAUD dari berbagai Provinsi serta Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia.

20. PENGHARGAAN RATING KOTA CERDAS INDONESIA (RKCI) 2019 UNTUK KATEGORI KOTA SEDANG



Tak henti untuk terus berprestasi, Kota Jambi kembali mengukir prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019 untuk Kategori Kota Sedang.

Kali ini, penghargaan dibidang Teknologi Informasi dan implementasi Kota Pintar (Smart City) tersebut, diberikan oleh kampus ternama Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bekerjasama dengan BPPT dan Kemenkominfo Republik Indonesia.

Bertempat di Aula ITB, Senin tanggal 18 November 2019, penghargaan prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Rektor ITB, Kadarsah Suryadi. Mewakili Wali Kota Jambi menerima penghargaan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi & Informatika Kota Jambi, Drs. Nirwan, ME. Penghargaan itu merupakan bagian dari kegiatan Riset dan Rating Kota Cerdas Indonesia Tahun 2019, yang telah dicanangkan dan telah melalui tahapan penilaian sejak beberapa waktu lalu.

Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan kota, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan (role model) bagi tata kelola kota di Indonesia dalam pengembangan kota cerdas (smart city).

21. PENGHARGAAN SWATI SABA WIWERDA



Kota Jambi meraih penghargaan membanggakan di bidang kesehatan, yaitu Penghargaan Swasti Saba (Kota Sehat) Tahun 2019. Hebatnya, Kota Jambi tahun ini mengupgrade tingkatan kualifikasi, yang sebelumnya Swasti Saba Padapa (Tahun 2017), menjadi Swasti Saba Wiwerda.

Penghargaan Kota/Kabupaten Sehat tersebut diterima Wakil Wali Kota Jambi Maulana, dan diserahkan secara bersama oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin tanggal 19 November 2019.

Dalam sambutannya, Terawan berharap agar momentum ini memberi manfaat dan pemahaman yang sama terkait arah dan kebijakan pembangunan kesehatan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, menuju Indonesia Sehat.Program Kota/Kabupaten Sehat (KKS) bertujuan agar tercapai kondisi kabupaten kota bersih, aman, nyaman dan sehat, untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warganya. Setiap tahun genap, dilakukan verifikasi KKS tingkat provinsi.

22. PIAGAM PENGHARGAAN THE BEST LEADER 2019 ATAGOVAL 2019dan PIAGAM KEHORMATAN BEST DATA IT CENTER DAN THE BEST DATA INFRASTRUCTURE



Wali Kota Syarif Fasha seolah tak ingin berhenti untuk terus membuktikan dirinya sebagai seorang kepala daerah yang terus menuai prestasi

gemilang. Terutama dibidang smart city (kota pintar), yang telah dirintisnya sejak periode pertama kepemimpinannya sebagai Wali Kota Jambi.

Setelah dalam hitungan hari, perguruan tinggi terkemuka Institut Teknologi Bandung (ITB) menobatkan Kota Jambi sebagai Kota Cerdas Indonesia dalam program penghargaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2019, dengan berhasil memboyong 7 kategori penghargaan sekaligus, kini Wali Kota Fasha kembali meraih apresiasi dibidang IT dan smart city, melalui ajang penghargaan Top Digital Awards 2019, yang diselenggarakan oleh media terkemuka, IT Works.

Dalam prosesi anugerah yang berlangsung di Hotel Sultan, Rabu malam tanggal 27 November 2019 tersebut, penghargaan yang diterima Wali Kota Jambi pun tak tangung-tanggung. Ia berhasil menyabet 3 kategori penghargaan sekaligus, yaitu Top Digital Implementation 2019 on City Government, Level Star 4, Top Digital Transformation Readiness 2019, dan Top Leader on Digital Ip mplementation 2019.

Apresiasi ini merupakan penghargaan yang ketiga kalinya dalam 3 tahun berturut-turut diraih oleh Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha sejak 2017 lalu. Sebelumnya pada tahun 2017, Wali Kota Syarif Fasha berhasil meraih penghargaan "Top IT Implementation on Smart City Develompment 2017". Di tahun 2018 meraih penghargaan "Top Leader on IT Leadership 2018" dan "Top IT Improvement 2018".

Raihan prestasi itu, tak lepas dari duet kepemimpinan Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, bersama wakilnya Dr. dr. H. Maulana, MKM, yang sangat berkomitmen tinggi dalam membangun Kota Jambi.

23. PENGHARGAAN WALIKOTA ENTERPRENEUR AWARD 2019



Penghargaan dan apresiasi sepertinya terus tertuju kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasha. Wali Kota dengan

jargon Kota Jambi Terkini itu kembali menerima penghargaan tingkat nasional dibidang kewirausahaan (entrepreneurship), yaitu Wali Kota Entrepreneur Award 2019.

Bertempat di Ballroom The Ritz-Carlton Pacific Place Jakarta, pada Rabu tanggal 4 Desember 2019, Philip Kotler Center for ASEAN Marketing menobatkan Wali Kota Jambi Syarif Fasha sebagai Wali Kota Enterpreneur dan berhak menerima penghargaan Wali Kota Entrepreneur Award 2019 untuk kategori Perdagangan.

24. PENGHARGAAN PEMERINTAH KOTA DENGAN PREDIKAT TERBAIK DENGAN CAPAIAN AKSI KOORDINASI DAN SUPERVISI PENCEGAHAN KORUPSI SECARA NASIONAL TAHUN 2019



Momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKODIA) Tahun 2019 pada tanggal 9 Desember 2019, menjadi hari yang paling istimewa bagi masyarakat Tanah Pilih Pusako Batuah Kota Jambi. Bagaimana tidak, Kota Jambi dibawah kepemimpinan H. Syarif Fasha-Maulana, mendapat kado istimewa, penghargaan sebagai Pemerintah Daerah Kota dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019.

Kota Jambi masuk dalam jajaran 3 daerah terbaik, selain Kota Gorontalo dan Balikpapan, dari total 10 nominator se-Indonesia yang masuk dalam nominasi, sekaligus juga satu-satunya kepala daerah dari Provinsi Jambi yang berhasil meraih penghargaan bergengsi dibidang aksi melawan korupsi di Indonesia itu.

25. PENGHARGAAN KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA



Bertempat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jakarta, Selasa siang pada tanggal 11 Desember 2019, Walikota Fasha menerima penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2017. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasona H Laoli.

Penganugerahan penghargaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan Peringatan HAM Sedunia ke-70 Tahun 2018.

26. PENGHARGAAN CAPAIAN MATURITAS SPIP DAN KAPABILLITAS SPIP



Pemerintah Kota
Jambi meraih
Predikat
Maturitas SPIP
Level 3 dari BPKP
pada tanggal 22
Januari 2020.

Penerimaan penghargaan langsung diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Rudy M. Harahap, diterima langsung oleh Walikota Jambi, Syarif Fasha, yang berlangsung di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Walikota. Acara diawali dengan silaturahmi dan ramah tamah di rumah dinas Walikota Jambi.

27. PENERIMAAN HASIL EVALUASI SAKIP



Pemkot Jambi berhasil mempertahankan nilai B, atas laporan akhir evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019, dengan skor penilaian

yang meningkat lebih tinggi dibanding SAKIP Tahun 2018, pada acara

Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Wilayah I Tahun 2019, di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin tanggal 10 Februari 2020.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha, menerima hasil evaluasi SAKIP dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo.

Penyerahan SAKIP Wilayah I tersebut meliputi wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

BAB 4 PENUTUP

Bab 4 Berisi:

Kesimpulan dari Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Sebagai bahan pertanggungjawaban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi ini merupakan sarana untuk introspeksi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Selain itu diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat dibutuhkan terutama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan serta dapat memberikan manfaat bagi proses penyusunan rencana di masa mendatang.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan berbagai urusan pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah Kota Jambi. Di masa mendatang Pemerintah Daerah Kota Jambi akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama.

Secara umum dari 34 rasio indikator kinerja utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Jambi di tahun 2019, sebagian besar telah mencapai target dengan persentase capaian lebih atau sama dengan 91 masuk dalam

kategori SANGAT TINGGI sebanyak 25 indikator (73,52 persen), 2 indikator (5,88 persen) masuk dalam kategori TINGGI, 1 (satu) indikator masuk kategori RENDAH (2,95 persen), 1 (satu) indikator (2,95 persen) masih masuk dalam kategori SANGAT RENDAH serta dengan ada 5 (lima) Indikator (14,70 persen) yang sampai dengan akhir masa evaluasi ini belum dapat di evaluasi. Secara rekapitulasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	INDIKATOR KINERJA UTAMA (BUAH)	PERSENTASE (%)
1.	<u>></u> 91	SANGAT TINGGI	25	73,52
2.	76 <u><</u> 90	TINGGI	2	5,88
3.	66 <u><</u> 75	SEDANG	0	0
4.	51 <u><</u> 65	RENDAH	1	2,95
5.	<u><</u> 50	SANGAT RENDAH	1	2,95
6.	TIDAK DAPAT DIEVALUASI		5	14,70
	JUMLAH		34	100

Dari hasil rekapitulasi pencapaian target IKU tahun 2018 yang belum sesuai target dan masuk dalam kategori sangat rendah adalah persentase PMKS yang tertangani persentase capaian sebesar 38,86 persen. IKU yang belum dapat mencapai realisasi sesuai target akan menjadi catatan dan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Jambi.

Selain itu keberhasilan maupun kekurangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak terlepas pula dari adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2019 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di tahun 2020. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun 2019 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari



solusinya, sehingga visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Jambi dapat dicapai pada akhir masa jabatannya.

Namun demikian hambatan dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut umumnya telah dapat diatasi dengan menggunakan daya dukung dan kemampuan organisasi yang ada. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Jambi akan meningkatkan dan mempersiapkan strategi-strategi pemecahan yang lebih efektif sehingga tahun – tahun mendatang hambatan maupun kendalanya dapat diminimalisir sedini mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2019. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi selama tahun 2019 dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Jambi, Maret 2020 WALIKOTA JAMBI

Dr.H.SYARIF FASHA, ME

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KOTA JAMBI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.SYARIF FASHA, ME

Jabatan : Walikota Jambi

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjianini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Jambi, 2019

WALIKOTA JAMBI

Dr. H.SYARIF FASHA, ME

NO	MISI, TUJUAN	SASARAN		NDIKATOR KINERJA JTAMA PEMERINTAH DAERAH	SATUAN	TARGET AWAL 2018	TARGET TAHUN 2019						
1	2	3		4	5	6	7						
	MISI 5: PEI	NINGKATAN KUALITAS	S KEHIDUPAN MASYARAKAT PERKOTAAN										
	TUJUAN 1	: Terwujudnya Sumber	Daya	aya Manusia Yang Berdaya Saing									
	(15)	Meningkatkan derajat kesehatan	23.	Angka Harapan Hidup (AHH)	%	72,34	72,35						
	(16)	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	24.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	%	14,25	14,60						
		PENINGKATAN KUALITA N 1: Terwujudnya Sumbe Meningkatkan derajat kesehatan Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan Meningkatkan penduduk Meningkatkan kesetaraan gender Meningkatkan kesetaraan gender Meningkatkan pemenuhan hak anak Meningkatkan pembangunan Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	25.	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	%	21,32	21,32						
			26.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	%	10,68	10,68						
	(17)	Mengendalikan angka kelahiran penduduk		Laju pertumbuhan penduduk	%	N/A	1,05						
			28.	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	N/A	96,23						
	(18)	_	29.	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,89	94,90						
			30.	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,07	68,10						
	(19)		31.	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	50	70						
	(20)	partisipasi masyarakat	32.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	60,23	60,23						
	(21)		33.	Indeks pembangunan pemuda	%	N/A	50,00						
	(22)	Menurunkan angka PMKS	34.	Persentase PMKS yang tertangani	%	60	65						

Lampiran 3. Sasaran, Indikator Kinerja dan cara Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA					
	PRIORITAS I PENINGKATAN KUALITAS INFRASTR	UKT	JR KOTA YANG BERKELAI	NJUTAN							
1.	Meningkatkan layanan infrastruktur dan	1.1.	Cakupan layanan	%	53,07	Jlh realisasi cakupan layanan infrastruktur dan utilitas					
	utilitas perkotaan		infrastruktur dan utilitas	70	00,07	Jlh target cakupan layanan infrastruktur dan utilitas					
	Meningkatkan perlindungan dan	2.1.	Indeks kualitas air	Indeks	37,75						
	pengelolaan lingkungan hidup	2.2.	Indeks kualitas udara	Indeks	80,7	Berdasarkan Permen LHK Nomor 78/MENLHK/Setjen/SET.1/9/2016 tentang					
		2.3.	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	41,30	Penetapan Indikator Kinerja Utama					
	PRIORITAS 2 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER		MANUCIA								
	Meningkatkan profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah		Indeks sistem pemerintahan berbasis	Indeks	2,44	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata					
	berbasis TIK	3.2	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	56	Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN					
			Nilai SAKIP	Nilai	В	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,					
			Indeks Survey persepsi korupsi	Indeks	3,65	Penilaian berdasarkan hasil evaluasi dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan KemenPAN RB					
			Indeks kepuasan masyarakat	Indeks 85,5		Indeks hasil kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey masyarakat Kota Jambi					
4.	Menurunkan tingkat pelanggaran	4.1	Penyelesaian jumlah kasus			JIh pelanggaran PERDA dan PERWAL yang diselesaikan x 100%					
	terhadap PERDA dan PERWAL		atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	%	82	Jlh pelanggaran PERDA dan PERWAL yang dilaporkan dan/atau dipantau					
	Meningkatkan pelayanan pada kondisi	5.1		%	100	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran yang tertangani x 100%					
	pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan		pemadam kebakaran			Cakupan pelayanan pemadam kebakarai					

6.	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	6.1	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	%	20	Jlh Forum Kemasyarakatan yg akan menjadi sasaran dilakukan <u>pembinaan</u> x 100% Jlh Forum kemasyarakatan yang terdaftar
7.	Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	7.1	Persentase Orkesmas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	%	20	Jlh Orkesmas dan Parpol yang aktif x 100% Jlh Orkesmas dan Parpol yang terdaftar
8.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas pendidikan	8.1	Harapan lama sekolah (HLS)	%	14,60	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
		8.2	Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan pendidikan	%	21,32	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
		8.3	Rata-rata lama sekolah (RLS)	%	10,68	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
9.	Meningkatkan kesetaraan gender	9.1	Indeks pembangunan gender	Indeks	94,90	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
		9.2	Indeks pemberdayaan gender	Indeks	68,10	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
10.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	10.1	Persentase hak anak yang terpenuhi	%	70	<u>Jlh variabel kota layak anak</u> x 100% Konstanta 1.000
11.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	11.1	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	%	60,23	Variabel data LPM/KPM aktif x 100% Variabel data LPM/KPM yang ada
12.	Meningkatkan prestasi dan kreativitas kepemudaan	12.1	Indeks pembangunan pemuda	%	50,00	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
	PRIORITAS 3 PENANGGULANGAN KEMISKINAN					
13.	Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	13.1	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	%	36	Jlh realisasi sasaran bina perdagangan x 100% Jlh target sasaran bina perdagangan
14.	Meningkatnya ketahanan pangan	14.1	Skor pola pangan harapan	%	90,59	Aplikasi Harmonisasi Penghitungan Skor Pola Pangan Harapan (Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian)

	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja	15.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)	%	65	<u>Jlh angkatan kerja</u> x 100% Jlh penduduk usia kerja
	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil		Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	%	8,08	<u>Jlh UKM berkualitas</u> x 100% Jlh berkualitas
		16.2	Persentase daya saing produk IKM	%	4,3	Jlh realisasi sasaran bina perindustrian x 100% Jlh target sasaran bina perindustrian
		16.3	Persentase koperasi berkualitas	%	16,06	<u>Jlh koperasi berkualitas</u> x 100% Jlh koperasi aktif
17.	Meningkatkan derajat kesehatan	17.1	Angka harapan hidup (AHH)	%	72,35	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
	Mengendalikan angka kelahiran penduduk		Laju pertumbuhan penduduk	%	1,05	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
		18.2	Persentase jumlah keluarga sejahtera	%	96,23	<u>Jlh Klrg sejahtera I + klrg sejahter II</u> x 100% Jlh keluarga
19.	Menurunkan angka PMKS	19.1	Persentase PMKS yang tertangani	%	65	<u>Jumlah PMKS yang tertangani</u> x 100% Jumlah PMKS
	PRIORITAS 4 PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN	PROI	MOSI DAERAH			
	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	20.1	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	%	2,37	Badan Pusat Statistik Kota Jambi
21.	Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	21.1	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)	%	8	Realisasi tahun n - realisasi tahun -n x 100% Realisasi tahun - n
22.	Meningkatkan realisasi investasi	22.1	Realisasi investasi	Rupiah	430,5 M	Rencana Investasi Pelaku Usaha/thn x 100% Realisasi Investasi Pelaku Usaha/thn

Rencana Aksi Periode 2019 - 2023 Tahun 2019

N			Т		Kiner	ja					Target				wal k			
0	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TD 1	Sasaran TR 1 TR 2 TR 3 TR 4		TD 4	Program	Kegiatan	Anggaran	Indikator Kegiatan	Kegiatan	Penanggung Jawab		TR 1 TR 2 TR 1 2 3 4 5 6 7 8				
1				TKZ	TK 3	111.4	Penyelenggaraan Trantibum, Serta	Sosialisasi Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	4.460.000.000	Terlaksananya Pengawasan, Penyidikan Dan Penegakan Regulasi Daerah	75 (%)	Said Faisal. SH					,	
	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL					Penegakan Regulasi Daerah	Pengaman, Pengawalan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	609.000.000	Terlaksananya Pengaman, Pengawalan Dan Penertiban Serta Pendataan dan Pemetaan Rawan Trantibum dan Tranmas	69 (%)	M. Fajri. SE. ME		$\ $	$\ $			T	
	terhadap PERDA dan PERWAL	peranggalan PENDA dan PENWAL					Pembinaan Dan Pemeliharaan Perlindungan Masyarakat	Pembinan, Pengawasan, Evaluasi dan Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	220.000.000	Pencitraan Satuan Polisi Pamong Praja	42 (%)	Fengky Ananda. S.STp. ME		I	I			Ī
							Perlindungan Masyarakat	Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	578.718.800	Terlaksananya Pendataan, Pembentukan dan Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masvarakat	54 (%)	Mukhatab. S.IP			$ lap{I}$			I
2	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca		(%)	(%)	(%)	(%)		Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual Kebencanaan					Ш		\prod			
			(%)	(%)	(%)	(%)		Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran							Ц	Ц	Ц	Ţ
			(%)	(%)	(%)	(%)		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan					Ш	Ш	Ш		П	
			(%)	(%)	(%)	(%)		Pencegahan dan Pengendalian Kebencanaan					Ш	П	П	П	П	Т
		Cakupan pelayanan pemadam kebakaran		(%)		(%)	Program Peningkatan Kesiagaan	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana					Ш	П	П	Т	П	T
							Dini dan Manajemen Logistik Kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran										
								Kemitraan Asuransi Jiwa dan Kesehatan Satuan Tugas Kebencanaan					Ш					
								Kegiatan Rekruitment Tenaga sukarela penanggulangan bencana					Ш					Ţ
								Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebencanaan					Ш			Ш		
3	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat							Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Keamanan		- Jumlah rapat dan rekomendasi FKDM - Jumlah survey lokasi kegiatan FKDM - Jumlah rapat dan rekomendasi tim pemantauan orang asing - Jumlah survey orang asing - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PKS - Jumlah sosialisasi terorisme dan radikalisme	100 (%)	Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah)						
							Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		- Jumlah rapat dan rekomendasi FKUB - Jumlah pemantauan rumah ibadah, lapo tuak dan rekomendasi IMB rumah ibadah - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PAKEM - Jumlah rapat dan rekomendasi pegiat seni	100 (%)	Beni Handoko, SE (Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)						

	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)		Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		- Jumlah peserta silaturrahmi kebangsaan - Jumlah peserta pendidikan kebangsaan - Jumlah siswa/orang yang di tes urine - Jumlah peserta sosialisasi Narkoba - Jumlah rapat dan rekomendasi atau kebijakan	100 (%) 100 (%)	Tri Putra Jaya, SS (Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)			
							Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	204.498.000	- Jumlah rapat dan pemantauan situasi politik - Jumlah peserta pendidikan politik - Jumlah peserta sosialisasi UU Pemilu - Laporan pelaksanaan Pemilu	100 (%)	Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan			
						Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Parpol	25.425.000	- Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan - Jumlah peserta sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018	100 (%)	Kewaspadaan Daerah)			
		5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)		Pemantauan Orkemas	43.925.000	- Jumlah rapat koordinasi dan rekomendasi - Jumlah pengawasan dan pemantauan Orkemas	100 (%)	Beni Handoko, SE (Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)			
Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingknya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat							Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Keamanan	86.529.000	- Jumlah rapat dan rekomendasi FKDM - Jumlah survey lokasi kegiatan FKDM - Jumlah rapat dan rekomendasi tim pemantauan orang asing - Jumlah survey orang asing - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PKS - Jumlah sosialisasi terorisme dan radikalisme	100 (%)	Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah)			
		5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)	Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	141.750.000	- Jumlah rapat dan rekomendasi FKUB - Jumlah pemantauan rumah badah, lapo tuak dan rekomendasi IMB rumah ibadah - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PAKEM - Jumlah rapat dan rekomendasi pegiat seni	100 (%)	Beni Handoko, SE (Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)			
	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila						Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		- Jumlah peserta silaturrahmi kebangsaan - Jumlah peserta pendidikan kebangsaan - Jumlah siswa/orang yang di tes urine - Jumlah peserta sosialisasi Narkoba - Jumlah rapat dan rekomendasi atau kebijakan	100 (%)	Tri Putra Jaya, SS (Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)	\prod		
						Brogram Bombinson	Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	204.498.000	- Jumlah rapat dan pemantauan situasi politik - Jumlah peserta pendidikan politik - Jumlah peserta sosialisasi UU Pemilu - Laporan pelaksanaan Pemilu - Jumlah partai politik yang	100 (%)	Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah)			
		5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Parpol	25.425.000	mendapatkan bantuan - Jumlah peserta sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018	100 (%)				
							Pemantauan Orkemas	43.925.000	- Jumlah rapat koordinasi dan rekomendasi - Jumlah pengawasan dan pemantauan Orkemas	100 (%)	Beni Handoko, SE (Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)			
Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan							Fasilitasi Pemantauan dan		- Jumlah rapat dan rekomendasi FKDM - Jumlah survey lokasi kegiatan FKDM - Jumlah rapat dan rekomendasi tim pemantauan orang asing - Jumlah survey orang asing - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PKS - Jumlah sosialisasi terorisme		Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan			

	5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)	Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonom	141.750.000	- Jumlah rapat dan rekomendasi FKUB - Jumlah pemantauan rumah ibadah, lapo tuak dan rekomendasi IMB rumah ibadah - Jumlah rapat dan rekomendasi tim PAKEM - Jumlah rapat dan rekomendasi	100 (%)	Beni Handoko, SE (Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)					
Persentase orkesmas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat						Pembinaan dan Pengembangan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Forum Komunikasi Pimpinan	266.610.000	- Jumlah peserta silaturrahmi kebangsaan - Jumlah peserta pendidikan kebangsaan - Jumlah siswa/orang yang di tes urine -	100 (%)	Tri Putra Jaya, SS (Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan)					
						Daerah (FORKOPIMDA)	68.930.000		100 (%)		Ш	П	Ш		
						Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	204.498.000	- Jumlah rapat dan pemantauan situasi politik - Jumlah peserta pendidikan politik - Jumlah peserta sosialisasi UU Pemilu - Laporan pelaksanaan Pemilu	100 (%)	Leon Fadenan. Z, SH (Kabid Politik dan					
	5 (%)	5 (%)	5 (%)	5 (%)	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Fasilitasi bagi Orkemas dan Parpol	Pembinaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan bagi Parpol	25.425.000	- Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan - Jumlah peserta sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018	100 (%)	Kewaspadaan Daerah) Beni Handoko, SE					
						Pemantauan Orkemas Pengadaan dan Peningkatan	43.925.000	- Jumlah rapat koordinasi dan rekomendasi - Jumlah pengawasan dan pemantauan Orkemas Jumlah software informasi yang	100 (%)	(Kabid Ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan)		Щ			
					Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan	Sarana dan Prasarana Keselamatan Perhubungan	4.568.390.000	diupdate dan diperlihara dengan	100 (%)	ZULKIFLI.MA, SE	Ш		Ш		
		25,2 (%)		26,7 (%)		Penyusunan Perencanaan, Norma, Kebijakan dan Standar Perhubungan	673.400.000	Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lalulintas	100 (%)	ARPAN, SH					
						Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.788.630.000	Jumlah Pelayanan dan Penyelenggaraan Angkutan Jalan Berjalan Aman dan Lancar	34 (%)	DODDY MARYANTO, SH	Ш		Ш		П
				21,5 (Titik	Pengendalian dan Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Operasional Perhubungan	775 500 000	Penurunan jumlah titik kemacetan	31 (%)	DEDI AFRIANTO, ST		П			
					Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Peningkatan Efektifitas Operasional Pemungutan Retribusi		Persentase peningkatan PAD parkir	90 (%)						
				20,9		Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Parkir Penertiban Sarana Parkir		Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana parkir Jumlah Titik Parkir yang tertata	9 (Jumlah) 488 (Titik)	SETIA BUDI, SE	Щ	#	\blacksquare		Н
				Г	Program peningkatan kualitas	Penyelenggaraan perumahan	434.360.000	Terwujudnya Perumahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 (Tahun)	ISKANDAR MIRZA, SE, MTP			П		
					lingkungan permukiman berbasis kawasan	Penyelenggaraan permukiman	2.696.046.000		30 (unit)	ARIANE MIRTACIANA SARI, ST	Ш	Ш	Щ		Ц
						Pengawasan bangunan	263.095.000	, ,	100 (%)	M. HUSNI, SH	Щ	Щ	Ш	Ш	Ц
					Program pembangunan,pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Peningkatan dan pemeliharaan LPJU	22.853.245.000	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan dan Taman Rekening Listrik Lampu Jalan Umum dan Pemeliharaan Lampu Hias	12 (Bulan)	NUJUMUDDIN, SE					
					·	Peningkatan dan pemeliharaan makam	1.905.000.000		15 (Lokasi)	ENDANG SUSILAWATI, SE					
	1,31 5 (%)	1,31 5 (%)	1,31 5 (%)	5	Program Pembangunan, Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Pembangunan, / Pemeliharaan Jaringan Sungai, Saluran Drainase / Gorong - Gorong	10.990.300.000	Pembangunan Saluran Drainase Pembangunan Box Culvert Pemeliharaan dan Normalisasi Sungai Kota Jambi	5841 (Meter) 20 (Unit) 40196 (Meter Lari)	PADJERIOSNOP, ST, MM					
						Pembangunan dan pemeliharaan jalan	#######################################	Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang ditangani Jumlah Ruas Jalan Status Kota yang ditangani	17 (Ruas Jalan) 17 (Ruas Jalan)	HORAS BONIFASIUS S, ST					

				I	I		Jumlah Ruas Jaling yang ditangani	271 (Ruas Jaling)]					11	ı
0,68 5 (%)	0,68 5 (%)	0,68 5 (%)	0,68 5 (%)	Program Pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan		40.040.575.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	271 (Ruas Jaling) 4000 (Meter Persegi)				Ï	Ī	П	T
					Pembangunan jembatan	10.349.575.000	Pembangunan Jembatan	4 (Unit) 4 (Unit) 12 (bulan) 12 (bulan)	BINSAR F.G. BUTAR BUTAR, ST						
					Operasional dan Pemelihara Unit Pengelola Campuran Aspal (UPCA)	907.380.000	Operasional Peralatan dan Perbekalan	12 (bulan) 12 (bulan)	ZUBAINI		П	Ш	Ш		
							Pembangunan Jaringan Pipa	10 (Lokasi) 10 (Lokasi) 10 (Lokasi) 325					Ī	П	
					Pengembangan Sistem Distribusi Jaringan Air Bersih/Air Minum	3.072.244.000		(Sambungan Rumah)	MUHAMMAD KIFRAWI, BE						
					Garrigan / An Dersity An William		Pemasangan SR Air Bersih	325 (Sambungan Rumah)	INITOWN, DE						
								325 (Sambungan Rumah)					Ш		
0,25			0,25	Program Pembangunan Pemeliharaan dan Perluasan Utilitas	Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Permukiman Penduduk	23.554.400.000	Pembangunan SR Sanitasi	736 (Sambungan Rumah) 736 (Sambungan Rumah) 736 (Sambungan	H. ERMAN JURI, SE						
(%)	(%)	(%)	(%)	Perkotaan			Pedestrian Jalan	Rumah) 1 (Lokasi) 1 (Lokasi) 1 (Lokasi)							
					Pembangunan Gedung/ Utilitas Pemerintah	54.394.997.900	Pembangunan Gedung	37 (Unit) 37 (Unit) 37 (Unit) 73 (Unit)	ZAMZAMI, SE						
							Rehab Gedung	73 (Unit) 73 (Unit)							
					Peningkatan kinerja pengelolaan angkutan	100.000.000	Operasional pengelolaan angkutan	12 (bulan) 12 (bulan) 12 (bulan)	ZAMZAMI, SE		П	П	П		T
					Peningkatan operasional TPA	5.769.598.500	Operasional TPA	12 (bulan) 12 (bulan) 12 (bulan)	SANTOSO, SE		П	П	П		
					Peningkatan operasional IPLT	1.736.188.250	Operasional IPLT	12 (bulan) 12 (bulan) 12 (bulan)	Ir. GANDI SUBROTO		П	П	П	П	T
1	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis	Perencanaan, Koordinasi dan Pengawasan Bidang Ke PU an	757.120.600	an Penyusunan Dokumen RKA/DPA	1 (dokumen) 2 (dokumen)	LISA RAKHMAWATI SAPUTRI, ST,M.Ars						I
(%)	(%)	(%)	(%)	Kawasan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	80.000.000	Laporan Capaian Kinerja ke-PU-an Laporan Dokumen Harga Satuan Barang	3 (dokumen) 1 (dokumen)	AMRIYANTO, ST						
0,13 5	0,13 5	0,13 5	0,13 5	Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengendalian	Penataan Ruang Kota	646.000.000	Draft RDTR Laporan Pemanfaatan Tata Ruang	1 (dokumen)	PURWATY, ST, MT		H	H	H	П	\mp
(%)	(%)	(%)	(%)	Pemanfaatan Ruang	Pengawasan pemanfaatan ruang	258.097.000	Kota Jambi	1 (dokumen)	ISKANDAR MIRZA,	Щ	Ц	Щ	Ц	Ц	_
				Program neningkatan kualitas	Penyelenggaraan perumahan	434.360.000	Terwujudnya Perumahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	1 (Tahun)	SE, MTP		Ш	Ш	Ш		

	I						lingkungan permukiman berbasis	Penyelenggaraan permukiman	2.696.046.000	Terwujudnya Permukiman yang layak huni	30 (unit)	ARIANE MIRTACIANA SARI, ST					
							kawasan	Pengawasan bangunan	263.095.000	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan IMB	100 (%)	M. HUSNI, SH		П	П	П	
							Program pembangunan,pemeliharaan dan perluasan utilitas perkotaan	Peningkatan dan pemeliharaan LPJU	22.853.245.000	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan dan Taman Rekening Listrik Lampu Jalan Umum dan Pemeliharaan Lampu Hias	12 (Bulan)	NUJUMUDDIN, SE					
							portación atimas portocado	Peningkatan dan pemeliharaan makam		Terawatnya dan Tertatanya TPU	15 (Lokasi)	ENDANG SUSILAWATI, SE	Ш	Ш	\mathbf{H}	Π	
•	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					43,3		Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan		Terlaksanaya pemantauan sumber pencemaran Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	1 (laporan) 100 (%)	Kasi PPKL			T	П	T
		Indeks kualitas air	ks) (Inde	ks) (Inde ks)	(Inde ks) (Inde	ks) (Inde ks)	Program penurunan beban pencemaran	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	1.357.623.066	reicapaniya junian samper yang diuji In house training	250 (Sampel) 3 (Kali)	KA UPTD Laboratorium					
							Program peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	32.855.505.800	Sosialisasi Limbah B3 Pelatihan pengolahan sampah Terlaksananya pengelolaan	1 (Kali) 10 (Lokasi)	. Kabid Mobilisasi Persampahan		\parallel	\parallel	H	
			(%) (%)	(%) (%)	(%) (%)	(%) (%)	Pengelolaan Persampahan	I өннукасан гөнуөмаан ранк Sampah	332.085.500	persampahan dan limbah B3 Terlaksananya pengurangan sampah melalui Bank Sampah	1 (Tahun) (Ton/Tahun)	Kasi Pengurangan Sampah	Ш	Ш	\parallel	Ħ	
			(,0)	(70)	(,0)	(70)				Terlaksanaya pemantauan sumber pencemaran	1 (laporan)			Ш		П	П
						43,3		Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	669.956.600	Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	100 (%)	Kasi PPKL					
		Indeks kualitas udara	ks) (Inde	ks) (Inde ks)	(Inde ks)	ks) (Inde ks)	Program penurunan beban pencemaran	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	1.357.623.066	Tercapainya jumlah sampel yang diuji In house training	250 (Sampel) 3 (Kali)	KA UPTD Laboratorium					
							Program peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	32.855.505.800	Sosialisasi Limbah B3 Pelatihan pengolahan sampah Terlaksananya pengelolaan persampahan dan limbah B3	1 (Kali) 10 (Lokasi) 1 (Tahun)	. Kabid Mobilisasi Persampahan					
			(%) (%)	(%) (%)	(%) (%)	(%) (%)	·	Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah	332.085.500	Terlaksananya pengurangan sampah melalui Bank Sampah	10 (Ton/Tahun)	Kasi Pengurangan Sampah					
			-			43,3 2		Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	669.956.600	Terlaksananya koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan	1 (laporan) 100 (%)	Kasi PPKL					#
		Indeks kualitas tutupan lahan	ks) (Inde ks)	ks) (Inde ks)	(Inde	ks) (Inde ks)	Program penurunan beban pencemaran	Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	1.357.623.066	Tercapainya jumlah sampel yang diuji In house training	250 (Sampel) 3 (Kali)	KA UPTD Laboratorium					
							Program noninglyston Pangondalion	Peningkatan Kinerja Pengelolaan	32.855.505.800	Sosialisasi Limbah B3 Pelatihan pengolahan sampah	1 (Kali) 10 (Lokasi)	Kabid Mobilisasi					

						Program peningkatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan	rersampanan		Terlaksananya pengelolaan persampahan dan limbah B3	1 (Tahun)	⊬ersampanan						
		(%) (%)	(%)	(%)	(%)	Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Pengelolaan Bank Sampah	332.085.500	Terlaksananya pengurangan sampah melalui Bank Sampah	10 (Ton/Tahun)	Kasi Pengurangan Sampah						
Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan		25 (%)		25 (%)	25 (%)		Kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana operasional perpasaran	346.650.000	Realisasi penerimaan retribusi pasar	4.650.000.000 (Angka)	DIAN ANGGRAINI, SE			П			ſ
						Program peningkatan pelayanan	Kegiatan penyelenggaraan pasar beduk	16.225.000	Jumlah lokasi pasar beduk	2 lokasi (Angka)	NURASIAH HASIBUAN, SH	Ш		П			Ι
						pengelolaan perpasaran	Kegiatan peningkatan pelayanan operasional perpasaran	3.606.563.500	Jumlah pasar milik pemerintah yang bersih	8 unit pasar (Angka)	Drs. T A R N A K, MM		Ш	Ш		Ш	
		10 (%)			10 (%)		Kegiatan penertiban dan pengawasan pedagang pasar daerah dan PKL di lingkungan pasar daerah	420.420.000	Jumlah pasar milik pemerintah dalam pengawasan dan penertiban	8 unit pasar (Angka)	ABDUL THALIB, SE						
							pengawasan peredaran barang dan jasa	287.120.000	dan jasa yang beredar dalam pengawasan	usaha (Angka)	SUPRIONO, SE	П				Π	1
							Kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	16.130.000	Jumlah pelaku usaha formal dalam pembinaan dan pengawasan	122 pelaku usaha (Angka)	JEMIRUN						
						Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan perdagangan dan	Kegiatan penyuluhan dan pembinaan perlindungan konsumen dan kemetrologian	144.683.000		1170 unit (Angka)	BAMBANG, S.Si, ME						
		40	10	10	10	industri	Kegiatan pelatihan sosialisasi, seminar dan penyuluhan perdagangan	140.000.000	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan. sosialisasi dan penyuluhan perdagangan	118 pelaku usaha (Angka)	Hj. ATIKA, S.Pd.I						
	Persentase pembinaan, pengawasan dan pelayanan perdagangan	10 (%) 9.75 (%)	(%) 9.75	(%) 9.75	(%) 9.75		Kegiatan sarana dan prasarana industri dan perdagangan	1.581.927.000	Persentase sarana dan prasarana perdagangan	100% (%)	M. NURUZZAMAN, S.Pt						
							Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri kimia agro dan hasil hutan	80.097.500	Jumlah IKM kimia, agro dan hasil hutan yang dibina	50 unit IKM (Angka)	SUSILAWATI, SE	Ш				Ш	
							Kegiatan pembinaan, pengembangan dan peningkatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan	26.377.500	Jumlah IKM logam, mesin, elektronika dan aneka kerajinan yang dibina	13 unit IKM (Angka)	RETNO SUARTI, SP						
							Kegiatan ekspos industri kecil dan menegah	1.300.000.000	Jumlah IKM yang bermitra dengan dekranasda dan pelaku usaha	57 unit IKM (Angka)]	Ш	Ш	Ш		Ш	
						Program pembinaan, pengembangan, peningkatan dan	Kegiatan peningkatan dan pengembangan kemasan IKM	66.318.000	Jumlah IKM yang kemasannya di kembangkan	57 unit IKM (Angka)	SUSILAWATI, SE	Ш					
						pengawasan perdagangan dan industri	Kegiatan monitoring dan evaluasi industri kecil dan menengah	32.000.000	Jumlah IKM yang dalam monitoring dan evaluasi	40 unit IKM (Angka)		Ш		Ш	Ш	Ш	
							Kegiatan peningkatan dan pengembangan SDM industri kecil dan menengah	25.000.000	Jumlah SDM IKM yang berkualitas	40 unit IKM (Angka)	RETNO SUARTI, SP	Ш	Ш	Щ	Ц		
		10	10	10	10		Kegiatan pembentukan kelembagaan Industri Kecil dan Menengah	25.000.000	Jumlah kelembagaan IKM yang terbentuk	30 unit IKM (Angka)	TALLING CONTACT, C.	Ш	Ш	Ш		Ш	
		10 (%) 9.5 (%)	(%) 9.5	(%) 9.5	(%) 9.5		Kegiatan promosi/pameran produk Jambi	384.110.500	Jumlah IKM yang ikut pameran/promosi	10 unit IKM (Angka)	NOVIARNI, S.Kom	\parallel		\parallel			
ningkatnya ketahanan pangan							Pengembangan Benih tanaman pangan, Hortikultura dan perkebunan	310.040.000	Jumlah produksi bibit unggul bersertifikasi	3000 (batang) 3000 (batang) 3000 (batang) 3000 (batang) 3000 (batang) 3000 (batang) 3000 (batang)	Drs. Azhari						
								548.900.000		5000 (ekor) 5000 (ekor)	Fianti. S.Pt						

_	_	_	 		
					peng
					penge
					pena per
					Pene tekno
					Pen
					pe peterna
					Pengen

pengembangan rumah potong hewan		Jumlah pemotongan hewan Sapi, Kerbau dan Babi di RPH	5000 (ekor) 5000 (ekor) 5000 (ekor) 5000 (ekor) 5000 (ekor)						
pengembangan perbenihan ikan	216.337.000	JUmlah peningkatan produksi benih di UPTD BBI	1.400.000 (ekor)	Eloia Agustina, Si . ME					
penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	85.200.000	Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil pertanian	120 (Orang) 120 (Orang) 120 (Orang) 120 (Orang) 120 (Orang) 120 (Orang) 120 (Orang)	Kartika Sari, S.Pt					
Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	140.927.000	Luasan pengenalan dan penggunaan varietas unggul bermutu dan pengendalian hama terpadu	5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton) 5 (Ton)	Zulkifli, S.Pt					
Penyediaan sarana produksi pertanian	440.000.000	Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha) 5,1 (Ton/Ha)	Kiris. W. Facilidadini, SP					
pengembangan agribisnis peternakan (Insemminasi Buatan)	170.806.000	Peningkatan mutu dan jumlah ternak sapi melalui IB	60 (ekor) 60 (ekor) 60 (ekor) 60 (ekor) 60 (ekor) 60 (ekor) 60 (ekor)	Budi Jaya, S.Pt					
Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan	146.064.000	JUmlah sampel pangan asal hewan yang diperiksa	80 (Sampel) 80 (Sampel) 80 (Sampel) 80 (Sampel) 80 (Sampel) 80 (Sampel) 80 (Sampel) 800 (ekor) 800 (ekor)	ME					

	peningkatan produksi, mutu produk dan diversifikasi sektor pertanian, peternakan dan perikanan	pengadaan sarana dan prasarana petemakan dan pengolahan	127.961.000	Optimalisasi pengolahan produk hasil temak	800 (ekor) 800 (ekor) 800 (ekor) 5.300 (Kg) 5.300 (Kg) 5.300 (Kg) 5.300 (Kg) 5.300 (Kg)	r. Evita Rozsa			
		informasi pasar atas hasil produk peternakan	1.268.227.000	optimalisasi pelaku usaha peternakan	5.300 (Kg) 5.300 (Kg) 300 (Orang) 2.437 (Ton) Af	shmad Zarkasih. SP			
		pembinaan dan pengembangan perikanan		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	2.437 (Ton) 2.437 (Ton) 2.437 (Ton) 2.437 (Ton) 2.437 (Ton) 2.437 (Ton)				
			95.600.000	Peningkatan produktivitas hasil perikanan bernilai tambah	2.040 (Ton) Sa 2.040 (Ton) 2.040 (Ton)	santi Novita, SP			
		Optimalisasi pengelola dan pemasaran produksi perikanan			33,1 (Kg/Kapita/Th) 33,1 (Kg/Kapita/Th) 33,1 (Kg/Kapita/Th) 33,1 (Kg/Kapita/Th)				
					33,1 (Kg/Kapita/Th) 33,1 (Kg/Kapita/Th) 33,1 (Kg/Kapita/Th)				

			pendamping pada kelompok tani pada pembudidayaan ikan	1.885.906.000	Peningkatan produktivitas perikanan peraiaran umum	0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha) 0,71 (Ton/Ha)	Maylani, S.Pt					
Skor pola pangan harapai	2,94 2,94 2,94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 9 9 9 9 9	a a a b b i i i i i i i i i i i i i i i	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1.174.174.000	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang memanfaatkan alsintan dan pupuk	37 (kelompok) 37 (kelompok) 37 (kelompok)	Danismar, S.Pt					
		program peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan tani	Peningkatan Kemampuan lembaga petani	161.183.000	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	56 (kelompok) 56 (kelompok) 56 (kelompok)	Iwan Jaya. SP					
			Pengembangan cadangan pangan pemerintah	129.248.000	Peningkatan cadangan pangan daerah	10 (Ton) 10 (Ton)	Muhammad, SP					
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	122.250.000	Penurunan Daerah Rentan Rawan Pangan	4 (Kelurahan) 4 (Kelurahan) 4 (Kelurahan)	H. Marzon.SP.MM					
			Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	128.700.000	Jumlah pangan segar yang diuji	80 (Sampel) 80 (Sampel)	Ir. Hj. Destri Eliatma	Щ	Щ	4	Н	
			Penyuluhan sumber pangan alternatif	127.625.000	Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA berbasis sumber daya lokal : - Energi ,	80 (Sampel) 2.150 (K	Rina Simorangkir, SP					
			Peningkatan kapasitas tenaga penyuluhan pertanian/perkebunan	109.960.000	Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA berbasis sumber daya lokal : - Energi ,	2.150 (K Kal/gr) 2.150 (K Kal/gr) 52 (%)						
			Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	138.992.000	Meningkatnya kelas kemampuan kelompok tani	52 (%) 52 (%) 11 (Kecamatan) 11 (Kecamatan) 11 (Kecamatan)	lwan Jaya. SP					
			Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	168.241.000	Jumlah rumah tangga anggota kelompok wanita tani yang memanfaatkan lahan pekarangan	36 (kk) 36 (kk) 36 (kk)	Ilmi Defiarti, SP					
			Rakor Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kota Jambi	37.120.000	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 (Kali) 2 (Kali) 2 (Kali)	Rita Zahara. SE					

		90,2 (Sko r) 79 (%)	90,2 (Sko r) 79 (%)	90,2 (Sko r) 79 (%)	(Sko r) 79		Penyuluhan sumber pangan alternatif	127.625.000	Peningkatan konsumsi pangan masyarakat yang B2SA berbasis sumber daya lokal :- Protein	57 (gr) 57 (gr) 57 (gr)	Rina Simorangkir, SP			
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB							Pengembangan, Pembinaan dan Pengelolaan Pariwisata Daerah	588.775.000	Haul 2x, Lomba perahu, Ketek hias, TDUP 120 rekomen dasi	terlaksana (Kali) terlaksana (Kali) terlaksana (Kali) terlaksana (Kali)	Damora Pulungan,SE,MM (Kabid Pariwisata)			
	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	00 (Ora ng)	(Ora	00 (Ora ng)	00 (Ora ng)	Program Pembinaan Peningkatan dan Perluasan Pengelolaan Budaya dan Pariwisata.	Pengembangan, Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah	978.430.000	Carna val, Pemili han BG, 10x Pagelaran dlm Daerah, 9x Luar Daerah	(Kali) terlaksana (Kali) terlaksana (Kali) terlaksana (Kali) terlaksana (Kali)	Ferry Irawan, S.STP (Kabid Promosi dan Pemasaran)			
# Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)							Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	541.500.000	Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi Pajak Daerah Tersusunnya Peraturan Pajak Daerah	6 (Jenis) 6 (Jenis) 6 (Jenis) 6 (Jenis) 3 (Dokumen) 3 (Dokumen) 3 (Dokumen) 3 (Dokumen)	Kabid Pengembangan dan Evaluasi			
							Pengendalian Pajak Daerah	491.750.000	Terwujudnya pemeriksaan, penertiban ,Penindakan serta pengawasan terhadap Objek Pajak Daerah	134,992 (WP) 134,992 (WP) 134,992 (WP) 134,992 (WP)				
							Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	947.880.000	Terlaksananya Pendataan dan penilaian pajak daerah,	400 (Kali) 400 (Kali) 400 (Kali) 400 (Kali)	Kabid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan			
	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Jumlah verifikasi , perhitungan dan penetapan pajak daerah	8000 (Berkas) 8000 (Berkas) 8000 (Berkas) 8000 (Berkas)				
							Poposikon Poiak Passak	669.000.000	Terealisasinya jumlah surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT-PBB) yang terkirim,	121,838 (SPPT PBB) 121,838 (SPPT PBB) 121,838 (SPPT PBB) 121,838 (SPPT PBB)	Kabid Penagihan dan Keberatan			
							Penagihan Pajak Daerah			350 (Surat Tagihan)				

										Terealisasinya jumlah Tagihan dan Tunggakan Pajak Daerah yang terkirim selama 1 Tahun	350 (Surat Tagihan) 350 (Surat Tagihan) 350 (Surat Tagihan)							
			0000 000 (Rup	0000 000 (Rup	0000 000 (Rup	8 6053 0000 000 (Rup iah)		Pengembangan sistem informasi pajak daerah	393.500.000	Penyediaan paket pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah	4 (Paket) 4 (Paket) 4 (Paket) 4 (Paket)	Kabid Pembukuan dan Pelaporan						
#	Meningkatkan realisasi investasi							Verifikaksi, Penerbitan, Identifikasi dokumen Perizinan	197.743.000	r .	14000 izin (Jumlah)	Kabid P4 Bangling/ Rini Yuliani.S,STP.MM						
							PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	275.480.000	Terlaksananya forum konsultasi publik dan terlaksananya publikasi pelayanan publik	2 dan 8 kali publikasi (kali)	Kabid P4 Kesos/ H.Iqbal Octaviansyah,SE.MSi	Ш					
			SAN GAT				PELATANAN PUBLIK	Monitoring,Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan		Tersedianya Informasi Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Terlaksananya tindak lanjut Pengaduan Perizinan	1 laporan buku (%) jumlah	Kabid Monev/ H.Ahmad Sumaidi.SH.MH						_
		Realisasi investasi	BAIK	(%)	(%)	(%)		Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan	38.415.000		pemohon (Jumlah)		Щ	\coprod	Ш			
							PROGRAM PENINGKATAN IKLIM	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	199.697.000		2 kali,1 buku (kali)		Ш			Ш		
							INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Sosialisasi Penanaman Modal	39.843.500	Terlaksananya Sosialisasi Penanaman Modal Terlaksananya pembinaan dan	1 kali (kali)	Kabid PM/ HJ. Rita		\blacksquare	Ш			_
			130, 84mi					Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	27.465.000	pengawasan pelaksanaan penanaman modal	12 kali (kali)	Kurniawati.SE.ME	Ш	Ш	Ш			
			lyar (Rup iah)	(Rup iah)	(Rup	(Rup		Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	2.950.000	Terlaksananya pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Penanaman Modal	12 bulan (Tahun)		Ш		Ш			
#	Meningkatkan penyerapan dan perlindungan tenaga kerja							Pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasisi masvarakat	430.225.250	berbasis Kopetensi dan Berbasis masyarakat bagi Pencari kerja di Kota Jambi	110 (Angka) 110 (Angka)		Ш					
							Peningkatan Kualitas, Perlindungan	Penyusunan penyebarluasan informasi pasar kerja	217.810.250	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antar Kerja dan Terselenggaranya Job Fair Kota Jambi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 Bidang Penempatan Tenaga Kerja	20 Perusahaan (Angka) 20 Perusahaan (Angka)	Nasution (Kabid Penta kerja)						
							dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hub industrial	108.250.000	Terlaksana Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Kasus (Angka) 40 Kasus (Angka)	Ramayanti (Kabid HI						
			16,2 4	32,4 9	48,7 5			Fasilitasi penyelesaian prosedur		Perlindungan Hukum dan Jamsostek	perusahaan (Angka)	dan Pengawasan Koperasi)						
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	(%) 13,9		(%) 42			perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	40.446.000	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan (Angka)							
								Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	140.400.000		30 Orang (Angka)				\prod		T	
							Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	270.284.500	Terlaksananya pelatihan Olahan Makanan, Terlaksananya Pelatihan Sertifikat label halal, Terlaksana Pelatihan Handy Carft	270 Orang dan 15 UKM (Angka)	Iman Bastian (Kabid UMKM)						

			2,02	4,04 (%)	6,06	(01)		Penguatan pemasaran bagi produk	449.760.750	Terlaksananya Kegiatan penguatan pemasaran promosi produk	Daerah dan 4] [П		
			(%)	(%)	(%)	(%)		usaha mikro, kecil dan menengah Monitoring, evaluasi dan pelaporan		koperasi, UMKM Tersedianya Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Kali (Angka) 40 Koperasi (Angka)	Rahmayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)			Ħ			
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	101.380.000	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	5 Angkatan/10 kali (Angka)	Yuda Dharma (Kabid			\prod			
			4,01 (%)	8,03 (%)	12,0 5 (%)			koperasi Pembinaan dan pengawasan koperasi	138.102.000 333.170.250	dan perluasan akses permodalan koperasi	2 kali (Angka) 1 Angkatan (Angka)	Perkoperasian)			Н			
#	Meningkatkan daya saing usaha skala mikro dan kecil							Pemberian tasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasisi masyarakat	430.225.250	berbasis Kopetensi dan Berbasis masyarakat bagi Pencari kerja di Kota Jambi	110 (Angka) 110 (Angka)						\coprod	
								Penyusunan penyebarluasan informasi pasar kerja	217.810.250	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antar Kerja dan Terselenggaranya Job Fair Kota Jambi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 Bidang Penempatan	20 Perusahaan (Angka) 20 Perusahaan (Angka)	Nasution (Kabid Penta kerja)						
							Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hub industrial	108.250.000	Tenaga Kerja Terlaksana Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Kasus (Angka) 40 Kasus (Angka)			Ì				
		Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	4 (%) 13,9	32,4 9 (%) 28	5 (%) 42	(%)		Fasilitasi penyelesaian prosedur perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	40.446.000	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan (Angka) 30 perusahaan (Angka)	Ramayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)						
			(%)	(%)	(%)	(%)		Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	140.400.000	Terlaksananya Batuan Kepada Masyarakat	30 Orang (Angka)		\blacksquare	H	Ħ	Ħ	₩	1
							Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah	270.284.500	Terlaksananya pelatihan Olahan Makanan, Terlaksananya Pelatihan Sertifikat label halal, Terlaksana Pelatihan Handy Carft	270 Orang dan 15 UKM (Angka)	Iman Bastian (Kabid UMKM)					\coprod	
			2,02 (%)	4,04 (%)	6,06 (%)	(%)		Penguatan pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah	448.760.750	Terlaksananya Kegiatan penguatan pemasaran promosi produk koperasi, UMKM	3 kali Luar Daerah dan 4 Kali (Angka)							
								Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.468.000	Tersedianya Peningkatan kualitas SDM Koperasi	40 Koperasi (Angka)	Rahmayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)						
							Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi renguatan struktur permodalan		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi	5 Angkatan/10 kali (Angka)	Yuda Dharma (Kabid			Щ	Ц	Ш	
			4,01 (%)	8,03 (%)	12,0 5 (%)			koperasi Pembinaan dan pengawasan koperasi	138.102.000 333.170.250	Terlaksananya fasilitasi peningkatan dan perluasan akses permodalan koperasi	2 kali (Angka) 1 Angkatan (Angka)	Perkoperasian)						
								Pemberian fasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasisi masyarakat	430.225.250	Terlaksananya Keterampilan berbasis Kopetensi dan Berbasis masyarakat bagi Pencari kerja di Kota Jambi	110 (Angka) 110 (Angka)	Nasution (Kabid Penta kerja)						
								Penyusunan penyebarluasan informasi pasar kerja	217.810.250	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antar Kerja dan Terselenggaranya Job Fair Kota Jambi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 Bidang Penempatan Tenaga Kerja	20 Perusahaan (Angka) 20 Perusahaan (Angka)	Nasution (Kabid Penta kerja)						

					In the Kirchen						_	_		_		-
					Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hub industrial	108.250.000	Terlaksana Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Kasus (Angka) 40 Kasus (Angka)	Ramayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)						
	16,2	32.4	48,7			Fasilitasi penyelesaian prosedur		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan (Angka) 30	Ramayanti (Kabid HI						П
Persentase daya saing produk IKM	4 (%) 13,9 (%)	9 (%) 28 (%)	5 (%) 42 (%)	(%)	7	perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	40.446.000	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	perusahaan (Angka)	dan Pengawasan Koperasi)						
	(70)	(70)	(,0)	(,0,		Pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UMKM dan koperasi	140.400.000	Terlaksananya Batuan Kepada Masyarakat	30 Orang (Angka)		Ш	T	#	Н		Ħ
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah		Terlaksananya pelatihan Olahan Makanan, Terlaksananya Pelatihan Sertifikat label halal, Terlaksana Pelatihan Handy Carft	270 Orang dan 15 UKM (Angka)	Iman Bastian (Kabid UMKM)						
	2,02 (%)		6,06 (%)	(%)		Penguatan pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah	448.760.750	Terlaksananya Kegiatan penguatan pemasaran promosi produk koperasi, UMKM	3 kali Luar Daerah dan 4 Kali (Angka)							
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36.468.000	Tersedianya Peningkatan kualitas SDM Koperasi	40 Koperasi (Angka)	Rahmayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)						
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Sosialisasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	101.380.000		5 Angkatan/10 kali (Angka)		Ш		Ш	Ш		Ш
			12,0			Penguatan struktur permodalan koperasi	138.102.000		2 kali (Angka)	Yuda Dharma (Kabid Perkoperasian)	Ш		Ш			Ц
		8,03 (%)		(%)	,	Pembinaan dan pengawasan koperasi	333.170.250	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM pengurus koperasi	1 Angkatan (Angka)		Ш		Ш	Ш		Ш
						Pemberian tasilitasi dan pengadaan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasisi masvarakat	430.225.250	Terlaksananya Keterampilan berbasis Kopetensi dan Berbasis masyarakat bagi Pencari kerja di Kota Jambi	110 (Angka) 110 (Angka)							
						Penyusunan penyebarluasan informasi pasar kerja	217.810.250	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja, Pelayanan Antar Kerja dan Terselenggaranya Job Fair Kota Jambi dan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2015 Bidang Penempatan	20 Perusahaan (Angka) 20 Perusahaan	Nasution (Kabid Penta kerja)						
					Peningkatan Kualitas, Perlindungan			Tenaga Kerja	(Angka) 40 Kasus		Н	$\ \cdot\ $	Н			H
					dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hub industrial	108.250.000	Terlaksana Prosedur Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	(Angka) 40 Kasus (Angka)							
						Fasilitasi penyelesaian prosedur		Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan (Angka)	Ramayanti (Kabid HI dan Pengawasan Koperasi)						
Persentase koperasi berkualitas	16,2 4 (%) 13,9	32,4 9 (%) 28	48,7 5 (%) 42	(%)		perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	40.446.000	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perlindungan Hukum dan Jamsostek	30 perusahaan (Angka)							
	(%)	(%)	(%)	(%)		Pemanfaatan fasilitas pemerintah		Terlaksananya Batuan Kepada	30 Orang		H	H	#	H		+
					Pengembangan Sistem Pendukung	untuk UMKM dan koperasi Pengembangan usaha mikro kecil		Masyarakat Terlaksananya pelatihan Olahan Makanan, Terlaksananya Pelatihan Sertifikat label halal, Terlaksana	(Angka) 270 Orang dan 15 UKM	Iman Bastian (Kabid						
			6,06	(%)	Usaha Bagi UMKM	dan menengah Penguatan pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil dan menengah		Pelatihan Handy Carft Terlaksananya Kegiatan penguatan pemasaran promosi produk koperasi, UMKM	(Angka) 3 kali Luar Daerah dan 4 Kali (Angka)	UMKM)				H	\dagger	\dagger

				_	_	_	_						ID-h		_				_
									1		Tersedianya Peningkatan kualitas	40 Koperasi	Rahmayanti (Kabid HI dan Pengawasan			Ш	ш		
									Monitoring, evaluasi dan pelaporan	36,468,000	SDM Koperasi	(Angka)	Koperasi)			Ш	ш		
									Sosialisasi pelaksanaan kebijakan		Terlaksananya Sosialisasi			111		ш	77	П	
								Basis shates Kasitas Kalasaha asaa			Pelaksanaan Kebijakan dan	5 Angkatan/10)			Ш	Ш		
								Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	koperasi	101.380.000		kali (Angka)				Ш	Ш		
								Roperasi			Terlaksananya fasilitasi peningkatan		Yuda Dharma (Kabid	Ш		Ш	П	П	П
									Penguatan struktur permodalan	400 400 000	dan perluasan akses permodalan	0 11: (41)	Perkoperasian)	ш		Ш	Ш		ш
				١.,	. ا .	12	2,0		koperasi Pembinaan dan pengawasan	138.102.000	Terlaksananya peningkatan kualitas	2 kali (Angka)		ш	#	ш	-	ш	ш
					1 8,0		6) (%	,	koperasi	333 170 250	SDM pengurus koperasi	(Angka)			ш	Ш	ш		
	# 1	Meningkatkan derajat kesehatan		(/0) (/0) (0) (/) <u> </u>	Pengadaan obat dan perbekalan	000.170.200	ODW pengurus Roperasi	(/ trigita)		+++	++-	Н	++	-	
1	# '	werningkatkan derajat kesenatan							kesehatan						ш	Ш	ш		
									Peningkatan mutu pelayanan					т	\mathbf{T}	ш	$^{+}$		
									farmasi komunitas dan rumah					ш			Ш		
									sakit					ш			ш		
									Peningkatan mutu pelayanan						411	ш	Ш		
									kesehatan dasar					ш	44	ш	ш	ш	\vdash
									Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan						ш	Ш	ш		
		I							Penyuluhan dan Pengembangan					H	+	HH	++		
		I							Media Promosi kesehatan										
		I							Peningkatan dan pemberdayaan							Ш	11		
		I							masyarakat bidang										
		I							kesehatan					Ш		Ш	Ш		
		I							Pemberdayaan Masyarakat untuk							Ш	П	П	П
									pencapaian keluarga							Ш	Ш		
									sadar gizi					ш	#	ш	-	₩	
									Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit						ш	Ш	ш		
									menular						ш	Ш	ш		
									Pencegahan penyakit yang dapat					т		ш	***	_	
								1	dicegah dengan imunisasi					ш			ш		
			A - (A					Program Peningkatan Akses dan	(PD31)					ш			ш		
			Angka Harapan Hidup (AHH)					Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan surveilans epidemiologi					П	\mathbf{T}	Ш	П		
								Wasyarakat	dan penanggulangan					ш	ш	Ш	ш		
									wabah					ш	44	ш	++	ш	
									Pelayanan dan penanggulangan penyakit menular langsung						ш	Ш	ш		
									Pengandaan sarana dan prasarana					н	#	Н	-	Н	8
									puskesmas					ш	411	Ш	Ш		
									Kemitraan asuransi kesehatan					ш					
									masyarakat dan pasien						ш	Ш	ш		
									kurang mampu						Ш	Ш	ш		
									Peningkatan pelayanan kesehatan							Ш	Ш		
		I							ibu,bayi baru lahir dan keluarga berencana							Ш	Ш		
		I							Peningkatan pelayanan kesehatan					H	+	Н	₩	Н	H
		I							anak, remaja dan lansia							Ш			
		I							Bantuan Operasional Kesehatan										
		I							(BOK)							Ш	Ш		
		I							Peningkatan kesehatan kerja dan					Π		ПП	П		\Box
		I							kesehatan olahraga					ш	44	ш	4	ш	
		I							Pengendalian penyakit tidak menular dan pelayanan										
		I							kesehatan jiwa										
		I							Operasional BLUD Puskesmas					H	-	Ш	11	П	
#	#	Meningkatkan Kualitas dan		П					Penyelenggara akreditasi SD									T	
		Aksesibilitas Pendidikan							Workshop penguatan dan					Ш		Ш	Π	П	П
		I							implementasi kurikulum PAUD					Ш		Ш			
		I							dan DIKMAS serta penilaian					Ш		Ш			
		I							pelaksanaan kurikulum					ш		ш	++	Н	Н
		I							Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan										
		I							DIKMAS										
								•			. '		•						

Harapan Lama Sekolah (HLS)	0 (%) Program Peningkatar dan Tata K Pendidiki	elola nasional SMP		
----------------------------	--	--------------------	--	--

0 (%)	(%)	0 (%) (1.3 2 %) 0,6 8 8				A (Panyal)				
				Akuisisi, Pengolahan dan Layanan Kearsipan Kota Jambi	416.900.000	Jumlah Storyline Jumlah Arsip yang diolah Jumlah Arsip yang terakuisisin pada LKD Jumlah Preservasi Arsip Statis pada LKD Jumlah Dokumen SOP layanan kearsipan pada LKD Jumlah PD yang diikutkan inhouse training oleh tim ANRI Jumlah PD yang mendapat pendampingan teknis implementasi SIKD Jumlah PD yang dievaluasi pelaksanaan SIKD Penyusunan naskah sumber Penerbitan Naskah Sumber Fumigasi Alih Media Arsip Pameran Arsip Konten Diorama Kearsipan	4 (Perwal) 4 (Perwal) 4 (Perwal) 1 (Kegiatan) 1 (Kegiatan) 1 (Kegiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Rogiatan) 1 (Buku) - (Buku) - (Buku) - (Berkas) - (Dokumen) - (Dokumen) - (PD) - (PD) - (PD) - (PD) - (PD) - (PD) - (Naskah) - (Kegiatan)	DESY PURLINAWATI, SH			
						Jumlah Asistensi Pembinaan PD, Bagian pada Sekretariat Daerah dan Kelurahan Jumlah Asistensi Pembinaan Ormas/Orpol, Perusahaan Jumlah PD, Bag, Kelurahan yang mendapat audit dan monitoring kearsipan Pendataan Ormas/Orpol dan Perusahaan	23 (PD, Bag, Kelurahan) 23 (PD, Bag, Kelurahan) 13 (Ormas/Orpol, Perusahaan) 13 (Ormas/Orpol, Perusahaan) 16 (PD, Bag, Kelurahan) 16 (PD, Bag, Kelurahan) - (Ormas/Orpol, Perusahaan)				

	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Pengelolaan, Penyelamatan, Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	275.238.400	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pra Lomba Kearsipan Internal Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Workshop Penyusutan Arsip Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundangan Kearsipan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Dasar-dasar Kearsipan Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Dinamis Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Aktif Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Vital Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi PD Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi PD		DR. ROMY TRI NUGRAHA, M.Si			
						Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Dasar-dasar Kearsipan Bagi Ormas/Orpol, Perusahaan Jumlah Pegawai yang Mengikuti Workshop Pengelolaan Arsip Vital Bagi Ormas/Orpol, Perusahaan	(Orang/tahun) - (Orang/tahun)				

	7 (%)	7 (%)	7 (%)	7 (%)				Jumlah Pegawai yang Mengikuti Coaching Clinic Pengelolaan Arsip Statis Bagi Ormas/Orpol, Perusahaan Lomba Kearsipan untuk Tingkat PD dan Pengelola Kearsipan Lomba Kearsipan Untuk Tingkat Kelurahan dan Pengelola Kearsipan	- (Kegiatan)			
						Pengembangan Koleksi Perpustakaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	985.020.000	Cetak Bertambahnya Jumlah e-book Jumlah Pengunjung Jumlah Transaksi Peminjaman Jumlah Bahan Pustaka yang Dilestarikan Jumlah Tenaga Pengelola	(Eksemplar) 106 (Judul) 35336 (Pengunjung) 2804 (Judul) 100 (Eksemplar)	Dra. EKAWATI, M.Pd.I		
					Peningkatan Mutu dan Pelayanan Perpustakaan		230.000.500	Perpustakaan yang Mengikuti	40 (Orang/tahun) 3 (MOU/PKS) 4 (Kegiatan) 59 (Perpustakaan /Pojok Baca)	CHAIRANI, SE		
	1,43 (%)	1,44 (%)	1,44 (%)	1,44		Pembinaan Pengembangan Perpustakaan, Kerjasama dan Pembudayaan Gemar Membaca Penyelenggara akreditasi SD Workshop penguatan dan implementasi kurikulum PAUD		Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan/Pojok Baca	171 (Perpustakaan /Pojok Baca)		Щ	
						dan DIKMAS serta penilaian pelaksanaan kurikulum Peningkatan kelembagaan dan sarana prasarana PAUD dan DIKMAS Pengelolaan Bantuan Operasional						
						PAUD Peningkatan minat bakat peserta didik PAUD dan DIKMAS Workshop penguatan dan implementasi kurikulum SD serta penilaian pelaksanaan						
						Pengembangan kelembagaan SD pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SD Peningkatan minat bakat, lomba kreatifitas, olahraga peserta didik SD penyelenggaraan try out dan ujian						
						sekolah SD Perlindungan, penghargaan dan apresiasi peserta didik SD berprestasi tingkat nasional Workshop penguatan dan implementasi kurikulum SMP						\prod
Persentase masyarakat tidak					Program Peningkatan Akses, Mutu	serta penilaian pelaksanaan kurikulum Pengembangan kelembagaan SMP Pengelolaan Bantuan Operasional						

1.1	mampu yang mendapat jaminan	0 (%)	dan Tata Kelola	Peningkatan minat bakat. lomba	I	1 1	
	pelayanan pendidikan		Pendidikan	kreatifitas, olahraga peserta didik SMP			
				Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru			
				Penyelenggaraan try out dan ujian nasional SMP			
				Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan			
				Peningkatan kompetensi pendidik, pengelola dan tenaga			
				pendidik PAUD dan DIKMAS			
				Penyelenggaraan akreditas PAUD dan DIKMAS			
				Penyelenggaraan akreditas PAUD dan DIKMAS			
				Penyelenggaraan pengembangan PAUD dan DIKMAS			
				Peningkatan kompetensi pendidik, pengawas SD, tenaga			
				administrasi sekolah, tenaga perpustakaan SD			
				Rapat koordinasi perencanaan,			
				monitoring, evaluasi dan publikasi pendidikan			
				Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan			
				Tenaga Kependidikan SMP Tingkat Nasional			
				Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru Penguatan MGMP, KKG, MKKS,			
				MKPS, KKPS Penyelenggaraan Pendidikan			
				Kecakapan Hidup Penyelenggara akreditasi SD			
				Workshop penguatan dan			
				implementasi kurikulum PAUD dan DIKMAS serta penilaian			
				pelaksanaan kurikulum Peningkatan kelembagaan dan			
				sarana prasarana PAUD dan DIKMAS			
				Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD			
				Peningkatan minat bakat peserta didik PAUD dan DIKMAS			
				Workshop penguatan dan implementasi kurikulum SD serta			
				penilaian pelaksanaan			
				Pengembangan kelembagaan SD pengelolaan Bantuan Operasional			
				Sekolah SD Peningkatan minat bakat, lomba			
				kreatifitas, olahraga peserta didik SD			
				penyelenggaraan try out dan ujian sekolah SD			
				Perlindungan, penghargaan dan apresiasi peserta didik SD			
				berprestasi tingkat nasional			
				Workshop penguatan dan implementasi kurikulum SMP			
				serta penilaian pelaksanaan kurikulum			
1	I			Pengembangan kelembagaan SMP	I		

		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		0(Program Peningkatan Akses, Mutu dan Tata Kelola Pendidikan	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah SMP Peningkatan minat bakat. Iomba kreatifitas, olahraga peserta didik SMP Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru Penyelenggaran penerimaan peserta didik baru Penyelenggaraan try out dan ujian nasional SMP Penyelenggaraan try out dan ujian nasional SMP Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan Peningkatan kompetensi pendidik, pengelola dan tenaga pendidik PAUD dan DIKMAS Penyelenggaraan akreditas PAUD dan DIKMAS Penyelenggaraan akreditas PAUD dan DIKMAS Penyelenggaraan pengembangan PAUD dan DIKMAS Penjelanggaraan pengembangan PAUD dan DIKMAS Penjelanggaraan pengembangan PAUD dan DIKMAS Penjengawas SD, tenaga administrasi sekolah, tenaga perpustakaan SD Rapat koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan publikasi pendidikan Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Perlindungan, Penghargaan dan Apresiasi Pendidik dan Penguatan MGMP, KKG, MKKS, MKPS, KKPS									
			0 (%) 0 (%)	10.6 6 (%) 0 (%)	0	21.3 2 (%) 10,6 8 (%)											
#	Mengendalikan angka kelahiran penduduk							Pembinaan dan Operasional Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	670.650.000	Persentase terbinanya peran serta	100 (%)	NETTI HERAWATI, SE					
		Laju pertumbuhan penduduk	575	575	575	575	25. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Kegiatan Institusi dan Partisipasi Masyarakat serta KIE	922.100.000	mitra kerja, kader IMP serta pemahaman terhadap informasi KB Persentase peningkatan dukungan	100 (%)	FAIZA, SE					
			(,,,,	(70)	(70)	(70)	TELO, ITON OLD, THE INT	Bantuan Operasional KB Pembinaan dan Operasional	2.393.933.000	Program KB	95 (%)	IBRAHIM, SE		H	H	-	
								Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	426.960.000	Persentase pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	75 (%)	YOESNIDAWATI HOESNI, SH					
								Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	670.650.000		100 (%)	NETTI HERAWATI, SE					
		Persentase jumlah keluarga	24,0 575	24,0 575	24,0 575	24,0 575	25. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN	Kegiatan Institusi dan Partisipasi Masyarakat serta KIE	922.100.000	Persentase terbinanya peran serta mitra kerja, kader IMP serta pemahaman terhadap informasi KB	100 (%)	FAIZA, SE					

П		sejantera	(%)	(%)	(%)	(%)	KELUARGA SEJAHTERA	Bantuan Operasional KB	2.393.933.000	Persentase peningkatan dukungan Program KB	95 (%)	IBRAHIM, SE						
								Pembinaan dan Operasional Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase pembinaan kelompok kegiatan ketahanan keluarga	75 (%)	YOESNIDAWATI HOESNI, SH	I					
#	Meningkatkan kesetaraan gender		9,25			37 (%)		Pelaksanaan BBGRM	155.000.000	Persentase kelurahan yang aktif mengikuti program BBGRM	35 (%)		П	П	П	П		
	mornighanian neocialaan gonioo		(70)	(/0)	(%)	(70)	Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.484.514.550	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Aktif di Kecamatan	80 (%)	ROSDALIA, SH	Ħ	П		I		
			40.7	20.5	50.0	70	Program Peningkatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam	207.000.000	Jumlah LPM berprestasi	0 (Angka)		₩	#	ш	44	\dashv	4
			19,7 5 (%)	(%)	59,2 5 (%)	79 (%)	Pengram Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	207.000.000	Jumlah Warung teknologi dan Posyantek Aktif	10 (Angka) 10 (Angka)							
										Jumlah Badan/Lembaga (Posyantek) yang menjalin Kemitraan	1 (Angka) 1 (Angka)	AMMURRIM 05						
										Jumlah KUBE yang berbadan hukum	34 (Angka) 34 (Angka)	AMINUDDIN, SE	Ш	Ш	Ш	Ш		
								Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	1.903.535.000		468 (Angka) 468 (Angka)		Ħ	П	П	П	П	Ī
										Persentase MONEV Sarana Prasarana Kelurahan	78 (%) 78 (%)							
			17,5 (%)		52,5 (%)			Pemenuhan Hak dan Perlindungan	427.135.000	Tercapainya Persentase Standar	70 (%)		П	П	П	П	Π	
		Indeks pembangunan gender	(%)	(%)	(%)	(%)	Program Peningkatan Kesetaraan	Tuak		Persentase kelurahan layak anak	100 (%)	1	Ш	Ш	Ш	Ш		
		madic pombanganan gondor					Gender dan Perempuan dan			Persentase kecamatan anak Jumlah sosialisasi, GN AKSA,	100 (%) 4 (Angka)	YUNIATI, S. Sos., MM	Ш	Ш	Ш	Ш		
							Perlindungan Anak			PATBM, dan Konvensi hak anak	, , ,		Ш	Ш	Ш	Ш		
										Jumlah anak yang ikut organisasi anak (FAD)	81 (Angka)		Ш	Ш	Ш	Ш		
							Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2.142.365.000	Persentase jumlah TP PKK aktif Persentase kelurahan dasa wisma yang berprestasi di wilayah P2WKSS	100 (%)							
			8 (Ang ka)		(Ang	(Ang		Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	919.730.000	Tersedianya data indikator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	tidak ada (%)	NINING MARYANI, SE				\prod		
										Persentase OPD yang telah memiliki Focal Point PUG Persentase OPD yang memiliki data	20 (%)				Ш			
							Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan			terpilah	` ′			Ш	Ш	Ш		
							Perlindungan Anak			Jumlah organisasi perempuan yang terbina	4 (Angka)			Ш	Ш	Ш		
								Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	28.216.000	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 (%)	YUNIATI, S.Sos., MM						
										Persentase kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani	100 (%)]	Ш					
			9,25					Pelaksanaan BBGRM	155.000.000	Persentase kelurahan yang aktif	35 (%)		Ħ	H	H	#		
			(%)	(%)	5 (%)	(%)	Program Peningkatan	Penguatan Kelembagaan dan	2.484.514.550	mengikuti program BBGRM Persentase Kelompok	80 (%)		+	+		+	\blacksquare	
					``		Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.707.314.330	Pemberdayaan Masyarakat Aktif di Kecamatan		ROSDALIA, SH						
			19,7	39,5	59,2	79	Program Peningkatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam	207.000.000	Jumlah LPM berprestasi	0 (Angka) 10 (Angka)		+	+	H	#	+	-
			5 (%)	(%)	5 (%)	(%)	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Warung teknologi dan Posyantek Aktif								
			1							Jumlah Badan/Lembaga	10 (Angka) 1 (Angka)	1 I						
			1							(Posyantek) yang menjalin Kemitraan	1 (Angka)							
										Jumlah KUBE yang berbadan	34 (Angka)	AMINUDDIN, SE	Ш		П	П		

	1	•	1				I	1	1	hukum	34 (Angka)	1 1			_		
								Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	1.903.535.000		468 (Angka)	1 1	+++	++-	H	₩	
								,		mengikuti program kampung bantar	468 (Angka)		Ш	Ш	Ш	Ш	
										Persentase MONEV Sarana	78 (%)	1	Ш	Ш	Ш	Ш	
										Prasarana Kelurahan			Ш	Ш	Ш	Ш	
			17.5	35	52.5	70	Program Peningkatan Kesetaraan	Pemenuhan Hak dan Perlindungan	427 135 000	Tercapainya Persentase Standar	78 (%) 70 (%)			#	H	₩	
				(%)			Gender dan Perempuan dan	Anak	427.100.000	KLA	70 (70)		Ш	Ш	Ш	Ш	
							Perlindungan Anak						Ш	Ш	Ш	Ш	
		Indeks pemberdayaan gender								Persentase kelurahan layak anak Persentase kecamatan anak	100 (%) 100 (%)	YUNIATI, S. Sos., MM	Ш	Ш	Ш	Ш	
										Jumlah sosialisasi, GN AKSA,	4 (Angka)	TOTALIZATI, O. COS., IMIM	Ш	Ш	Ш	Ш	
										PATBM, dan Konvensi hak anak			Ш	Ш	Ш	Ш	
										Jumlah anak yang ikut organisasi anak (FAD)	81 (Angka)		Ш	Ш	Ш	Ш	
							Program Peningkatan Kesetaraan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan	2.142.365.000	Persentase jumlah TP PKK aktif	100 (%)			-	H	**	
							Gender dan Perempuan dan	Keluarga (PKK)		Persentase kelurahan dasa wisma	' '		Ш	Ш	Ш	Ш	
							Perlindungan Anak			yang berprestasi di wilayah P2WKSS			Ш	Ш	Ш	Ш	
			8	16	32	33		Pemberdayaan dan Perlindungan	919.730.000	Tersedianya data indikator	tidak ada (%)	1 1	Ħ	11		Ħ	
			(Ang	(Ang	(Ang	(Ang		Perempuan		pemberdayaan perempuan dan				11'	Ш	Ш	
			ка)	ka)	(ka)	ka)				kesetaraan gender Persentase OPD yang telah	20 (%)	NINING MARYANI, SE	Ш	Ш	Ш	Ш	
										memiliki Focal Point PUG	20 (70)		Ш	Ш	Ш	Ш	
							Program Peningkatan Kesetaraan			Persentase OPD yang memiliki data	20 (%)]	Ш	Ш	Ш	Ш	
							Gender dan Perempuan dan			terpilah Jumlah organisasi perempuan yang	4 (Angka)	·	Ш	Ш	Ш	Ш	
							Perlindungan Anak			terbina			Ш	Ш	Ш	Ш	\perp
								Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan	28.216.000	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 (%)	YUNIATI, S.Sos., MM	Ш	Ш	Ш	Ш	
								anak (P2TP2A)		ternadap anak yang ditangani			Ш	Ш	Ш	Ш	
										Persentase kasus kekerasan dalam	100 (%)	1	Ш	Ш	Ш	Ш	
ŀ	# Meningkatkan pemenuhan hak anak		0.25	18,5	27.7	37				rumah tangga yang ditangani Persentase kelurahan yang aktif				#	H	₩	+
	Werningkatkan pemenanan nak anak		(%)		5	(%)	Program Peningkatan	Pelaksanaan BBGRM	155.000.000	mengikuti program BBGRM	35 (%)		Ш	Ш	Ш	Ш	
					(%)		Pemberdayaan dan Penguatan	Penguatan Kelembagaan dan	2.484.514.550	Persentase Kelompok	80 (%)	ROSDALIA, SH	Ш	П	П	П	
							Kelembagaan Masyarakat	Pengembangan Partisipasi Masyarakat		Pemberdayaan Masyarakat Aktif di Kecamatan			Ш	Ш	Ш	Ш	
										Jumlah LPM berprestasi	0 (Angka)	1	Ш	Ш	Ш	Ш	
			19,7 5	39,5 (%)			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi	207.000.000	Jumlah Warung teknologi dan	10 (Angka)		Ш	Ш	Ш	Ш	
			(%)	(70)	(%)	(70)	Kelembagaan Masyarakat	dan Teknologi Tepat Guna		Posyantek Aktif			Ш	Ш	Ш	Ш	
											10 (Angka)		Ш	Ш	Ш	Ш	
										Jumlah Badan/Lembaga (Posyantek) yang menjalin	1 (Angka)						
										Kemitraan	1 (Angka)	AMINI IDDIN OF	Ш	Ш	Ш	Ш	
										Jumlah KUBE yang berbadan hukum	34 (Angka) 34 (Angka)	AMINUDDIN, SE	Ш	Ш	Ш	Ш	
								Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	1.903.535.000	Jumlah Rumah Tangga yang	468 (Angka)	1	**	#	H	#	
										mengikuti program kampung bantar	468 (Angka)	- I					
										Persentase MONEV Sarana	78 (%)	1 1	Ш	Ш	Ш	Ш	
										Prasarana Kelurahan	78 (%)	- I					
				35			Program Peningkatan Kesetaraan	Pemenuhan Hak dan Perlindungan	427.135.000	Tercapainya Persentase Standar	70 (%)			11		Ħ	
		Demontors half analy :	(%)	(%)	(%)	(%)	Gender dan Perempuan dan	Anak		KLA							
		Persentase hak anak yang terpenuhi					Perlindungan Anak			Persentase kelurahan lavak anak	100 (%)	- I					
										Persentase kecamatan anak	100 (%)	YUNIATI, S. Sos., MM					
										Jumlah sosialisasi, GN AKSA,	4 (Angka)						
										PATBM, dan Konvensi hak anak Jumlah anak yang ikut organisasi	81 (Angka)	1 1					
										anak (FAD)	. ()				Ш	Ш	
1	1		Щ							anak (FAD)				Ш	Ш	Ш	

							Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2.142.365.000	Persentase jumlah TP PKK aktif Persentase kelurahan dasa wisma yang berprestasi di wilayah P2WKSS	100 (%)								
			8 (Ang ka)	16 (Ang ka)		33 (Ang ka)		Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	919.730.000	Tersedianya data indikator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	tidak ada (%)	NINING MARYANI, SE		П			П	Π	1
										Persentase OPD yang telah memiliki Focal Point PUG	20 (%)]		Ш	Ш				ı
							Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan			Persentase OPD yang memiliki data terpilah	20 (%)]		Ш	Ш				
							Perlindungan Anak			Jumlah organisasi perempuan yang terbina				Ш	Ш		L	Ц	
								Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	28.216.000	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 (%)	YUNIATI, S.Sos., MM							
#	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan		9,25 (%)	18,5 (%)	27,7 5	37 (%)		Pelaksanaan BBGRM	155.000.000	Persentase kelurahan yang aktif mengikuti program BBGRM	35 (%)		Ш	\dagger	П	T	Г		
	, ,				(%)		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2.484.514.550	Persentase Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Aktif di Kecamatan	80 (%)	ROSDALIA, SH							
			19,7 5 (%)	39,5 (%)	59,2 5 (%)		Program Peningkatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna	207.000.000	Jumlah LPM berprestasi Jumlah Warung teknologi dan Posyantek Aktif	0 (Angka) 10 (Angka)			Ħ					
										Jumlah Badan/Lembaga (Posyantek) yang menjalin	10 (Angka) 1 (Angka) 1 (Angka)								
								Bersih Aman dan Pintar (BANTAR)	1.903.535.000	Jumlah KUBE yang berbadan hukum Jumlah Rumah Tangga yang	34 (Angka) 34 (Angka) 468 (Angka)	AMINUDDIN, SE	Щ	#		4		$oldsymbol{\downarrow}$	
										mengikuti program kampung bantar Persentase MONEV Sarana Prasarana Kelurahan	468 (Angka) 78 (%) 78 (%)								
		Persentase pemberdayaan					Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		Tercapainya Persentase Standar KLA	70 (%)			Ħ		Ť			1
		masyarakat dalam pembangunan	17,5		52,5					Persentase kelurahan layak anak Persentase kecamatan anak Jumlah sosialisasi, GN AKSA, PATBM, dan Konvensi hak anak	100 (%) 100 (%) 4 (Angka)	YUNIATI, S. Sos., MM							
			(%)	(%)	(%)	(%)					81 (Angka)	1	Ш		Ш				
							Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2.142.365.000	Persentase jumlah TP PKK aktif Persentase kelurahan dasa wisma yang berprestasi di wilayah P2WKSS	100 (%)				Ï	Ī			
			8 (Ang ka)	16 (Ang ka)	32 (Ang ka)			Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	919.730.000	Tersedianya data indikator pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender	tidak ada (%)	NINING MARYANI, SE		Π	П		П	Π	
							Program Peningkatan Kesetaraan			memiliki Focal Point PUG Persentase OPD yang memiliki data	20 (%)								
							Gender dan Perempuan dan Perlindungan Anak			terpilah Jumlah organisasi perempuan yang terbina	4 (Angka)	1							
								Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	28.216.000	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani	100 (%)								
#	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda			L		L				rumah tangga yang ditangani	100 (%) 50 (OKP)]		H					

	dan Organisasi Kepemudaan	Persentase Pemuda yang					Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepermudaan	Pembinaan Kepemudaan	1.000.000.000	Jumlah Paskibraka yang Lolos Tingkat Provinsi Jumlah Paskibraka yang Lolos Tingkat Nasional Jumlah Wirausaha Muda yang Dibina	50 (Orang) 10 (Orang) 1 (Orang) 60 (Orang) 5 (Orang)	YUNIATI, S.Sos., MM						
		Berpartisipasi dan Berperan Aktif dalam Organisasi	- (%)	- (%)	30 (%)	40 (%)		Pelaksanaan Olahraga dan Kepemudaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Olahraga dan	70.525.000	Jumlah Data Kepemudaan Jumlah Data Sarana Prasarana dan	1 (Dokumen)	ZAKARIA, SE/PPTK Bidang Sarana dan	#	\mathbb{H}	H	#	+	
								Kepemudaan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	70.525.000 500.000.000	Olahraga Persentase Pembangunan Sarana	1 (Dokumen) 18 (%)	Prasarana	#	Н		Ħ	\blacksquare	
							Pembinaan dan Peningkatan	dan radarana diamaga		Jumlah Pelaksanaan Senam Bersama Jumlah Cabang Olahraga	11 (%) 43 (Kali)							
							Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepernudaan	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2.859.910.000	Pelaksanaan Kompetisi Olahraga Tradisional Jumlah Event / Kompetisi Olahraga	4 (Cabor) 1 (Kegiatan) 112 (Medali) 180 (Orang)	ARDIMAN, S.Pd/PPTK Bidang Olahraga						
	N. C. Division	D. D	68.8 9 (%)	71.1 1 (%)	- (%)	- (%)				Jumlah Pelatih yang Bersertifikasi Persentase Pembinaan Marching Band	5 (Orang) 100 (%)		Ш		Ш		Ш	
	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani					Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Penyandang Maslah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Penangananan Masalah Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat darurat	554.560.000		100 (%)							
										Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dan jumlah taruna siaga bencana (tagana) yang telah mengikuti	100 (%)							
										pemantapan	100 (%)	Kepala Bidang Perlindungan dan						
								Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.130.750.000		100 (%) 100 (%)	Jaminan Sosial	Ħ	Ħ		Ħ		
										Persentase keluarga penerima manfaat pkh yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100 (%)							
											100 (%)							
								Pemberdayaan dan Pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	197.422.000	Persentase psks yang mendapatkan pemberdayaan dan	100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial						
										pembinaan	100 (%) 100 (%) 100 (%)							
								Pembinaan dan Pelayanan sosial bagi orang terlantar	170.000.000	Persentase orang terlantar yang difasilitasi dan dipulangkan	100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial						

Pelayanan dan pembinaan sosial bagi anak yang bermasalah sosial dan lansia 300.950	000		100 (%) 100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			
Gan ransia 300.33c	5.000	Persentase anak balita terlantar di luar panti, anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani, jumlah anak jalanan yang mendapatkan bimbingan dan bantuan, jumlah lansia yang mendapatkan perlindungan,	100 (%)	Neliabilitasi Susiai			
		pendampingan dan bantuan sosial	100 (%)				
Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial 426.000	6.000.000	Persentase gepeng, Tuna sosial, Eks napi dan Tuna wisma yang mendapatkan Pembinaan dan bantuan sosial	100 (%) 100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			
Pengelolaan dan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial 52.250	0.000	Persentase masyarakat yang mendapatkan penyuluhan mengenai izin pengumpulan uang dan barang	100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial			
Pelayanan dan pembinaan kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial 194.170	0.000	Persentase legiun veteran dan	100 (%)	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial			
		keluarga yang mendapatkan tali asih dan jumlah generasi muda yang telah mengikuti sosialisasi nilai nilai patriotik	100 (%) 100 (%) 100 (%)				
Pelayanan dan rehabilitasi disabilitas, korban napza 59.000	0.000	Persentase penyandang disabilitas	100 (%) 100 (%)	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial			

			Pendataan dan informasi Fakir Miskin	153.000.000	Persentase keluarga miskin yang	100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%)				
			Penyuluhan,pelatihan dan pemberdayaan fakir miskin	230.000.000	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan penyuluhan, pelatihan serta mendapatkan hibah peralatan bantuan usaha	100 (%)	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin			
1: (9)	0 25 6) (%)	25 5 (%) (%)	Pembinaan dan pelayanan sosial fakir miskin	100.000.000	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sosial (rekomendasi sktm) dan jumlah pembinaan e- warung	100 (%) 100 (%) 100 (%)				